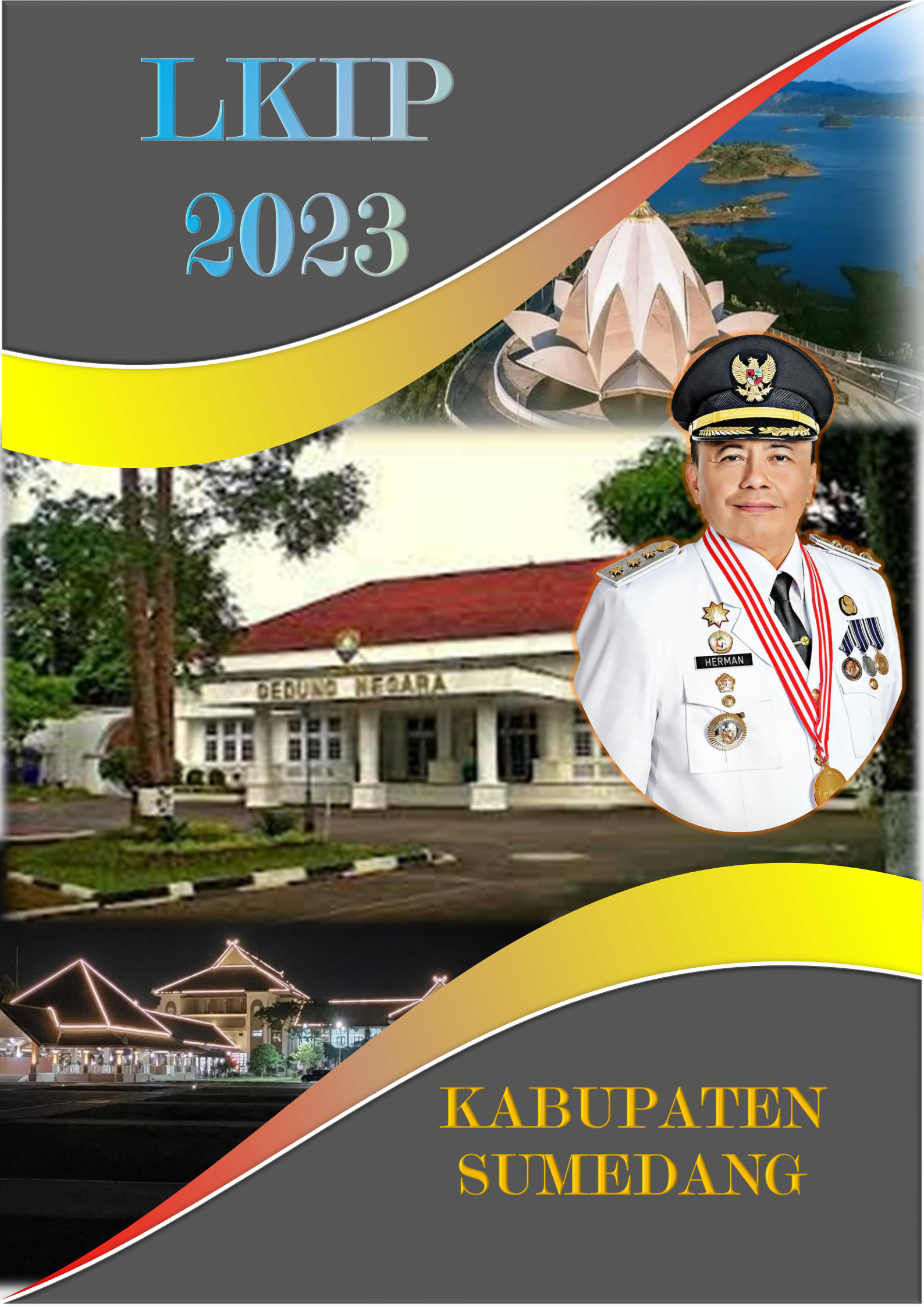
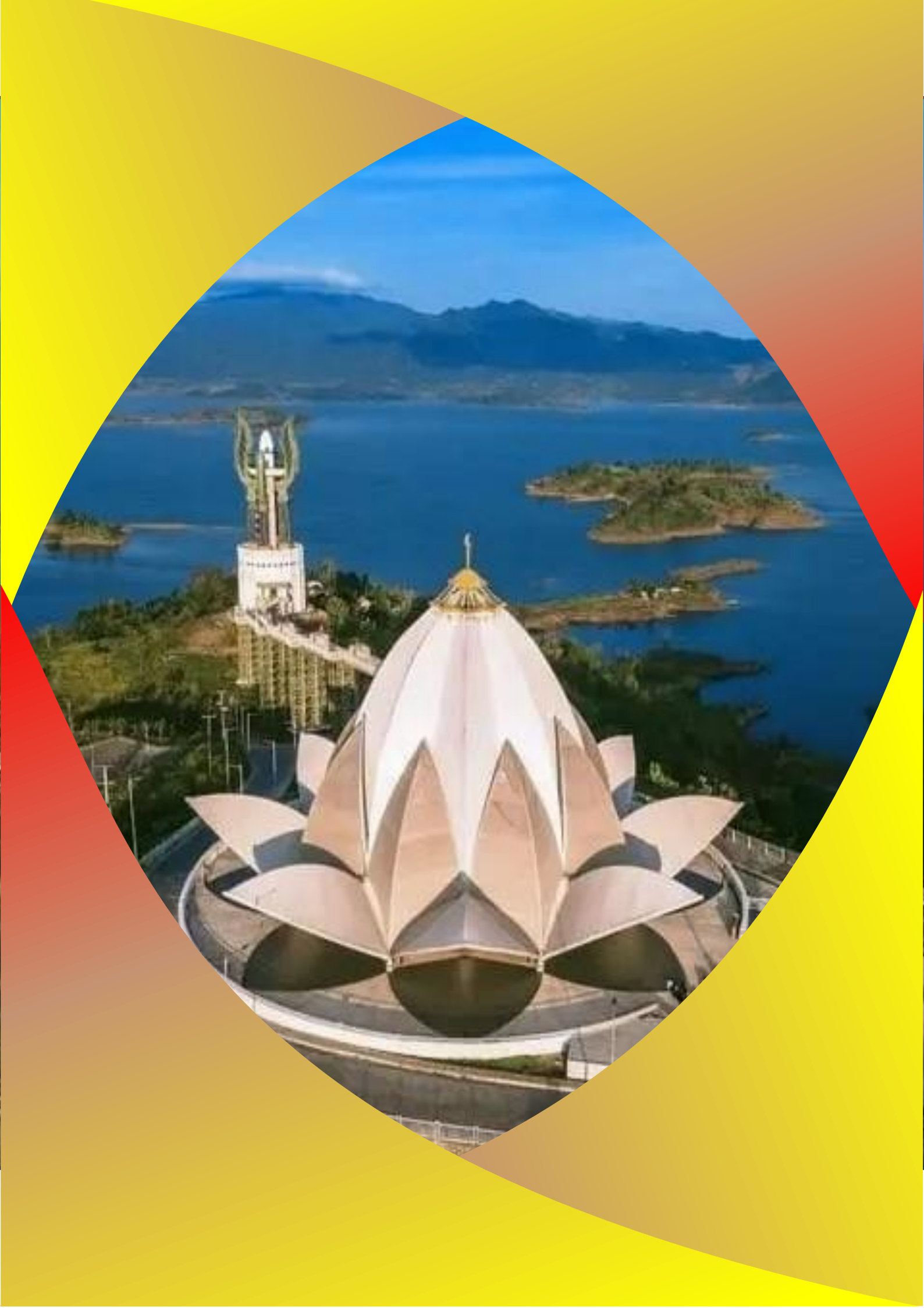


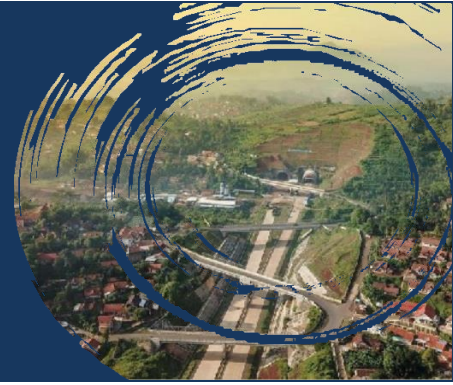
LKIP 2023



KABUPATEN
SUMEDANG



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sumedang Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

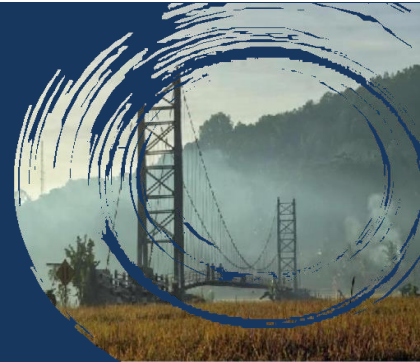
LKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang disusun pada akhir periode anggaran memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2019 – 2023 Perubahan dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Sumedang, Maret 2024

The image shows an official blue ink stamp of the Bupati Sumedang. The stamp is circular with the text 'BUPATI SUMEDANG' at the top and 'Drs. HERMAN SURYATMAN, M. Si.' at the bottom. In the center of the stamp is a signature in blue ink. The signature is written in a cursive style and appears to be 'Herman Suryatman'.

An aerial photograph of Jatiningor National Park. The central focus is a large, colorful castle with a red roof and multiple spires. To the right of the castle is a long, multi-colored rainbow slide. In the foreground, there is a large, colorful circular area with several white, fan-like structures. The park is surrounded by green fields and a large mountain in the background. The text "JATINANGOR NATIONAL PARK" is overlaid in the center of the image.

JATINANGOR NATIONAL PARK



Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 diukur dari capaian target indikator kinerja utama (IKU) Bupati/Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023, bahwa telah ditetapkan IKU Bupati/Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 19 indikator. Capaian IKU ini secara garis besar menggambarkan pula capaian kinerja tahun 2023 atas Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023.

Rata-rata realisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar 101,78% (Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI). Adapun rincian capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Ke-1 : Angka Harapan Hidup

Target kinerja “Angka Harapan Hidup” tahun 2023 sebesar 72.70 – 73.20 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 73,19 tahun atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

2. Indikator Kinerja Ke-2 : Rata-Rata Lama Sekolah

Target kinerja “Rata-Rata Lama Sekolah” tahun 2023 sebesar 8.81 – 9.00 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 8,73 tahun atau capaian kinerja sebesar 99,01% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

3. Indikator Kinerja Ke-3 : Angka Harapan Lama Sekolah

Target kinerja “Angka Harapan Lama Sekolah” tahun 2023 sebesar 13.05 - 13.12 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 13,01 tahun atau capaian kinerja sebesar 99,69% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

4. Indikator Kinerja Ke-4 : Persentase Penduduk Miskin

Target kinerja “Persentase Penduduk Miskin” tahun 2023 sebesar 9.70 – 7.56 % dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 9,36 % atau

capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

5. Indikator Kinerja Ke-5 : Indeks Pembangunan Gender

Target kinerja “Indeks Pembangunan Gender” tahun 2023 sebesar 96,75 poin dan realisasinya 96,13 poin atau capaian kinerja sebesar 99,36% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

6. Indikator Kinerja Ke-6 : Indeks Pemberdayaan Gender

Target kinerja “Indeks Pemberdayaan Gender” tahun 2023 sebesar 71,37 poin dan realisasinya 72,60 poin atau capaian kinerja sebesar 101,73% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja melebihi target.

7. Indikator Kinerja Ke-7 : Indeks Kerukunan Umat Beragama

Target kinerja “Indeks Kerukunan Umat Beragama” tahun 2023 sebesar 74.5 poin dan realisasinya 76.95 poin atau capaian kinerja sebesar 103.29% (kinerja sangat tinggi). Capaian kinerja telah melebihi target.

8. Indikator Kinerja Ke-8 : Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Target kinerja “Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan” tahun 2023 sebesar 4.15 – 6.40% dan realisasinya 0,97% atau capaian kinerja sebesar 23,37% (kinerja rendah). Target kinerja tidak tercapai.

9. Indikator Kinerja Ke-9 : Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Target kinerja “Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan” tahun 2023 sebesar 3.76 – 5.59 % dan realisasinya 2,83 % atau capaian kinerja sebesar 75,26% (kinerja sedang). Target kinerja tidak tercapai.

10. Indikator Kinerja Ke-10 : Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman

Target kinerja “Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman” tahun 2023 sebesar 8.77 – 10.27% dan realisasinya 9,84% atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sangat tinggi). Target Kinerja tercapai.

11. Indikator Kinerja Ke-11 : Indeks Kualitas Infrastruktur

Target kinerja “Indeks Kualitas Infrastruktur” tahun 2023 sebesar 77,65% dan realisasinya berdasarkan data hasil perhitungan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Sumedang didapatkan angka Indeks Kualitas Infrastruktur di Kabupaten Sumedang sebesar 79,22 poin atau capaian kinerja sebesar 102,02% (kinerja sangat tinggi). Pencapaian kinerja

telah melebihi target.

12. Indikator Kinerja Ke-12 : Indeks Ketahanan Daerah

Target kinerja “Indeks Ketahanan Daerah” tahun 2023 sebesar 0.52 poin dan realisasinya adalah 0,52 poin atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sangat tinggi). Pencapaian kinerja tercapai.

13. Indikator Kinerja Ke-13 : Skor Pola Pangan Harapan

Target kinerja “Skor Pola Pangan Harapan” tahun 2023 sebesar 90,2% dan realisasinya adalah 94,5 % atau capaian kinerja sebesar 104,77% (kinerja sangat tinggi). Pencapaian kinerja melebihi target.

14. Indikator Kinerja Ke-14 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” tahun 2023 sebesar 64,67% dan realisasinya berdasarkan data hasil perhitungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang didapatkan angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang sebesar 65,02 poin atau capaian kinerja sebesar 100,54% (kinerja sangat tinggi). Pencapaian kinerja telah melebihi target.

15. Indikator Kinerja Ke-15 : Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang

Target kinerja “Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang” tahun 2023 sebesar 30% dan realisasinya berdasarkan data penanaman modal dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang adalah 70,66 % atau capaian kinerja sebesar 235,24 % (kinerja sangat tinggi). Capaian kinerja melebihi target.

16. Indikator Kinerja Ke-16 : Nilai SAKIP Kabupaten

Target kinerja “Nilai SAKIP Kabupaten” tahun 2023 adalah “A” dan realisasinya adalah “BB” atau capaian kinerja sebesar 96,43% (kinerja tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

17. Indikator Kinerja Ke-17 : Opini BPK

Target kinerja “Opini BPK” tahun 2023 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan realisasinya berdasarkan data dari BPK adalah WTP atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

18. Indikator Kinerja Ke-18 : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” tahun 2023 sebesar 92 poin dan realisasinya berdasarkan data dari Bagian Organisasi adalah 88,51 poin atau capaian kinerja sebesar 96,20% (kinerja sangat tinggi). Target

kinerja tidak tercapai.

19. Indikator Kinerja Ke-19 : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Target kinerja “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” tahun 2023 sebesar 4.2 Poin dan realisasinya berdasarkan Hasil Evaluasi Tim SPBE Nasional adalah 4.14 poin atau capaian kinerja sebesar 98,57% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

20. Indikator Kinerja Ke-20 : Tingkat Pengangguran Terbuka

Target kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun 2023 sebesar 8,18-6,95 persen dan realisasinya berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik adalah 6,94 persen atau capaian kinerja sebesar 100,14% (kinerja sangat tinggi). Capaian kinerja melebihi target.

Dari hasil pengukuran 20 indikator kinerja utama, dapat diketahui kategori capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja 7 Indikator atau 35,00 Melampaui Target;
- Capaian kinerja 5 Indikator atau 25,00% Sesuai Target;
- Capaian kinerja 8 Indikator atau 40,00% Belum Mencapai Target.

A scenic view of a mountain valley with terraced tea fields and a wooden overlay. The background shows a vast landscape of rolling hills and valleys, with terraced tea fields in the foreground. The sky is hazy, and the overall atmosphere is serene. A wooden-textured overlay is positioned in the center, containing the text.

LEUWEUNG TIIS CAMP

Sumedang

DAFTAR ISI



	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Gambaran Umum Kabupaten Sumedang	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1 Perencanaan Strategis (RPJMD)	19
2.2 Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja	29
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	177
BAB IV PENUTUP	179
4.1 Kesimpulan	179
4.2 Perbaikan Kedepan	182
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut

menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

1.3 Gambaran Umum Kabupaten Sumedang

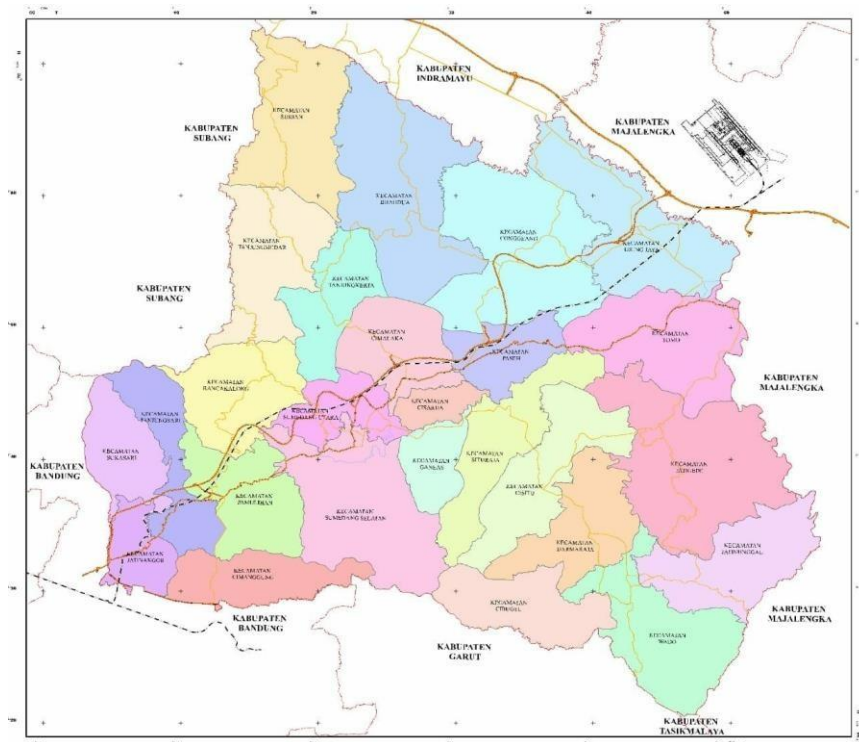
1.3.1 Kondisi Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat 06034'46,18"-7000'56,25" Lintang Selatan dan 107001'45,63"- 108012'59,04" Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Bandung;
- c) Sebelah Barat Kabupaten Bandung dan Subang;
- d) Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Tasikmalaya.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan laut dan yang tertinggi adalah puncak Gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Sumedang



Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038, luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 270 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Jatigede yaitu 11.392 Ha dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua yaitu 1.450 Ha. Di bawah ini tabel tentang luas wilayah per kecamatan dengan jumlah desa/kelurahannya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Per-Kecamatandi Kabupaten Sumedang

No	Kecamatan	Luas Wilayah(Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Wado	7.332	10	-
2	Jatinunggal	6.322	9	-
3	Darmaraja	5.413	12	-

4	Cibugel	5.004	7	-
5	Cisitu	6.410	10	-
6	Situraja	5.668	15	-
7	Conggeang	11.186	12	-
8	Paseh	3.387	10	-
9	Surian	7.630	9	-
10	Buahdua	11.156	14	-
11	Tanjungsari	4.325	12	-
12	Sukasari	3.904	7	-
13	Pamulihan	5.377	11	-
14	Cimanggung	4.305	11	-
15	Jatinangor	2.570	12	-
16	Rancakalong	5.605	10	-
17	Sumedang Selatan	9.675	10	4
18	Sumedang Utara	3.141	10	3
19	Ganeas	2.525	8	-
20	Tanjungkerta	4.399	12	-
21	Tanjungmedar	6.687	9	-
22	Cimalaka	4.763	14	-
23	Cisarua	1.452	7	-
24	Tomo	7.541	9	-
25	Ujungjaya	8.692	9	-
26	Jatigede	11.394	11	-
Jumlah		155.872	270	7

Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 mencapai 1.205.685 jiwa, terdiri dari 607.848 jiwa penduduk laki-laki dan 597.837 jiwa penduduk perempuan, sedangkan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 440.672 KK dan kepadatan penduduk 744 jiwa/km. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk
Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2023

NO.	KELOMPOK USIA	JUMLAH
1.	Usia 0 – 4 Tahun	81,128
2.	Usia 5 – 9 Tahun	93,843
3.	Usia 10 -14 Tahun	97,169
4.	Usia 15 – 19 Tahun	75,127
5.	Usia 20 – 24 Tahun	97,400
6.	Usia 25 – 29 Tahun	92,540
7.	Usia 30 – 34 Tahun	86,842
8.	Usia 35 – 39 Tahun	76,212
9.	Usia 40 – 44 Tahun	88,962
10.	Usia 45 – 49 Tahun	76,602
11.	Usia 50 – 54 Tahun	80,061
12.	Usia 55 – 59 Tahun	71,420
13.	Usia 60 – 64 Tahun	61,060
14.	Usia 65 – 69 Tahun	47,152
15.	Usia 70 – 74 Tahun	35,106
16.	Usia 75 Tahun Ke Atas	45,061
	Jumlah Total	1,205,685

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2023 (DKB Semester II Tahun 2023)

1.3.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Aparatur

Perangkat daerah Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan
 2. Dinas Kesehatan

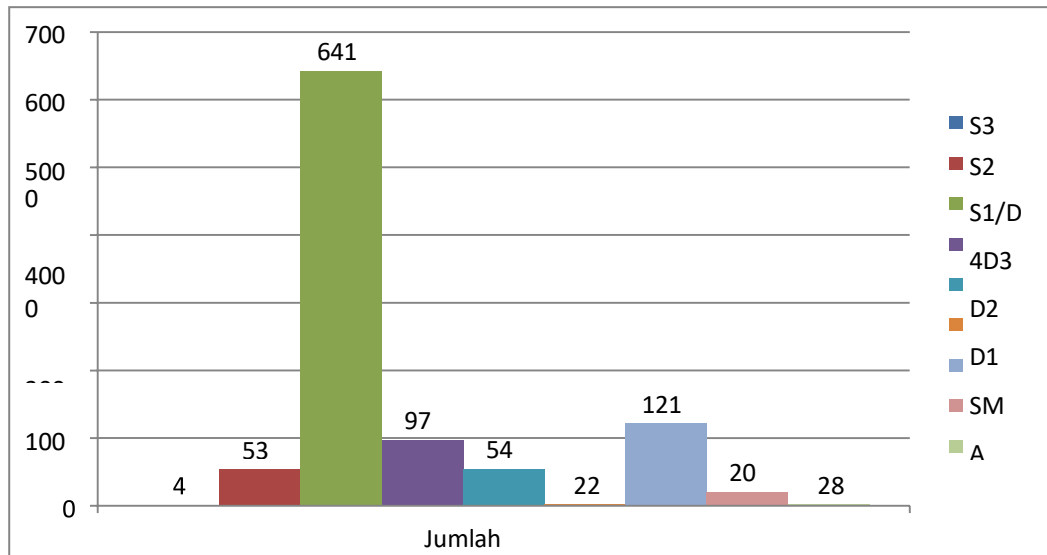
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 5. Satuan Polisi Pamong Praja
 6. Dinas Sosial
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 11. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak
 12. Dinas Perhubungan
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 16. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
 17. Dinas Arsip dan Perpustakaan
 18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 19. Dinas Perikanan dan Peternakan
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 5. Badan Penanggulangan Bencana
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

f. Kecamatan sebanyak 26 unit

Berkenaan dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

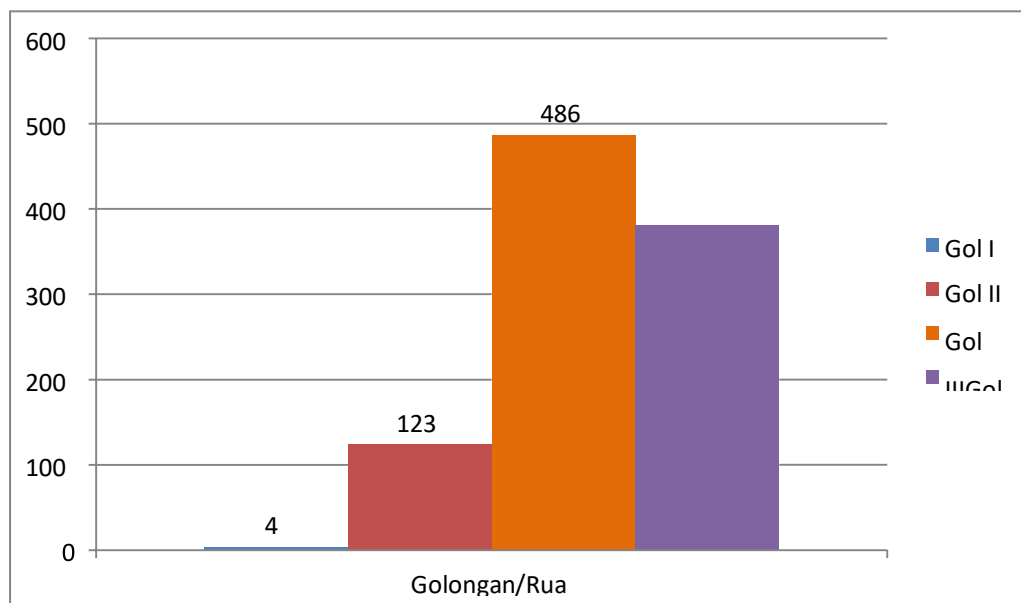
Berdasarkan data yang tersedia dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) komposisi PNS berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 1.1
Data PNS Kabupaten Sumedang Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2023



Sumber : BKPSDM Database Kepegawaian

Grafik 1.2
Data PNS Kabupaten Sumedang Berdasarkan Golongan
Tahun 2023



Sumber : BKPSDM Database Kepegawaian

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan yang paling nampak di Kabupaten Sumedang adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat baik pada angka kemiskinan yang belum menurun secara signifikan maupun masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mana rata-rata pertumbuhan angka

IPM Kabupaten Sumedang masih dibawah IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ini terkendala minimnya kualitas pelayanan dasar, baik dari sisi pelayanannya, infrastruktur dasar, infrastruktur pelayanan dan SDM-nya. Sedangkan rendahnya pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini diakibatkan oleh rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar tersebut. Secara umum dapat diidentifikasi permasalahan utama dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Sumedang yaitu masih tingginya angka kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran yang cukup tinggi, kualitas infrastruktur dasar yang masih rendah, masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia jika dibandingkan dengan angka IPM Nasional dan Jawa Barat, masih rendahnya struktur perekonomian wilayah karena masih rendahnya kontribusi sektor produktif terhadap PDRB, serta masih rendahnya efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Sumedang yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah, maka melalui berbagai kriteria yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, besaran luas atau dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap jalannya roda pembangunan daerah, kemungkinan dan kemudahan dalam pengelolaannya, serta prioritas janji politik yang perlu diwujudkan, dirumuskan isu strategis Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan

Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Kondisi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang masih belum merata apabila mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah. Kekurangan tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang adalah berupa penambahan: 97 dokter spesialis; 891 dokter umum; 64 dokter gigi; 463 bidan; 314 sanitarian; dan 522 ahli gizi. Demikian juga dengan fasilitas kesehatan, yang idealnya perlu menambah puskesmas dan rumah sakit, karena kelebihan beban pelayanan pada 17 (tujuh belas) Puskesmas dan rumah sakit masih kekurangan 548 tempat tidur. Pada Tahun 2020 masih terdapat Jumlah Kematian Ibu (21) dan Jumlah Kematian Bayi (137). Pemerintah Daerah mengharapkan kedua indikator tersebut bisa ditekan

sampai 0 kasus, Dalam konteks pembangunan Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan, BIJB (Bandar Udara Internasional Jawa Barat) dan Jalur Kereta Api Cepat, akan menjadikan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu poros pertumbuhan di Jawa Barat yang berpotensi menarik masyarakat untuk datang mencari kesempatan kerja di Sumedang. Hal tersebut harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan jumlah penduduk yang kian bertambah, sehingga potensi wabah penyakit dapat dihindari.

Pemerintah Kabupaten Sumedang juga perlu memfokuskan pada upaya pengendalian masalah gizi masyarakat, salah satunya adalah stunting. Kabupaten Sumedang termasuk salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki prevalensi cukup tinggi yaitu sebesar 17,5% pada Tahun 2020. Upaya intervensi gizi spesifik untuk balita pendek difokuskan pada kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak 0-23 bulan, karena penanggulangan balita pendek yang paling efektif dilakukan pada 1.000 HPK. Periode 1.000 HPK meliputi yang 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pertama setelah bayi yang dilahirkan telah dibuktikan secara ilmiah merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan. Oleh karena itu periode ini ada yang menyebutnya sebagai "periode emas", "periode kritis", atau yang dikenal sebagai "*window of opportunity*". Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode tersebut, dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi. Perlu ada langkah terobosan yang tidak hanya fokus pada upaya pengobatan, tetapi fokus pada upaya preventif (pencegahan) dan promotif berbasis siklus kehidupan manusia (*Continuum of Care*) melalui pendekatan keluarga.

2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Pendidikan

Kebijakan-Kebijakan yang dibuat pada sektor pendidikan sepenuhnya bergantung pada basis data yang ada. Jika basis data lemah, maka sulit

diharapkan sektor pendidikan dapat maju. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mengoptimalkan pengelolaan manajemen data pendidikan terutama akses terhadap data pendidikan yang sudah tersedia. Dalam menghadapi tantangan di era industri 4.0 serta dalam mempersiapkan bonus demografi (proporsi populasi penduduk usia muda lebih besar) perlu memperhatikan akses pendidikan berkualitas yang mampu menjangkau seluruh kalangan, baik kaum disabilitas maupun yang sudah mencapai usia non sekolah, namun belum mengenyam pendidikan secara baik (belum lulus pendidikan dasar). Karena jika pada saatnya bonus demografi terjadi sementara tingkat pendidikan penduduk masih rendah, maka ancaman yang berpotensi terjadi adalah middle trap income, dimana penduduk usia muda terjebak dalam penghasilan/upah rendah sehingga harapan adanya peluang penduduk usia muda dalam meningkatkan produktivitas dan kemajuan ekonomi khususnya di Kabupaten Sumedang sulit tercapai. Ancaman selanjutnya adalah posisi lapangan kerja strategis yang menghasilkan pendapatan tinggi berpotensi diisi oleh tenaga kerja asing.

Berdasarkan data BPS, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 adalah 8,51 Tahun atau hanya mencapai tingkat pendidikan menengah pertama (SMP). Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana sekolah masih minim, terutama ketersediaan Laboratorium IPA, laboratorium matematika, laboratorium Bahasa, laboratorium Komputer, perpustakaan, dan ruang UKS. Adapun kapasitas daya tampung serta kelengkapan sarana sekolah harus memenuhi 8 standar manajemen yang terdiri atas (1) manajemen risiko, (2) manajemen SDM TIK, (3) manajemen data TIK, (4) manajemen pengetahuan, (5) manajemen perubahan, (6) manajemen asset, (7) manajemen layanan dan (8) manajemen system pengendalian internal.

Jika mengamati kondisi pendidikan dasar (SD-SMP) di Kabupaten Sumedang sebagaimana penjelasan paragraf di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu serius dalam mempertahankan angka kelulusan siswa-siswi SD-SMP dan perlu mendorong peningkatan angka melanjutkan siswa-siswi dari SD ke SMP serta SMP ke SMA/SMK harus optimal. Meskipun saat ini kewenangan pelayanan pendidikan jenjang menengah atas (SMA) berada di Provinsi, namun tetap perlu ditingkatkan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat agar pelayanan jenjang sekolah menengah atas harus dapat menciptakan lulusan yang memiliki

keterampilan kerja, sehingga pengembangan kualitas dan kuantitas sekolah vokasional/SMK (kejuruan) dengan bidang yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan perekonomian Kabupaten Sumedang menjadi hal utama. Lebih lanjut, dengan banyaknya perguruan tinggi negeri yang berstandar internasional menjadikan Kabupaten Sumedang memiliki keunggulan kompetitif yang perlu dijadikan pendorong dalam meningkatkan kemajuan pembangunan di segala bidang. Dalam hal ini perlu upaya peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Sumedang untuk membantu pemecahan persoalan-persoalan pembangunan di Kabupaten Sumedang dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai penjabaran program unggulan Sumedang Agamis, Kabupaten Sumedang mencanangkan program siswa bersertifikat diniyah. Setiap siswa lulusan SD dan SMP diharapkan mempunyai sertifikat Pendidikan Diniyah, dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan untuk membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al Quran kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa, beramal shaleh dan berakhlak mulia.

3. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Publik

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu penunjang roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam sistem pelayanan masyarakat keberadaan infrastruktur yang memadai dan penataan ruang yang baik sangat diperlukan. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Namun demikian, keberadaan data dan informasi terkait infrastruktur publik dan penataan ruang di Kabupaten Sumedang masih sangat terbatas, sementara itu pembuatan kebijakan pembangunan memerlukan basis data yang akurat sebagai payung pertanggungjawaban kinerja dari suatu kebijakan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mengoptimalkan pengelolaan manajemen data sektor infrastruktur publik dan penatan ruang sehingga menghasilkan data dan informasi yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 hanya 76,96% dalam kondisi baik (>40 Km/Jam). Hal ini berarti belum meratanya aksesibilitas masyarakat dalam penggunaan infrastruktur jalan yang baik. Selanjutnya jalan yang dilengkapi dengan

penerangan jalan umum (PJU) mengalami pengurangan selama Tahun 2015-2019, untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas perlu penambahan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan. Lebih lanjut Kabupaten Sumedang belum memiliki terminal yang memadai sehingga berdampak pada terhambatnya mobilitas warga. Untuk mendukung adanya sistem transportasi yang baik Kabupaten Sumedang perlu menyusun analisa tatanan transportasi lokal yang sesuai dengan kondisi saat ini, analisa tersebut mencakup manajemen rekayasa lalu lintas, kapasitas ruas jalan, dan analisa trayek angkutan umum. Untuk infrastruktur tempat pembuangan sampah selama periode 2015-2020, penambahannya tidak sebanding dengan produksi sampah itu sendiri, sehingga perlu peninjauan kondisi pembuangan sampah lebih lanjut agar tempat pembuangan sampah dapat menampung sampah dengan baik. Hal ini menjadi penting karena dapat menjadi faktor yang menimbulkan permasalahan sistemik, yakni terganggunya kesehatan masyarakat dan keindahan dan kerapihan kota.

4. Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengurangan Ketimpangan Ekonomi

Pembangunan daerah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep konsep *pro poor*, *pro job*, *pro growth*, dan *pro environment* dengan memperhatikan *community empowerment*.

Berdasarkan data BPS laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 sebesar minus 1,12%, namun demikian angka ini masih diatas rata-rata laju pertumbuhan provinsi. Kondisi ini seiring dengan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan sebagaimana diukur oleh Indeks Gini yang menunjukkan kenaikan 0,04 poin dari 0,34 di Tahun 2019 menjadi 0,38 di Tahun 2020. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami fluktuasi, pada Tahun 2017 tercatat 62,06% kemudian menurun menjadi 61,93% di Tahun 2018, dan meningkat menjadi 68,96% pada Tahun 2020. Dengan kata lain dari 100 orang usia produktif (15-54 Tahun) hanya terdapat 69 orang memasuki pasar lapangan kerja di Tahun 2020.

Dalam rangka meningkatkan serapan tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan serta menciptakan kemandirian masyarakat, idealnya dapat dengan cara mendorong masyarakat untuk berwiraswasta, Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan peran koperasi dan pembinaan usaha mikro dan kecil baik yang baru maupun yang sudah berjalan. Kedua hal tersebut menyimpan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Kondisi koperasi aktif di Kabupaten Sumedang mengalami sedikit peningkatan, dari 72,93% di Tahun 2018 menjadi 77,41% di Tahun 2019. Namun karena pandemi Covid-19, pada Tahun 2020 kondisi koperasi aktif mengalami penurunan yang signifikan menjadi 38,39%.

Dalam perspektif kedepan Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menghidupkan wirausaha baru baik formal maupun informal. Karena jika hanya bertumpu pada lapangan pekerjaan formal yang disediakan perusahaan, lapangan kerja yang tersedia lebih didominasi level buruh. Dengan adanya program unggulan Sumedang Preneurship. Diharapkan tumbuh UMKM baru serta bertahannya UMKM yang sudah berjalan. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terdapat peluang untuk mengembangkan sektor pertanian karena permintaan hasil pertanian dari pasar lokal dan regional cukup besar. Adapun hambatan dalam hal ini muncul dari penerapan teknologi produksi yang relatif rendah, keterbatasan modal dan keterampilan tenaga kerja, sempitnya kepemilikan lahan, fluktuasi harga, sistem tata niaga hasil pertanian yang relatif panjang dan serangan organisme pengganggu tanaman. Sedangkan ancaman adalah berupa masuknya produk pertanian dari luar Sumedang dan luar negeri. Adapun strategi untuk mendukung pengembangan sektor pertanian adalah mendorong agribisnis komoditas unggulan dengan meningkatkan skala produksi secara intensifikasi dan efisiensi alokasi input, pembentukan kelompok-kelompok usaha, meningkatkan pangsa pasar dengan cara pengembangan produk dan penetrasi pasar, kerjasama dengan lembaga keuangan, investor, dan sumber pembiayaan lainnya guna menunjang modal, menerapkan dan mengembangkan teknologi serta kerjasama dengan lembaga penelitian dalam pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas sektor pertanian. Dalam perspektif kedepan, strategi yang perlu digarisbawahi adalah meningkatkan penggunaan teknologi pertanian serta meningkatkan pangsa pasar dengan

cara pengembangan produk, sehingga perlu upaya mendorong berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian sehingga dapat memberikan *value added* pada komoditas pertanian di Kabupaten Sumedang. Dalam hal pemasaran produk-produk hasil pertanian, harus mulai memanfaatkan Teknologi Informatika dan Komunikasi. Hal tersebut adalah kondisi yang tidak dapat dihindari pada masa adaptasi kebiasaan baru semenjak terjadinya Pandemi Covid-19.

5. Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah

Sektor kebudayaan dan pariwisata harus dipandang sebagai sektor yang berfungsi menjadi katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Adanya Megaproyek pembangunan (Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan, dan Bandar Udara Internasional Jawa Barat, serta Jalur Kereta Api Cepat) menjadikan posisi Kabupaten Sumedang sangat strategis, sehingga sektor kebudayaan dan pariwisata perlu dikembangkan.

Adapun kondisi sektor kebudayaan dan pariwisata saat ini belum mampu secara optimal dalam memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat. Hal ini diketahui dari (1) masih kurangnya ragam dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya sebagai upaya pelestarian dan promosi budaya serta menghidupkan perekonomian daerah; (2) masih minimnya pelestarian terhadap situs sejarah dan kawasan cagar budaya; (3) sarana prasarana pengembangan kesenian dan budaya tidak memadai; dan (4) pengembangan destinasi wisata masih sangat kurang. Dalam perspektif kedepan sektor pariwisata perlu diarahkan untuk pengembangan agrowisata, wisata budaya, wisata alam dan wisata kuliner yang bertemakan pariwisata halal. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan penataan infrastruktur, penyiapan SDM kreatif, mengundang investor untuk berinvestasi dan promosi terkait pariwisata. Hal ini perlu mendapat dukungan baik secara politis maupun teknokratis dari Pemerintah Kabupaten Sumedang.

6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural dan etika birokrasi. Terdapat tiga elemen utama yang melekat pada reformasi birokrasi yaitu, *pertama* reformasi keuangan daerah yang

berfokus pada mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, hal ini menuntun pada penyempurnaan proses kerja pemerintahan dalam hal penetapan tenggat waktu, indikator serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah, yakni berkaitan dengan kualitas implementasi dari sebuah program kerja dan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumberdaya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik yakni kondisi pelayanan yang baik sebagai hasil dari reformasi keuangan dan sumberdaya aparatur.

Beberapa indikator untuk menilai kondisi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang telah menunjukkan capaian yang baik, antara lain opini BPK selama tujuh tahun berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan nilai LPPD Tahun 2020 yang masuk dalam kategori tinggi. Kemudian skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 berada pada kategori BB. Namun demikian, masih banyak yang perlu diperbaiki pada delapan area reformasi birokrasi.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan kerjasama yang sangat terorganisir dan efektif antar komponen internal Pemerintah Kabupaten Sumedang beserta komponen *stakeholder* eksternal. Selain itu, upaya penguatan mutu aparatur daerah harus terus dilakukan, sehingga dapat terbentuk aparatur yang profesional melayani masyarakat. Melalui tata kelola pemerintahan yang tepat (ketepatan anggaran, profil aparat yang tepat, konfigurasi struktur birokrasi yang tepat) maka pelayanan yang ideal kepada masyarakat di Kabupaten Sumedang dapat diwujudkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan.

7. Isu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Antisipasi Bencana

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri atas dari 3 (tiga) komponen pengukuran, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Berdasarkan publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kabupaten Sumedang memiliki indeks risiko bencana dengan skor 162 yang masuk dalam kategori tinggi. Dapat dipetakan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang memiliki potensi bencana alam antara lain potensi gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung dan potensi

gempa bumi, terutama di Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Tomo dan Ujungjaya. Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, tidak memberikan izin IMB pada daerah rawan bencana dan pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, serta kesiap-siagaan masyarakat.

Sebagai upaya mengurangi penyebaran Covid-19, sejak awal Pandemi Covid-19 pada awal Tahun 2020, Pemerintah mengharuskan sebagian besar masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah. Kondisi ini, secara tidak langsung memberikah efek positif terhadap kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sumedang. Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara meningkat secara signifikan. Namun demikian, terjadi juga peningkatan sampah rumah tangga karena semakin banyak aktivitas yang menggunakan kemasan sekali pakai dalam konsumsi makanan untuk mencegah penularan virus.

Berdasarkan kondisi di atas, maka diperlukan upaya untuk penanganan dan pengurangan sampah serta peningkatan indeks kualitas tutupan lahan sebagai salah satu upaya antisipasi bencana.

8. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman termasuk urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Namun keberadaan data dan informasi terkait Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sumedang masih sangat terbatas, sementara itu pembuatan kebijakan pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memerlukan basis data yang akurat sebagai payung pertanggungjawaban kinerja dari suatu kebijakan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mengoptimalkan pengelolaan manajemen data sektor. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sehingga menghasilkan data dan informasi yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun kondisi kinerja urusan perumahan rakyat dan permukiman yang telah menunjukkan capaian yang baik adalah rasio rumah layak huni yang pada Tahun 2020 telah mencapai 80,34%. Namun demikian, indikator lainnya menunjukkan capaian yang belum mencapai target, antara lain

luas permukiman kumuh yang pada Tahun 2020 tidak memiliki aktivitas karena kurangnya pendanaan, kemudian rumah tangga ber-sanitasi data terakhir Tahun 2020 masih 55,29%.

9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Responsif Gender merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan mempertimbangkan 4 (empat) aspek yaitu peran, akses, manfaat dan partisipasi yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Pada Perangkat Daerah, penerapan kebijakan responsif gender masih pada angka 48,39% pada Tahun 2019, serta kebijakan yang dihasilkan masih rendah, yaitu hanya mengeluarkan 3 kebijakan/perda/perbup pada tahun tersebut.

Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih terjadi. Terdapat 24 kasus pada Tahun 2019, yang terdiri atas kasus kekerasan, pencabulan, penelantaran, eksploitasi anak serta pemerkosaan.

Kabupaten Sumedang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak. Dengan demikian, Kabupaten Sumedang siap menjalani komitmen untuk mengarahkan pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.

Indikator pembangunan untuk melihat pemenuhan hak anak dapat dilihat dari upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak anak dengan kategori Madya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dancitra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SUMEDANG SIMPATI) pada Tahun 2023”.

2.1.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi, misi dan isu strategis yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya ditetapkan tujuan dan sasaran setiap misi yang akan

dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Secara umum keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam matrik hubungan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Sumedang

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, profesional, dan Kreatif (SUMEDANG SIMPATI) Pada Tahun 2023						
Misi	Tujuan		Sasaran			
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		
Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)		
			Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)	
				Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Angka Harapan lama sekolah (HLS)	
					Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin
						Indeks Pembangunan Gender
Menguatnya Norma Agama Dalam Tatahan Kehidupan Sosial Masyarakat dan Pemerintahan	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks kerukunan umat beragama	Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	Indeks Pemberdayaan Gender		
				Indeks kerukunan umat beragama		
Mengembangkan Wilayah ekonomi Didukung dengan Peningkatan Infrastruktur, Serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan		
		Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		

			Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian	Indeks Kualitas Infrastruktur
			Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang
Menata irokrasi Pemerintah Yang Responsif dan Bertanggung Jawab Secara Profesional Dalam Pelayanan Masyarakat	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Kabupaten Opini BPK
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Mengembangkan Sarana Prasarana dan Sistem Perekonomian Yang Mendukung Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Kabupaten Sumedang	Terwujudnya Perekonomian Sumedang yang Kreatif dan Berdaya Saing	PDRB per Kapita	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber : Tabel 5.2 RPJMD

2.1.4 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Kabupaten Sumedang untuk periode pembangunan 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi.
5. Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan.
6. Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata.
7. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah melalui pengembangan teknologi informasi dan artificial intelligence.
8. Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil melalui digitalisasi dan kolaborasi antar generasi.
9. Memperkuat Ketahanan Pangan Daerah.
10. Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang.
11. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

2.1.5 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Meningkatkan layanan Kesehatan sampai ke tingkat desa
		Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya Kesehatan promotif dan preventif
		Meningkatkan sarana prasarana dan inovasi dalam pelayanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat
2.	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan rumah besar penanganan fakir miskin/ lansia
		Meningkatkan pemenuhan perumahan dan pemukiman layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin
3.	Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Mewujudkan nilai-nilai Agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan.
		Mendorong pengembangan pendidikan karakter
4	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi	Meningkatkan kemantapan jalan Sebagai koneksitas dan aksesibilitas aktivitas perekonomian masyarakat
		Meningkatkan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi
		Meningkatkan infratraktur, sarana, prasarana dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan
5	Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan	Meningkatkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam
		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas lingkungan perumahan/permukiman yang berkelanjutan
		Mengurangi risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim
6	Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata	Meningkatkan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan local
		Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang

		tercatat pada kalender tahunan <i>event visit wonderful Indonesia</i>
7	Peningkatan kinerja aparatur pemerintah melalui penggunaan teknologi informasi dan <i>artificial intelligence</i>	<p>Meningkatkan pelayanan administrasi dan perizinan yang Prima</p> <p>Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika</p> <p>Menguatkan institusi pemerintahan dan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi</p> <p>Mengembangkan sistem <i>e-government</i> untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public</p>
8	Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil melalui digitalisasi dan kolaborasi antar generasi	<p>Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah</p> <p>Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitalisasi pasar tradisional</p> <p>Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat</p>
9	Memperkuat ketahanan pangan Daerah	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam
10	Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang	Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan
11	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	<p>Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja</p> <p>Membangun Sumedang <i>Preneurship</i> berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda</p> <p>Mengoptimalikan pengembangan sektor ekonomi kreatif</p>

2.1.6 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasan Program dengan Indikator
Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah. 2. Angka harapan lama sekolah.	5. Program Pengelolaan Pendidikan.
Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penduduk miskin	6. Program Pemberdayaan Sosial 7. Program Rehabilitasi Sosial 8. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 9. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 10. Program Pengembangan Perumahan
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan Gender 2. Gender Indeks Pemberdayaan Gender	11. Program Perlindungan Perempuan 12. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 13. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 14. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 15. Program Perlindungan Khusus Anak 16. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Menguatnya kondisike hidupan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	17. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 18. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 19. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 20. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 21. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 22. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	23. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 24. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 25. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui engembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 27. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 28. Program Perizinan Usaha Pertanian 29. Program Penyuluhan Pertanian 30. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 31. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

		32. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33. Program Pengembangan Kebudayaan 34. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 35. Program Pembinaan Sejarah 36. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 37. Program Pengelolaan Permuseuman 38. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 39. Program Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian	Indeks Kualitas Infrastruktur	40. Program Penyelenggaraan Jalan 41. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 42. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 43. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	44. Program Penanggulangan Bencana 45. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 46. Program Penanganan Bencana
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	47. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 48. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 49. Program Penanganan Kerawanan Pangan 50. Program Pengawasan Keamanan Pangan 51. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 53. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 54. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 55. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 56. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 57. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 58. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 59. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 60. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	61. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 62. Program Promosi Penanaman Modal
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Nilai SAKIP Kabupaten 2. Opini BPK	63. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 64. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 65. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

		66. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 67. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 68. Program Penyelenggaraan Pengawasan 69. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	70. Program Kepegawaian Daerah 71. Program Pendaftaran Penduduk 72. Program Pencatatan Sipil 73. Program Pelayanan Penanaman Modal 74. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 75. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 76. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 77. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 78. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	79. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 80. Program Aplikasi Informatika 81. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	82. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 83. Program Penempatan Tenaga Kerja 84. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 85. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 86. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 87. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 88. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 89. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 90. Program Pengembangan UMKM 91. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 92. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Sumber : RPJMD Perubahan

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Persen	72.70-73.20
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Rata-rata lama sekolah.	Tahun	8.81-9.00
	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13.05-13.12
Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penduduk miskin	Persen	9,70-7,56
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	96,75
	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	71,37
Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	74,5
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	4.15 - 6.40
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui engembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	3.76-5.59
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	8.77-10.27
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	77,65
Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,52
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	90,2
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	71,8
Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persen	30
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A
	Opini BPK	Opini	WTP
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	92
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	4,2
Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8.18-6.95

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

- b. Tingkat Realisasi Negatif
- c. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

- d. Rumus Capaian Realisasi Positif dengan menggunakan Target Nilai Antara

Apabila realisasi berada pada target nilai antara terkecil dengan terbesar maka capaian kinerja dinyatakan tercapai (100%). Dan apabila di ketahui semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik dengan realisasi berada di bawah nilai antara terendah, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target\ Antara\ Terkecil} \times 100\%$$

- e. Rumus Capaian Realisasi Negatif dengan Target Nilai Antara

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja dan apabila realisasi berada di atas nilai antara tertinggi maka pembagiannya memakai target nilai antara terbesar.

$$Capaian = \frac{Target\ nilai\ antara\ tertinggi - (Realisasi - Target\ nilai\ antara\ tertinggi)}{Target\ nilai\ antara\ tertinggi} \times 100\%$$

Dan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

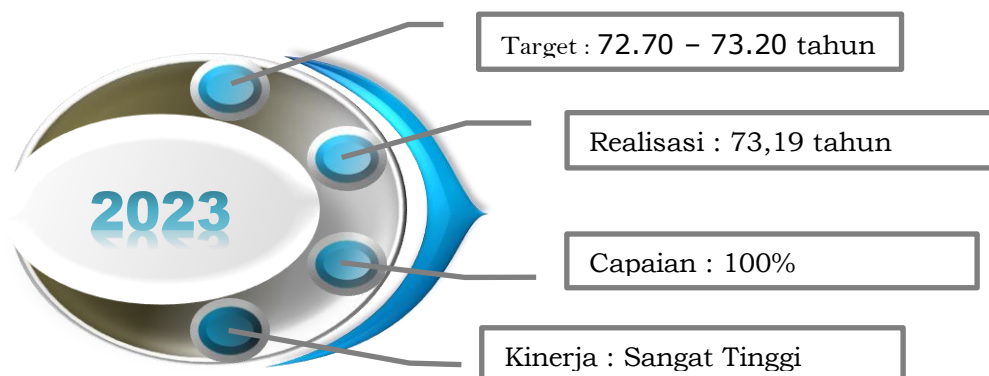
1) ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Gambar 3.1



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Angka Harapan Hidup tahun 2023 meningkat sebesar 0.28 tahun dari realisasi pada tahun 2022 dengan capaian kinerja 100,12%, berikut tabel perbandingan dengan tahun 2023 :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,65 s.d 72,82	72,91	100,35%	72.70 s.d 73.20	73.19	100%	Realisasi kinerja meningkat dan capaian kinerja tercapai

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah AHH adalah 72.70 - 73.20 tahun dan realisasi pada tahun 2023 adalah 73.19 tahun, sehingga capaian kinerja jangka menengah untuk AHH pada tahun akhir RPJMD 2018-2023 Perubahan adalah 100%.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

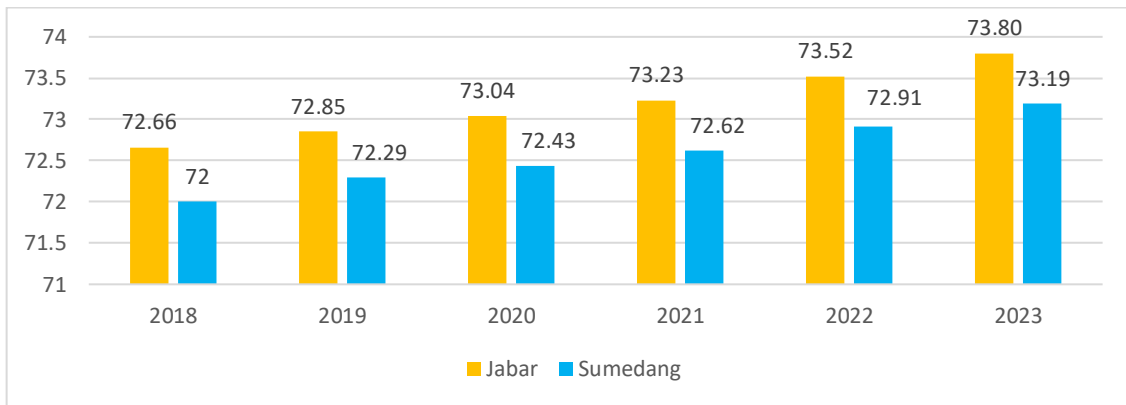
Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Tahun 2023	Capaian Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2023
Angka Harapan Hidup	72.70 – 73.20 tahun	73,19 tahun	100%

Sumber : BPS dan RPJMD (diolah)

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sumedang memperlihatkan tren meningkat dari tahun 2018 sampai 2023, walaupun selalu berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Grafik 3.1
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumedang Dengan
Provinsi Jawa Barat

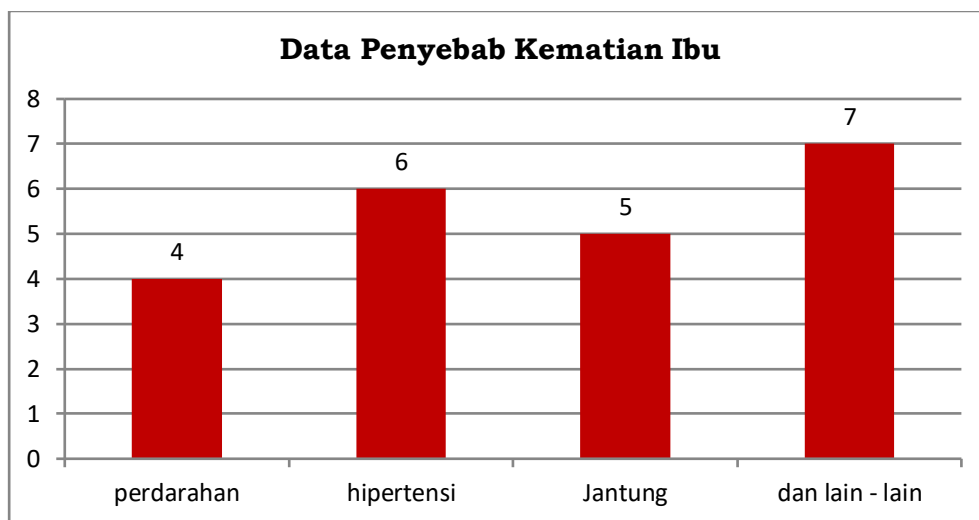


Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Angka harapan hidup dipengaruhi oleh jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Dimana pada tahun 2023 jumlah kematian ibu sebanyak 22 kasus kematian dari total 16.166 kelahiran hidup dengan rasio 136/100.000 kelahiran hidup dari target rasio sebesar 95/100.000 kelahiran hidup. Adapun penyebab dari kasus kematian ibu, diantaranya :

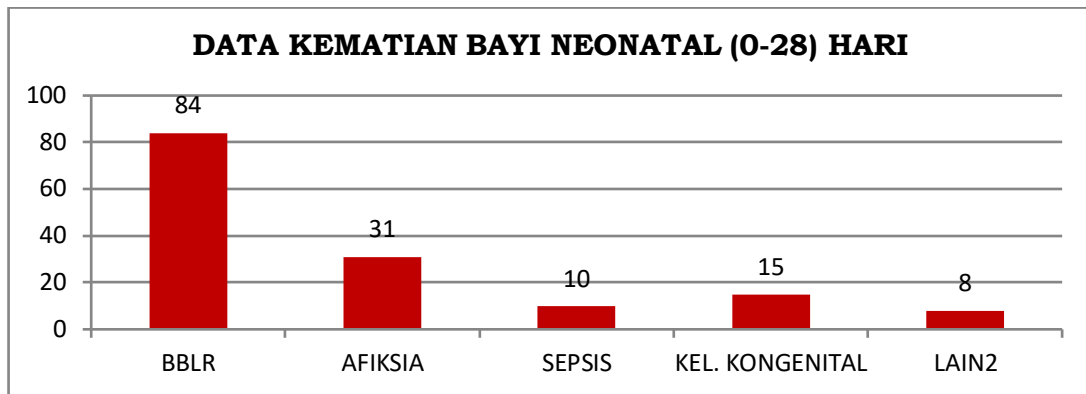
Grafik 3.2



Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan (diolah)

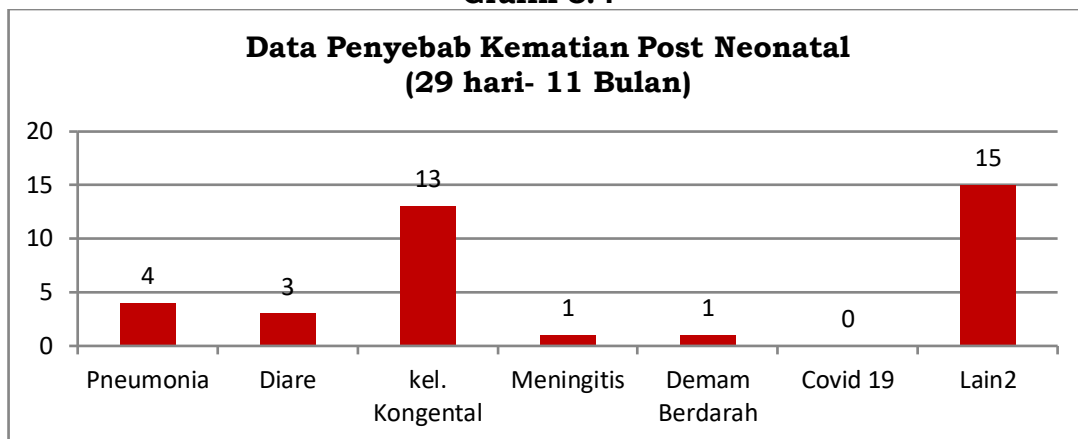
Sementara untuk kasus kematian bayi pada tahun 2023 sebanyak 185 kasus dari 16.166 kelahiran hidup dengan rasio 11/1.000 kelahiran hidup dari target 16/1.000 kelahiran hidup. Penyebab kasus kematian bayi, antara lain :

Grafik 3.3



Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan (diolah)

Grafik 3.4



Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan (diolah)

Dari faktor-faktor penyebab tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang mengambil langkah-langkah sebagai solusi pecegahan sekaligus upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi antara lain :

1. Dilakukan peningkatan pelayanan PONED dengan kunjungan Dokter Spesialist Kebidanan ke Puskesmas Poned. Untuk peningkatan kesehatan Ibu dan Anak dengan layanan yang khusus dan terfocus, pendampingan dokter spesialis dan dapat membantu meningkatkan kesehatan ibu hamil, ibu pasca persalinan , bayi dan anak. Pendampingan dokter spesialis memungkinkan deteksi dini masalah kesehatan kandungan dan anak, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat, meningkatkan peluang kesembuhan atau perbaikan kondisi;
2. Skrining layak hamil bagi PUS

Untuk memastikan calon ibu yang sedang hamil berada dalam kondisi optimal sebelum kehamilan dimulai,lanjutnya. Selain itu

skrining merupakan proses pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah pada individu yang mungkin beresiko, melaksanakan strategi dalam penyelamatan ibu dan bayi pada masa sebelum hamil, kehamilan, bayi baru lahir dan masa paska persalinan dengan memberikan edukasi gizi dan kesehatan reproduksi bagi remaja putri dan PUS tentang perencanaan kehamilan sehingga persalinannya sehat dan selamat serta memperoleh bayi yang sehat. langkah khusus yang perlu dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum, imunisasi, pemeriksaan penyakit menular seksual (PMS), pemeriksaan genetik, pengelolaan penyakit kronis, tes golongan darah dan HIV, tes hepatitis B dan C, dan konseling prakehamilan. Semua langkah ini dilakukan per trimester selama kehamilan yakni tiga bulan pertama, tiga bulan kedua dan tiga bulan terakhir kehamilan.

Tes skrining kehamilan trimester pertama meliputi; USG, tes darah awal dan pengambilan chorionic villus sampling. Skrining kehamilan trimester kedua meliputi; skrining glukosa dan amniosentesis. Sedangkan skrining trimester ketiga untuk mencairitahu jenis bakteri (*streptococcus* grup B – GSB) yang dapat menyebabkan infeksi serius pada ibu hamil dan bayinya;

3. Pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin

Upaya penurunan AKI dan AKB masih menjadi perhatian penting pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berbagai intervensi telah dilakukan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, kelompok yang diperhatikan kesehatan reproduksinya adalah Calon Pengantin (catin). Melalui pelayanan pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi catin, maka kita dapat memastikan kesehatan calon pasangan pengantin baik secara fisik dan mental. Dengan demikian kita menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi;

4. Melakukan audit kematian ibu dan bayi secara rutin setiap 3 bulan sekali.

Audit Maternal Perinatal (AMP) adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta

penatalaksanaannya, dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terdekat, untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA disuatu wilayah, Audit Maternal Perinatal (AMP) merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pengkajian dan pembahasan kasus kesakitan, kematian ibu dan perinatal sebagai upaya pembelajaran bersama dalam menyikapi kasus kematian yang telah terjadi sehingga ditemui cara penanganan yang lebih baik dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi dan Balita (AKB) dimasa yang akan datang. Audit Maternal Perinatal (AMP) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dalam AMP ini ditelusuri juga berbagai hal yang sering menjadi penyebab meningkatnya AKI. Penyakit jantung menempati posisi kedua setelah perdarahan sebagai penyebab terjadinya kematian ibu saat persalinan;

5. Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan

Dalam upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan. peningkatan kemampuan serta keterampilan dan keahlian para bidan sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan kesehatan, terutama mampu mengurangi angka kematian ibu dan bayi;

6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan baik di Puskesmas PONEB maupun Non PONEB

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONEB) adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu dalam masa nifas dengan komplikasi obstetri yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya. PONEB merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Puskesmas PONEB adalah puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONEB siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas serta kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader di masyarakat, Bidan di

Desa, Puskesmas dan melakukan rujukan ke RS/RS PONEK pada kasus yang tidak mampu ditangani.

7. Layad rawat PSC 119

Program Layad Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang merupakan platform layanan kesehatan di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Tim layad sebagai tim pertolongan pertama pra rujukan yang terjadi pada permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh berbagai masalah seperti akibat bencana, kecelakaan kerja, kebakaran serta kecelakaan lalu lintas dan masalah kesehatan lainnya dan bekerja sama dengan tempat pelayanan kesehatan darurat yang sesuai, secara bertahap dan berjenjang. Selain untuk pelayanan kesehatan yang sifatnya insidental, PSC 119 Layad Rawat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memberikan pelayanan kesehatan secara terencana bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan kesehatan masyarakat dan layanan konsultasi permasalahan kesehatan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja AHH tahun 2023 adalah sebesar Rp. 101,289,537,758.00 yang terdiri dari 4 program. Sedangkan realisasinya adalah Rp. 98,635,563,945.00 dengan capaian realisasi anggaran 97,38% seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	98.196.158.758,00	95.632.572.207,00	97,39
Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	1.597.013.000.00	1.574.350.000,00	98,58
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	125.000.000,00	118.426.938,00	94,74
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.371.366.000,00	1.310.214.800,00	94.54
JUMLAH	101,289,537,758.00	98,635,563,945.00	97,38

Sumber : Dokumen LRA Dinas Kesehatan (diolah)

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Angka Harapan Hidup tahun 2023 sebesar 2,62%.

Tabel 3.5
Tingkat Efisiensi Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	100%	97,38 %	2,62 %	Efisien

g. Analisis program/kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Program yang mendukung langsung pencapaian target indikator kinerja Angka Harapan Hidup, yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

Indikator Kinerja Program : Cakupan Fasilitas pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar dengan target kinerja 100% terealisasi sebesar 100% capaian kinerja 100%.

Pelaksanaan program ini meliputi :

- a. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.
- b. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.

2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

Indikator Kinerja Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan adalah

1. Persentase sarana kesehatan yang terakreditasi, dengan target 100% realisasi kinerja 100%,
2. Persentase Tenaga Kesehatan yang Tersertifikasi dengan target 100% realisasi kinerja 74%.

Pelaksanaan program ini meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM wilayah Kabupaten/Kota, target kinerja 100%, realisasi kinerja kegiatan 100%, capaian kinerja 100%. kegiatan ini tercapai.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Indikator Kinerja Program :

- a. Persentase ketersediaan farmasi, reagen dan perbekalan kesehatan, dengan target 100% realisasi kinerja 100% capaian kinerja 100%,
- b. Persentase Ketersediaan Alkes, dengan target 90% realisasi kinerja 90% capaian kinerja 100%.

Pelaksanaan program ini meliputi :

Kegiatan Pemberian izin Apotek , toko obat, toko alat kesehatan dan optikal , usaha mikro obat tradisional (UMOT) indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah perizinan yang dilakukan tindak lanjut pengendalian dan pengawasan, dengan target 120 Rekomendasi realisasi 120 Rekomendasi/capaian kinerja 100%.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan adalah :

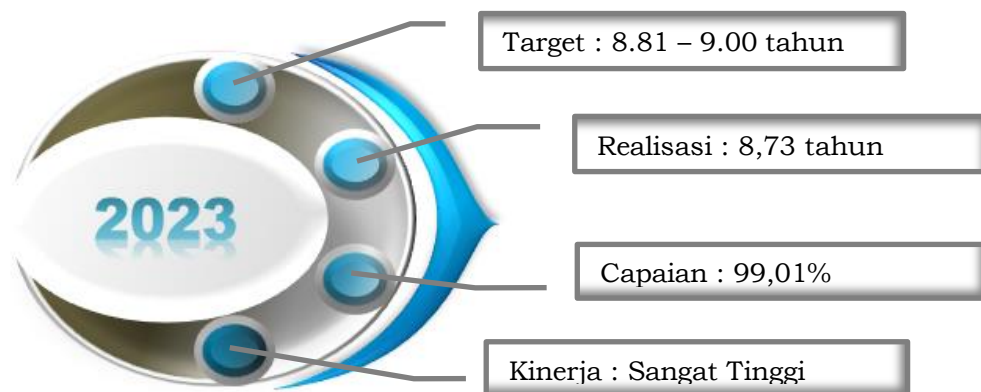
- a. Jumlah sampel makanan yang diperiksa, dengan target 12 dokumen, realisasi 12 Dokumen, capaian kinerja 100%.dan
- b. Jumlah laporan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat dengan capaian kinerja 5 dokumen, realisasi 5 dokumen, capaian kinerja 100%.

2) RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Gambar 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

Target indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023 sebesar 8,81-9.00 tahun, dan realisasinya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sebesar 8,73 tahun atau capaian kinerja sebesar 99,01%, kriteria kinerja sangat tinggi.

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Rata-rata lama sekolah meningkat dari tahun sebelumnya, walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2022 RLS sebesar 8,72 tahun sehingga pada tahun 2023 terdapat peningkatan 0,01 tahun.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.58 s.d 8.80	8.72	100%	8.81 s.d 9.00	8,73	99,01%	Realisasi kinerja meningkat dan Capaian Kinerja tidak tercapai

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Di dalam RPJMD 2018-2023 perubahan, target jangka menengah RLS adalah 8.81-9.00 tahun dan realisasi pada tahun 2023 adalah 8.73 tahun, sehingga capaian kinerja jangka menengah untuk RLS pada tahun terakhir RPJMD adalah 96.01%.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

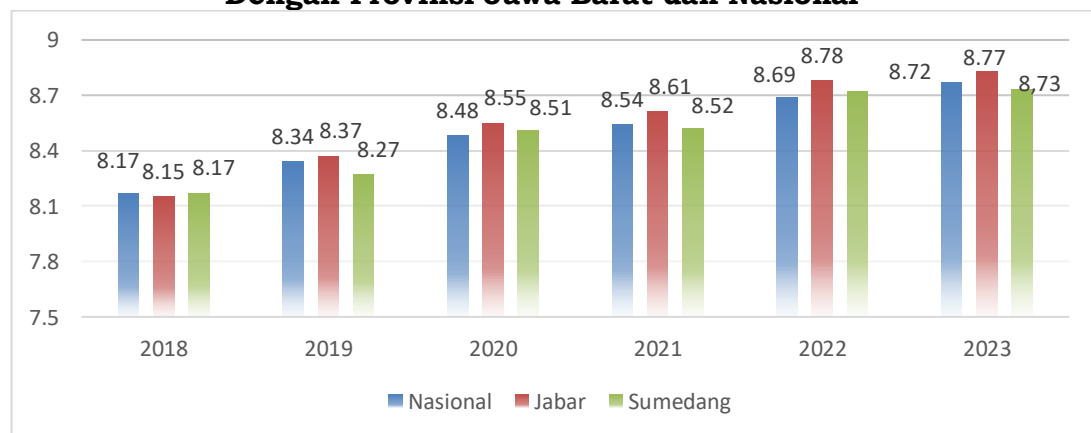
Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023
Rata-Rata Lama Sekolah	8,81- 9,00 tahun	8.73 tahun	96.01%

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Perbandingan Realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sumedang dengan tingkat Provinsi dan Nasional adalah sebagai berikut :

Grafik 3.5
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumedang
Dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 3.10
Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	Persen	100	59,60	59,60%
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen	100	92,38	92,38%

Sumber : Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang urusan Pendidikan IKK Outcome

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi maka akan semakin besar kontribusi terhadap capaian. Dalam pencapaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Ketersediaan PKBM yang cukup tersebar di wilayah Kab. Sumedang.
2. Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa tetap bersekolah pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan tinggi.
3. Bantuan Pendidikan berupa BOPD Provinsi untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB sehingga pendidikan lebih terjangkau.
4. Bantuan Pendidikan berupa BOP untuk jenjang PAUD dan Kesetaraan sehingga usia 7-21 tahun dapat melanjutkan pendidikan melalui Kesetaraan dengan lebih terjangkau.

Faktor Penghambat :

1. Masih ada sekolah yang belum terdata dalam dapodik, terutama sekolah baru.
2. Belum maksimalnya akses dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, seperti biaya pendidikan yang murah dan terjangkau, pendidikan gratis untuk anak-anak tidak mampu, ketersediaan sekolah yang dekat dengan pemukiman, ketersediaan ruang kelas untuk menampung siswa, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjalankan proses pembelajaran, memperbesar peranan pemerintah di dalam memenuhi biaya pendidikan terutama untuk biaya investasi dan biaya operasional.
3. Tidak ada Bantuan Pendidikan bagi warga berusia 22 tahun ke atas untuk melanjutkan pendidikan.

Solusi :

1. Pemberdayaan penilik dan pengawas dalam pendataan sekolah yang belum terdata dalam dapodik.
2. Memberlakukan sistem Zonasi pada proses PPDB.
3. Sosialisasi program, Pendidikan kepada para orang tua murid .
4. Mempermudah proses rekomendasi pendirian PKBM di daerah-daerah yang padat penduduk dan keterbatasan sarana transportasi agar tidak terbebani biaya transportasi.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja RLS pada tahun 2023

adalah Rp.284.482.342.821,00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya adalah Rp.279.076.498.030,00 atau 98,10%.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Per Program Yang Mendukung Pencapaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Pendidikan	284.482.342.821,00	279.076.498.030,00	98,10
Jumlah	284.482.342.821,00	279.076.498.030,00	98,10

Sumber : LRA Dinas Pendidikan (diolah)

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja RLS tahun 2023 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-rata Lama Sekolah	96,01%	98,10	-	Tidak efisien

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program Penunjang Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan. Indikator kinerja Program untuk membidik RLS tahun 2023 yaitu :

Tabel 3.10
Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	Persen	100	59,60	59,60%

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen	100	92,38	92,38%
--	--------	-----	-------	--------

Sumber : Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang urusan Pendidikan IKK Outcome

Faktor Penghambat :

Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan pra-sekolah.

Solusi :

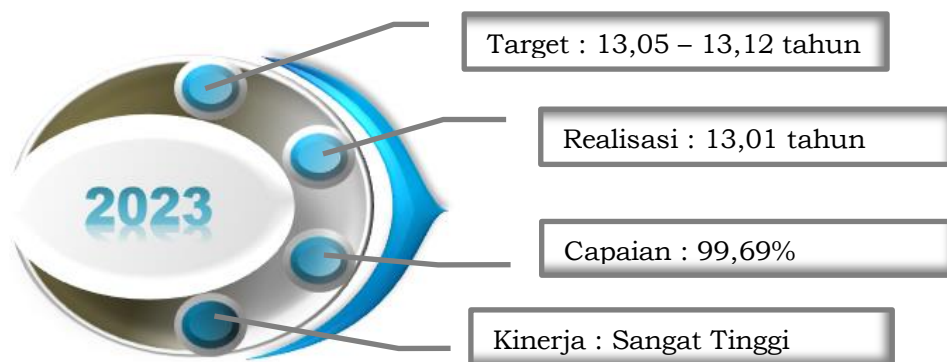
Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Himpaudi dan IGTKI melaksanakan sosialisasi pentingnya pendidikan pra sekolah kepada masyarakat.

3) ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Gambar 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

Target kinerja “Angka Harapan Lama Sekolah” tahun 2023 sebesar 13,05-13.12 tahun dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik realisasinya sebesar 13,01 tahun atau capaian kinerja sebesar 99,69% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Sumedang meningkat dari tahun sebelumnya, walaupun tidak signifikan. Angka HLS tahun 2022

sebesar 12,99 tahun dan pada tahun 2023 sebesar 13,01 tahun, sehingga pada tahun 2023 terdapat peningkatan 0,02 tahun atau sekitar 0,15%.

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,99 s.d 13,04	12,99	99,62%	13,05 s.d 13,12	13,01	99,69%	Realisasi kinerja dan Capaian Kinerja Meningkat

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam Dokumen Perubahan RPJMD 2018-2023, target jangka menengah HLS adalah 13,05 - 13,12 tahun dan realisasi pada tahun 2023 adalah 13,01 tahun, sehingga capaian kinerja jangka menengah untuk indikator Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun akhir RPJMD adalah 99,69%.

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD

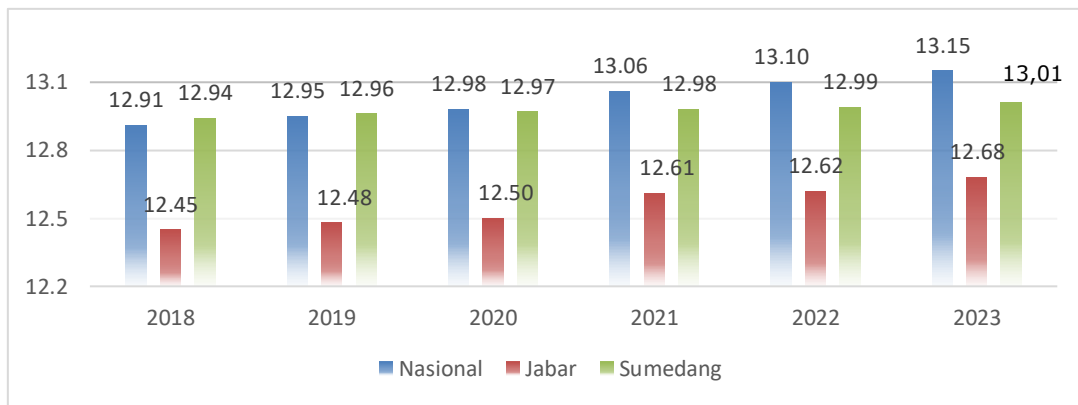
Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023
Angka Harapan Lama Sekolah	13,05-13,12 thn	13,01 tahun	99,69%

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang dan RPJMD (diolah)

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Dari tahun 2018 sampai 2023, Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sumedang selalu lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Barat seperti yang dapat di lihat pada table berikut.

Grafik 3.6
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam melaksanakan program pencapaian Harapan Lama Sekolah (HLS) terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi antara lain sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. APK SD/SMP di dorong oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terasa manfaatnya baik untuk dirinya maupun untuk lingkungannya. Juga didukung adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besar sekali manfaatnya untuk operasional sekolah, utamanya Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap anak dari keluarga miskin dalam meringankan biaya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
2. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, LPMP, Perusahaan, Pegiat dan Praktisi Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai kebutuhan KBM khususnya berbasis lingkungan dan budaya sekitar.
3. Pemerintah daerah melakukan rekrutmen dan seleksi guru kontrak daerah.

Faktor Penghambat :

1. Belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan yang ada seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), membebaskan biaya pendidikan, Program Indonesia Pintar, Beasiswa Bidik Misi, Beasiswa Sekolah Gratis.
2. Belum maksimalnya akses dan layanan Pendidikan agar setiap masyarakat dapat melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya
3. Belum maksimalnya pencapaian angka wajib belajar 9 (sembilan)

tahun pada jenjang pendidikan dasar yang berakibat belum maksimalnya.

4. Kompetensi guru belum sesuai kebutuhan KBM (mutu dan kompetensi guru rendah)
5. Kemampuan guru dalam penguasaan IT masih rendah
6. Aktifitas KKG dan MGMP di kabupaten/kota belum dilaksanakan secara optimal untuk mengadakan kegiatan yang dapat menumbuhkan budaya belajar dan budaya berbagi ilmu sesama guru
7. Penyebaran guru belum merata / Terdapat ketimpangan jumlah guru untuk mata pelajaran tertentu
8. Guru enggan ditugaskan di tempat yang terpencil akibat pengaruh intervensi politik
9. Kekurangan guru PNS
10. Jumlah murid pada sekolah tertentu kurang dari 10 dalam satu kelas

Solusi :

1. Pemerintah daerah mempermudah ijin belajar untuk guru, serta memberikan beasiswa dan kemudahan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi D4/S1 untuk menempuh pendidikan. Bagi yang tidak memungkinkan (dikarenakan usia mendekati pensiun) dapat diberikan pelatihan agar kompetensinya dapat setara dengan guru D4/S1
2. Pemerintah daerah memberikan pelatihan IT secara berkala kepada guru-guru melalui KKG atau MGPM dengan bekerja sama dengan berbagai tenaga atau rewalan ahli IT atau guru-guru IT
3. Pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada KKG/MGMP yang aktif mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi guru
4. Pemerintah daerah meredistribusi guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan pemerataan guru, atau melakukan rotasi guru secara berkala
5. Pemerintah daerah bersama DPRD Komisi Pendidikan membuat aturan khusus terkait rotasi guru secara berkala, misalnya 3 atau 5 tahun sekali berdasarkan analisis kebutuhan sehingga semua guru pasti dirotasi dan mengurangi intervensi politik, serta mengalokasikan dana untuk pembangunan dan renovasi

perumahan yang layak bagi guru di daerah terpencil

6. Pemerintah daerah menerapkan multigrade dan multisubject, guru bisa mengajar mata pelajaran serumpun dan mengajar di kelas jenjang berbeda
7. Pemerintah daerah melakukan analisis populasi anak usia sekolah dengan satuan pendidikan terdekat, dan pemerintah daerah mengambil sikap terkait sekolah yang hanya memiliki siswa kurang dari 10 pada setiap kelas, baik melakukan merger sekolah serta menyarankan siswa tersebut untuk bersekolah di sekolah lain atau membina sekolah tersebut agar mendapatkan siswa sesuai kondisi sekolah

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja HLS pada tahun 2023 adalah Rp.284.482.342.821,00 yang terdiri dari satu program. Sedangkan realisasinya adalah Rp. 279.076.498.030,00 atau 8,10%.

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Per Program Yang Mendukung Pencapaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Pendidikan	284.482.342.821,00	279.076.498.030,00	98,10
Jumlah	284.482.342.821,00	279.076.498.030,00	98,10

Sumber : LRA Dinas pendidikan (diolah)

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja HLS tahun 2023 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Harapan Lama Sekolah	99,69	98,10	-	Kurang efisien

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program Penunjang Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan. Indikator kinerja Program untuk membidik Angka HLS tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.15
Indikator program penunjang Kinerja Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun dalam Pendidikan SD	Persen	100	97,31	97,31%
Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun dalam Pendidikan SMP	Persen	100	91,55	91,55%

Sumber : LKIP Dinas pendidikan (diolah)

Faktor Pendukung :

Didalam petunjuk teknis pemanfaatan dana BOS sudah dapat dilakukan pengalokasian dana BOS untuk perawatan gedung sekolah dengan kondisi gedung atau ruangan dengan tingkat kerusakan ringan

Faktor Penghambat :

1. Banyak ruang kelas/guru/tata usaha/perpustakaan/laboratorium/ lainnya yang memiliki intensitas kerusakan berat.
2. Perbandingan jumlah ruang kelas terhadap siswa tidak sesuai peraturan (rombel tidak ideal), dan kurangnya fasilitas kelas, perpustakaan juga laboratorium.
3. Terdapatnya penumpukkan jumlah siswa di wilayah tertentu (disparitas satuan pendidikan).
4. Bangunan tidak ramah anak dan kebutuhan khusus lainnya.

Solusi :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pendidikan melakukan pendataan dan pemetaan kondisi ruang kelas berdasarkan zona pendidikan. Sesuai dengan hasil pendataan dan pemetaan, Pemerintah Daerah memberikan prioritas alokasi anggaran untuk pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas berdasarkan kondisi ruang kelas rusak berat, dan penambahan ruang kelas baru dari anggaran APBD Kabupaten Sumedang.
2. Memberikan himbauan kepada sekolah-sekolah dalam satu zona untuk

dapat saling mendukung baik secara infrastruktur maupun PTK melalui sharing resources dan redistribusi guru.

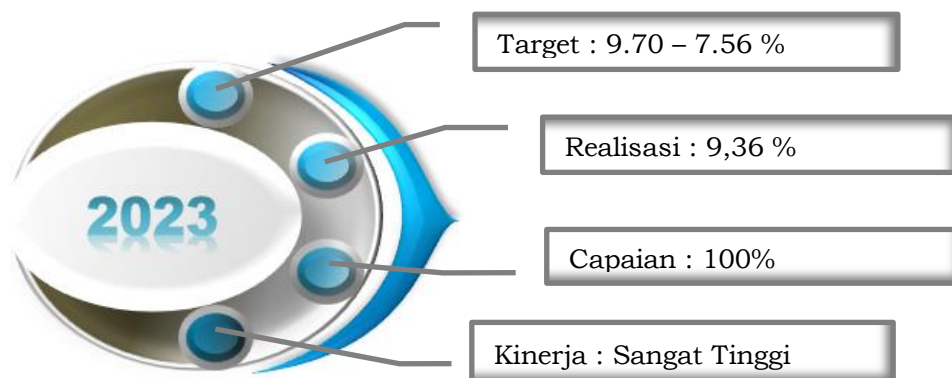
3. Penguatan peran gotong royong tripusat pendidikan dalam zona dengan mendorong orang tua dan masyarakat membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan.
4. Penedapakan isu gender dan difabel serta pengembangan mulok yang ramah anak.

4) PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia maka dipakai pendekatan data konsumsi/pengeluaran. Termasuk pengeluaran adalah perkiraan barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Gambar 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi
Indikator Persentase Penduduk Miskin



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

Target kinerja “Persentase Penduduk Miskin” tahun 2023 sebesar 9,70 – 7,56 % dan realisasinya berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumedang sebesar 9,36% atau capaian kinerja sebesar 100% (Sangat Tinggi). Target kinerja tercapai.

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi dan capaian kinerja Persentase Penduduk Miskin tahun 2023 mengalami kenaikan. Persentase jumlah penduduk miskin tahun 2022 sebesar 10,14% sedangkan tahun 2023 sebesar 9,36% atau terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,78%.

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya penanggulangan MPKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,41 s.d 9,54	10,14	100%	9,70 s.d 7,56	9,36	100%	Realisasi dan capaian kinerja meningkat

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Persentase Penduduk Miskin adalah 7,56% dan realisasi pada tahun 2023 adalah 9,36%, dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Persentase Penduduk Miskin pada akhir RPJMD adalah 100%

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

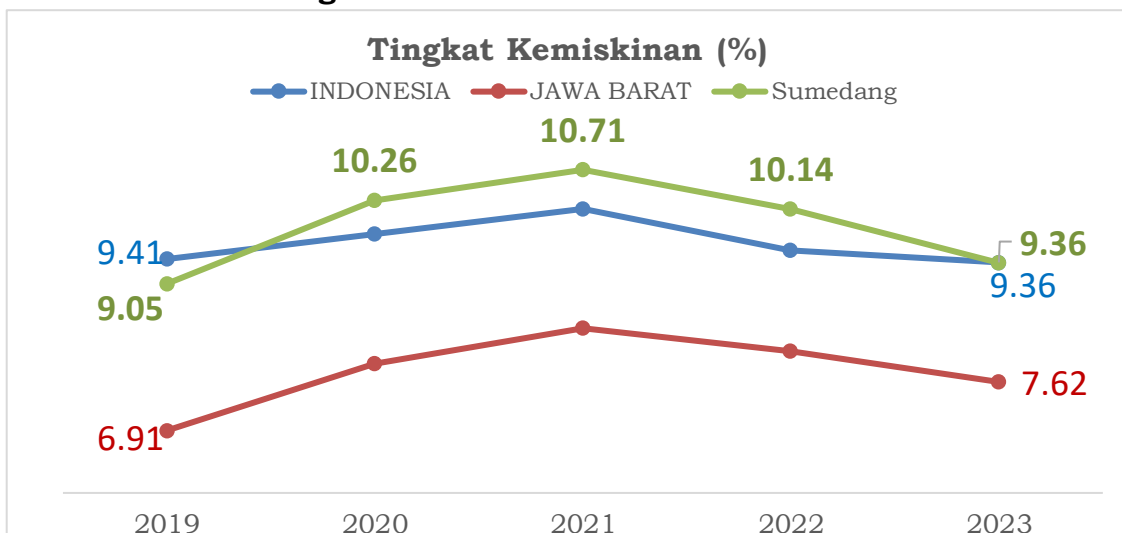
Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023
Persentase Penduduk Miskin	9,70 - 7,56	9,36%	100%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Kemiskinan biasanya diukur dengan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau dengan kata lain

kemiskinan dipandang dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Tahun 2023 garis kemiskinan Kabupaten Sumedang berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Sumedang masih berada di bawah tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat secara umum. Dengan demikian masyarakat Sumedang masih memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang rendah atau di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan sejak adanya pandemi Covid-19 menunjukkan peningkatan di semua wilayah di Indonesia. Persentase kemiskinan tahun 2023 untuk tingkat Nasional 9,36% turun 0,21% dari tahun 2022, persentase kemiskinan tingkat Provinsi turun 7,62% atau turun 0,44% dari tahun 2022 sementara untuk Kabupaten Sumedang berada di posisi 9,36% atau turun 0,78% dari tahun 2022.

Grafik 3.7
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

Untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar wilayah, perlu dihitung persentase perubahan tingkat kemiskinan sehingga dapat menilai progress penurunan/peningkatan kemiskinan secara proporsional. Dengan kata lain, tidak cukup fair hanya membandingkan persentase atau jumlah penduduk miskin di setiap wilayah tanpa dilihat dari pertumbuhannya. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki kondisi awal tingkat kemiskinan yang berbeda-beda.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang (9,36%) meskipun masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat (7,62%), namun pertumbuhan

penurunan tingkat kemiskinan Sumedang (- 0,78%) dan secara peringkat berada di peringkat ke-3 terbaik di Jawa Barat.

Progress penurunan kemiskinan yang relatif lebih baik pada tahun 2023 juga mengindikasikan program pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang lebih efektif meski jika dilihat dari capaiannya masih lebih tinggi dari Jawa Barat.

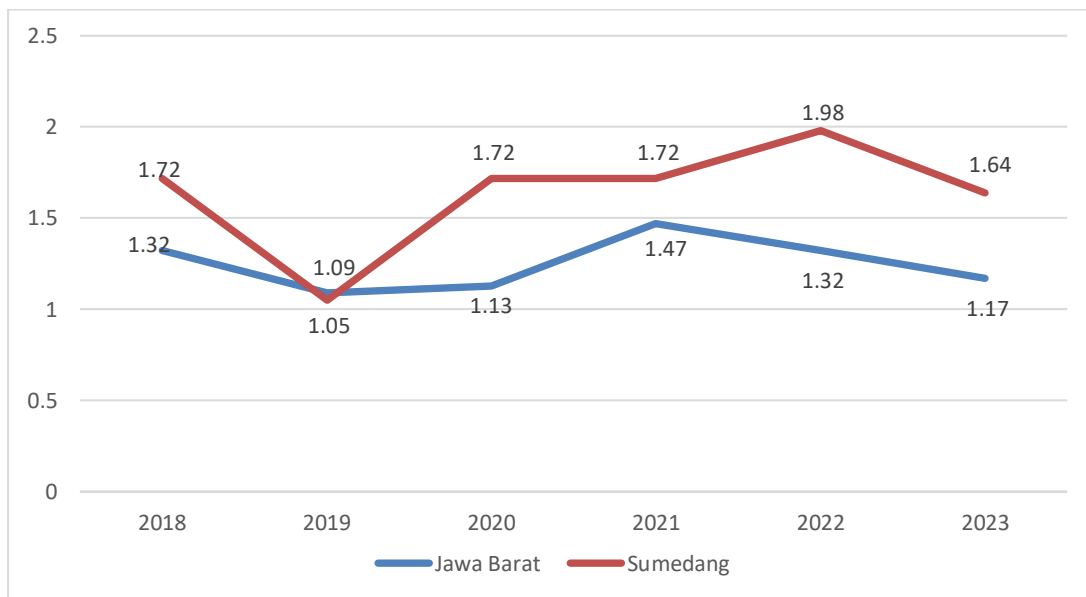
Menurunnya kemiskinan di Kabupaten Sumedang sejalan dengan pencapaian indikator pembangunan lainnya seperti menurunnya pengangguran karena kondisi perekonomian yang sudah mulai pulih dari pandemi *Covid-19* sehingga sebagian besar lapangan usaha, khususnya yang banyak menyerap tenaga kerja seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri, dan sektor konstruksi dapat kembali tumbuh. Implikasi meningkatnya aktivitas perekonomian adalah meningkatnya pengeluaran per kapita masyarakat sehingga lebih sedikit penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tingkat kemiskinan penduduk pun tidak lepas dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berikut adalah perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan antara Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Grafik 3.8

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

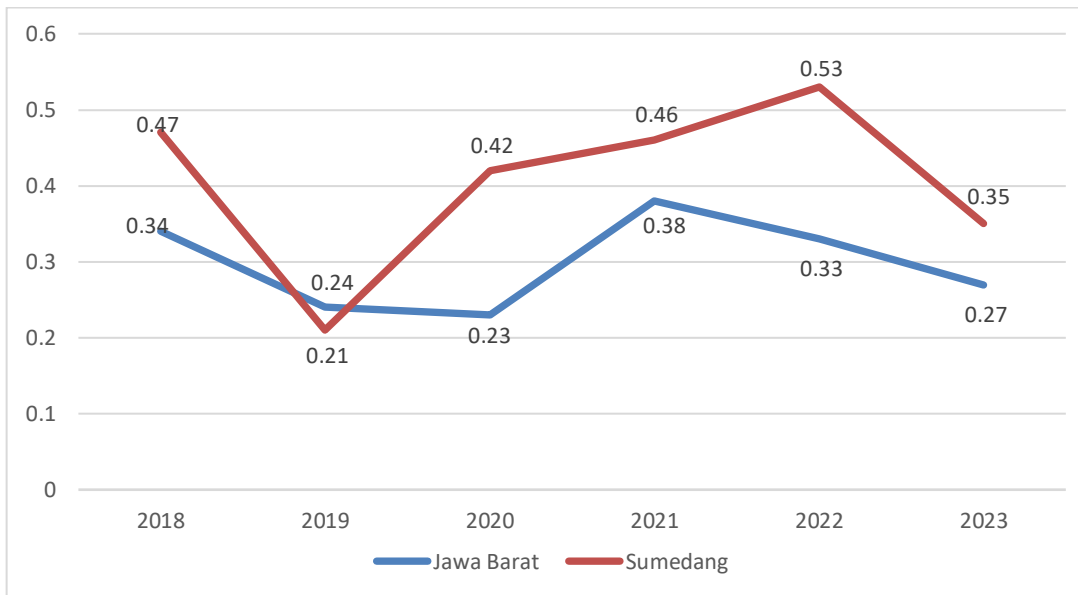


Sumber. BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) (2023)

Berdasarkan Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Sumedang yang lebih tinggi dari Jawa Barat, menunjukkan semakin besar effort yang diperlukan untuk mengeluarkan penduduk miskin dari kemiskinan, khususnya pasca pandemi. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketimpangan pengeluaran pendapatan masyarakat miskin di Kabupaten Sumedang masih belum membaik atau belum merata.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Sumedang juga cenderung meningkat. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sumedang yang lebih tinggi dari Jawa Barat, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin terutama dipicu pasca adanya pandemi Covid-19. Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan disajikan sebagai berikut.

Grafik 3.9
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sumedang dan
Provinsi Jawa Barat



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) (2023)

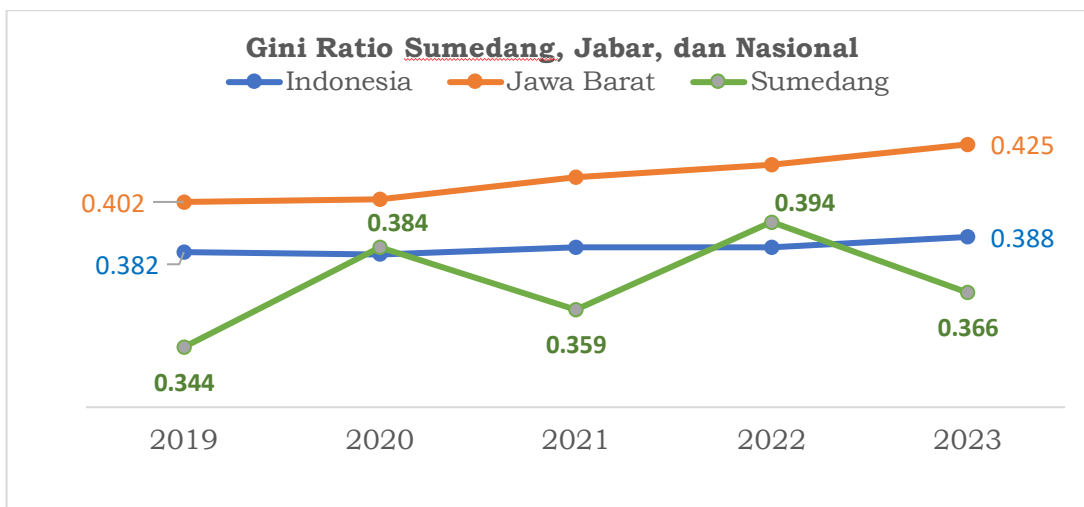
Di tahun 2023 indeks keparahan kemiskinan terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya hal ini dapat dikatakan ketimpangan di antara penduduk miskin menurun di tahun 2023, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat secara umum yang diukur dengan gini ratio juga masih fluktuatif dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Menurunnya kemiskinan di Kabupaten Sumedang sejalan dengan pencapaian indikator pembangunan lainnya seperti menurunnya pengangguran karena kondisi perekonomian yang sudah mulai pulih dari pandemi *Covid-19* sehingga sebagian besar lapangan usaha, khususnya yang banyak menyerap tenaga kerja seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri, dan sektor konstruksi dapat kembali tumbuh. Implikasi meningkatnya aktivitas perekonomian adalah meningkatnya pengeluaran per kapita masyarakat sehingga lebih sedikit penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan.

Selain ketimpangan di antara penduduk miskin meningkat di tahun 2022, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat secara umum yang diukur dengan gini ratio juga masih fluktuatif dalam 5 tahun terakhir meskipun ketimpangan masih berada dalam kategori rendah ($< 0,4$) sejak 2019. Namun demikian, Gini ratio Kabupaten Sumedang tahun 2023 mengalami penurunan yaitu 0,366 poin dari target 0,37 poin - 0,34 poin (turun sebesar 0,028 poin dari capaian tahun 2022) seperti yang tergambar dalam gambar dibawah ini.

Grafik 3.10

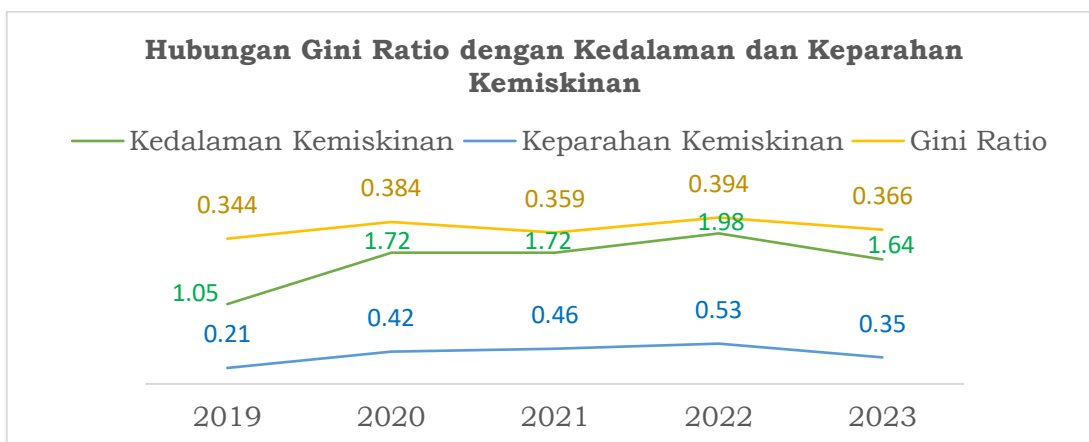
Tren Gini Ratio Kabupaten Sumedang



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) (2023)

Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuasi. Hal yang sama juga terlihat di level nasional namun tidak begitu signifikan, sementara di Jawa Barat ketimpangan terus meningkat. Begitu pula dengan pola tren data ketimpangan di Sumedang ternyata relatif sejalan dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan (Grafik 3.11).

Grafik 3.11
Tren Gini Ratio, Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Sumedang



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) (2023)

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah berupaya dalam penurunan angka kemiskinan melalui berbagai langkah - langkah yang diambil, adapun faktor - faktor penunjang keberhasilan menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Optimallisasi pelayanan Rumah Besar Simpati/Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Puskesmas ditingkat Desa/Kelurahan ;

2. Penguatan koordinasi, kolaborasi, pentahelik dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS ;
3. Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dalam kepesertaan PBI, PKH, bantuan sembako, permakanaan lansia dan disabilitas serta bantuan Atensi ;
4. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan provinsi dalam proses rujukan, atensi, bimbingan fisik mental spritual dan sosial dalam penanganan PPKS ;
5. Pelakanaan Pembangunan SPAM sebanyak 923 sambungan rumah
6. Peningkatan penyerapan Tenaga Kerja ;
7. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu layanan kepada Masyarakat yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menurunkan angka kemiskinan, beberapa factor yang mendukung untuk peningkatan realisasi Rahabilitasi RUTILAHU antara lain :
 - a. Penyusunan basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang khusus merencanakan dan pembangunan dalam perumahan dan kawasan permukiman yaitu dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman).
 - b. Peningkatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan untuk menampung fungsi hunian yang merupakan bagian dan penyelenggaraan kawasan perumahan untuk pemenuhan hak warga negara atas kawasan tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur, yang juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selain dari faktor keberhasilan diatas, terdapat pula beberapa kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

NO	Kendala/Permasalahan	Solusi
1.	Verifikasi data fakir miskin dari tingkat desa belum sesuai aturan dan ketentuan	Pelaksanaan verifikasi ulang data fakir miskin di tingkat desa
2.	Masih kurangnya tenaga profesional untuk pekerja social	Penambahan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pekerja Sosial, serta pelaksanaan pembinaan, bimtek/diklat atau sertifikasi SDM

3.	Belum memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi penanganan ppks	Pemenuhan Sarana dan Prasarana operasional
4.	Masih terbatasnya anggaran untuk pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	Pengusulan penambahan anggaran untuk program RUTILAHU
5.	Belum ada database terkait jumlah rumah di perumahan yang sudah diserahkan terimakan dan yang belum diserahkan terimakan. Dengan adanya data base perumahan yang terukur akan memudahkan penanganan berkelanjutan, baik dari anggaran APBD Kabupaten maupun anggaran dari provinsi.	a. Pengusulan anggaran untuk kegiatan Database Rumah tidak layak huni. b. Pengusulan anggaran untuk kegiatan Database Perumahan yang sudah diserahkan terimakan dan yang belum diserahkan terimakan.
6.	Kurangnya kuota Rutilahu dari APBD Provinsi	Pengusulan penambahan kuota RUTILAHU

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kebijakan dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang terdiri dari empat program utama, yaitu :

- 1) Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator program antara lain:
 - a. Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya dengan target 16,25% dan realisasi 16,25%, capaian kinerja 100% (kinerja sangat tinggi).
 - b. Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan target 58,33% dan realisasi 58,33%, capaian kinerja 100% (kinerja sangat tinggi).

Keberhasilan program ini yaitu kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat meningkat melalui :

1. Penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di 270 desa dan 7 kelurahan.
 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
 3. Peningkatan Kapasitas PSM melalui studi tiru ke Dinas Sosial Kabupaten lain dalam penanganan PPKS, pelaksanaan Bimtek penanganan masalah kesejahteraan sosial bagi PSM
 4. Peningkatan Kapasitas TKSK melalui bimtek penanganan masalah kesejahteraan sosial
- 2) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan indikator

program Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima jaminan bantuan sosial kebutuhan dasar dengan target 98% dengan realisasi 97,82% capaian kinerja 99,82% (kinerja sangat tinggi).

Keberhasilan program ini yaitu terpasilitasnya kebutuhan dasar masyarakat miskin/tidak mampu melalui program sebagai berikut :

- a. Program PKH sebanyak 54.562 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- b. Program sembako sebanyak 145.211 KPM.
- c. Program PBI sebanyak 110.578 Jiwa.
- d. Program KUBE sebanyak 56 Kelompok (560 KK).

- 3) Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator program Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar, dengan target 35,75% realisasi 37 % atau capaian kinerja 103,48% (kinerja sangat tinggi).

Faktor keberhasilan program ini yaitu :

- a. Optimalisasi layanan Rumah Besar Simpati.
- b. Penguatan koordinasi dengan mitra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.
- c. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data PPKS.

- 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan target 76,90% realisasi 81,87 % atau capaian kinerja 106,46% (kinerja sangat tinggi). Keberhasilan program ini yaitu melalui Pembangunan SPAM sebanyak 923 Sambungan Rumah.

- 5) Indikator kinerja Program Pengembangan Perumahan dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh tahun 2023 yaitu Rasio Rumah Layak Huni dengan target sebesar 83,33% dan realisasinya 81,70% atau capaian kinerja sebesar 98,04%. Target kinerja belum tercapai.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu sebagai berikut:

- a. Keterbatasan APBD Kabupaten Sumedang uuntuk pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.
- b. Belum ada database terkait jumlah rumah di perumahan yang sudah diserahkan terimakan dan yang belum diserahkan terimakan.

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase

Penduduk Miskin tahun 2023 sebesar Rp.22.781.622.760,00 yang terdiri dari 5 program utama. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.19.771.392.058,00 atau 86,79%.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Per Program Yang Mendukung Pencapaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023

Program	Pagu	Realisasi	%
Pogram Rehabilitasi Sosial	3.055.415.600,00	3,040.189.881,00	95,30
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.741.797.220,00	5.661.246.700,00	83,97
Program Pemberdayaan Sosial	1.527.995.940,00	1.508.552.040,00	98,73
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.756.414.000,00	8.964.142.576,00	83,34
Program Pengembangan Perumahan	700.000.000,00	597,260,861,00	85,32
Jumlah	22.781.622.760,00	19.771.392.058,00	86,79

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Persentase Penduduk Miskin tahun 2023 sebesar 13,21%.

Tabel 3.19
Tingkat Efisiensi Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Terwujudnya penanggulangan PMKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	100%	86,79%	13,21%	Efisien

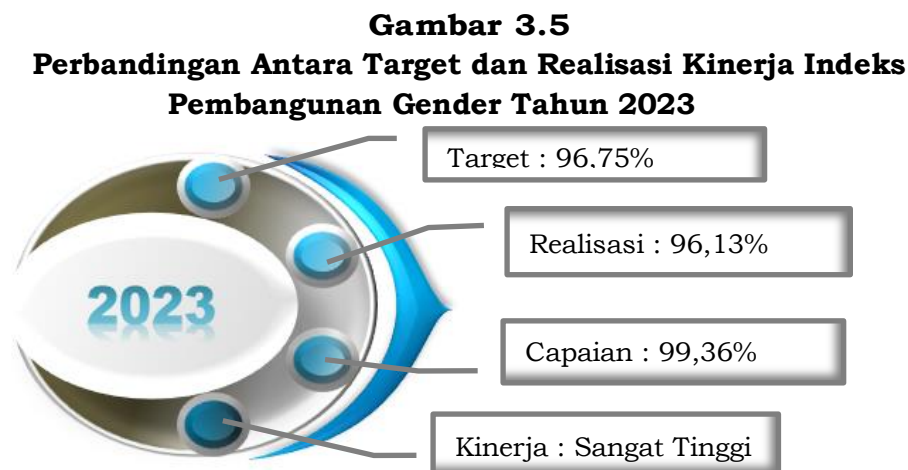
5) INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun

lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Indeks Pembangunan Gender” tahun 2023 sebesar 96,57 poin dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 96,13 poin atau capaian kinerja sebesar 99,36% (kinerja sangat tinggi). Akan tetapi target kinerja tidak tercapai.



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Target IPG Kabupaten Sumedang Tahun 2023 96,75 poin dan realisasi IPG (UHH LF SP2020) tahun 2023 yaitu 96,13 poin dengan capaian kinerja 99,36%, sementara realisasi IPG tahun 2022 terealisasi 95,09 poin dengan capaian kinerja 98,76%. Sehingga pada tahun 2023 terdapat kenaikan realisasi sebesar 1,04 poin.

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan	Indeks Pembangunan Gender	Poin	96,28	95,09	98,76%	96,75	96,13	99,36%	Realisasi meningkat dan capaian kinerja

anak									meningkat
------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023 Perubahan, target jangka menengah Indeks Pembangunan Gender adalah 96,75 poin dan realisasi pada tahun 2023 adalah 96,13 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah IPG pada tahun akhir RPJMD 2018-2023 sebesar 99,36%.

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD

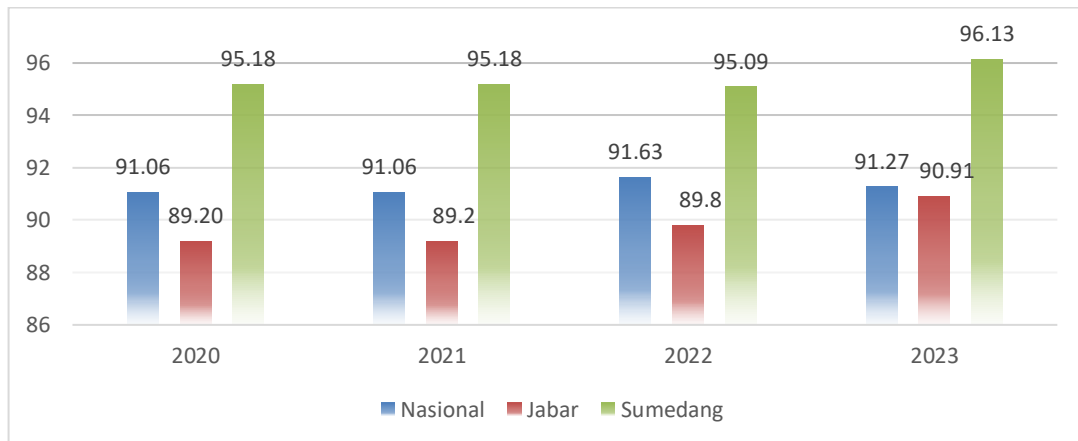
Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023
Indeks Pembangunan Gender	96,75 poin	96,13 poin	99,36 %

Sumber : RPJMD dan BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sumedang bila dibandingkan dengan realisasi IPG Provinsi ataupun Nasional berada di atas keduanya, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sumedang berada pada posisi kedua tertinggi setelah Kota Cirebon dengan IPG 96,37 poin, hal ini mencerminkan pembangunan antara pria dan wanita di Sumedang sudah lebih merata dan mampu lebih baik dari wilayah kabupaten/kota lain di Jawa Barat.

Grafik 3.12
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2023



Sumber : BPS Kab. Sumedang (diolah)

**Indeks Pembangunan Gender
Se- Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023**

Kode	Kabupaten/Kota	IPG (UHH LF SP2020)			
		2020	2021	2022	2023
3200	JAWA BARAT	89,9	90,17	90,69	90,91
3201	Bogor	89,76	90,07	90,7	90,93
3202	Sukabumi	87,88	88,04	88,29	89,02
3203	Cianjur	84,64	84,92	85,56	85,88
3204	Bandung	94,57	94,59	94,71	94,8
3205	Garut	82,82	82,76	83,37	84,05
3206	Tasikmalaya	86,21	86,65	87,01	87,47
3207	Ciamis	87,26	87,31	87,86	88,01
3208	Kuningan	87,2	87,37	87,65	87,79
3209	Cirebon	83,99	84,12	84,69	84,96
3210	Majalengka	86,43	86,88	87,39	87,84
3211	Sumedang	95,93	96,05	95,99	96,13
3212	Indramayu	88,67	88,59	88,89	89,51
3213	Subang	91,14	91,26	91,74	91,92
3214	Purwakarta	87,09	87,33	87,63	87,8
3215	Karawang	90,79	91,06	91,32	91,85
3216	Bekasi	89,41	89,77	90,3	90,06
3217	Bandung Barat	79,6	79,72	80,41	80,96
3218	Pangandaran	90,43	90,69	91,01	90,83
3271	Kota Bogor	91,94	91,86	91,98	92,19
3272	Kota Sukabumi	92,07	92,39	92,67	93,04
3273	Kota Bandung	95,3	95,34	95,39	95,24
3274	Kota Cirebon	95,18	95,38	95,87	96,37
3275	Kota Bekasi	93,56	93,79	94,15	94,28
3276	Kota Depok	93,44	93,45	93,92	94,03
3277	Kota Cimahi	92,52	92,54	92,51	92,54
3278	Kota Tasikmalaya	92,4	92,62	92,79	92,96
3279	Kota Banjar	87,72	87,68	88,39	88,62

Sumber : BPS Kab.Sumedang (diolah)

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Dalam peningkatan Indeks Pembangunan Gender terdapat langkah langkah alternatif/ solusi antara lain :

1. Pembinaan pendampingan dan peningkatan kapasitas pengelola Kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) ;
2. Pemberian Bantuan Peralatan Usaha dan Perlengkapan Kepada Kelompok UPPKS ;
3. Pembinaan, pendampingan dan peningkatan kapasitas untuk kemandirian keluarga dari segi ekonomi melalui advokasi dan sosialisasi kepada kelompok UPPKS ;
4. Pelaksanaan pembinaan kepada Keluarga Sejahtera 1 yang termasuk Pasangan Usia Subur yang memiliki anak 2 untuk mengikuti program KB ;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada kelompok UPPKS yang diberi bantuan modal ;
6. Pengembangan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di seluruh Desa/Kelurahan berkolaborasi dengan berbagai Program yang ada di Desa/Kelurahan ;
7. Pelatihan Vokasional Sekoper Cinta (IT, Digital Marketing, Skin Care, Kuliner) ;
8. Pembentukan, Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok PEKKA ;
9. Monitoring dan Pembinaan Usaha Perorangan Sekoper Cinta ;
10. Pemberian advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan ;
11. Pemenuhan layanan tindak lanjut pengaduan bagi perempuan korban kekerasan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dukungan Anggaran dalam upaya pencapaian kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2023 sebesar Rp. 9.347.734.340,00 yang terdiri dari 4 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 9.181.183.280,00 atau 98,29%.

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.153.550.000,00	1.122.365.000,00	97,29
Program Perlindungan Perempuan	16.073.400,00	15.623.400,00	97,20
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.055.520.000,00	979.353.940,00	92,78
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.122.590.940,00	7.063.840.940,00	99,17
Jumlah	9.347.734.340,00	9.181.183.280,00	98,29

Sumber : LRA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (diolah)

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja IPG tahun 2023 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program Penunjang Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender, antara lain:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Sasaran programnya adalah Meningkatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu Persentase OPD Responsip Gender dengan Target 61,29% dan Realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 163,63% capaian kinerja sangat tinggi. Program ini di dukung dengan capaian- capaian sasaran kegiatan diantaranya :
 - a. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah dengan Indikator sasaran yaitu Cakupan Hasil Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten dengan target 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
 - b. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan dengan Indikator sasaran yaitu Cakupan Hasil Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi

Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten dengan target 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.

- c. Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dengan Indikator sasaran yaitu Cakupan Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten dengan target 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%

2. Program Perlindungan Perempuan. Sasaran kinerja programnya adalah Meningkatnya Pencegahan Dan Pendampingan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak dengan indikator kinerja program yaitu Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dengan Target 100% dan Realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Keberhasilan program ini dilihat dari, Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, meningkatnya kapasitas lembaga dan individu yang terlibat dalam perlindungan perempuan, seperti polisi, pengacara, dan pekerja sosial.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Dengan sasaran program Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan dengan Target 100% dan Realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Keberhasilan program ini dicapai dengan meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak dengan indikator sasaran yaitu Cakupan Hasil Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten dengan target 100% dan realisasinya 100%.

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Dengan sasaran program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) adalah Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan dalam Pola Asuh Balita, Remaja dan Lansia serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu :

- a. Cakupan Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Ketahanan (BKB, BKR dan BKL) dengan Target 20,87% dan realisasi 20,93%

atau capaian kinerja 100,29% dapat diartikan capaian Tinggi, itu dikarenakan partisipasi keluarga yang menjadi anggota kelompok ketahanan meningkat.

- b. Cakupan Keluarga pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS dengan target 4,33% dan realisasinya 4,95% atau capaian kinerja 114,32% dapat diartikan capaian Tinggi.

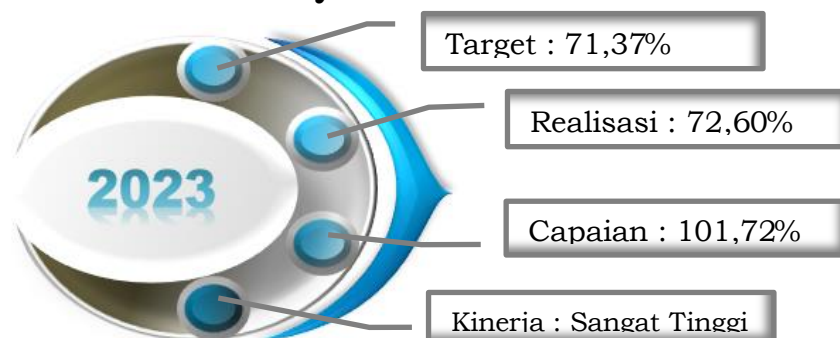
6) INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

Berikut hasil indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sumedang Tahun 2023 berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Gambar 3.6
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Hasil perhitungan IDG Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 belum rilis dari Badan Pusat Statistik

Tabel 3.24

Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	70,84	72,23	101,96%	71,37	72,60	101,72	Realisasi meningkat dan capaian melebihi target

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah IDG adalah 71,37 poin dan realisasi pada tahun 2023 adalah 72,60 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah IDG pada tahun akhir RPJMD sebesar 101,72 %.

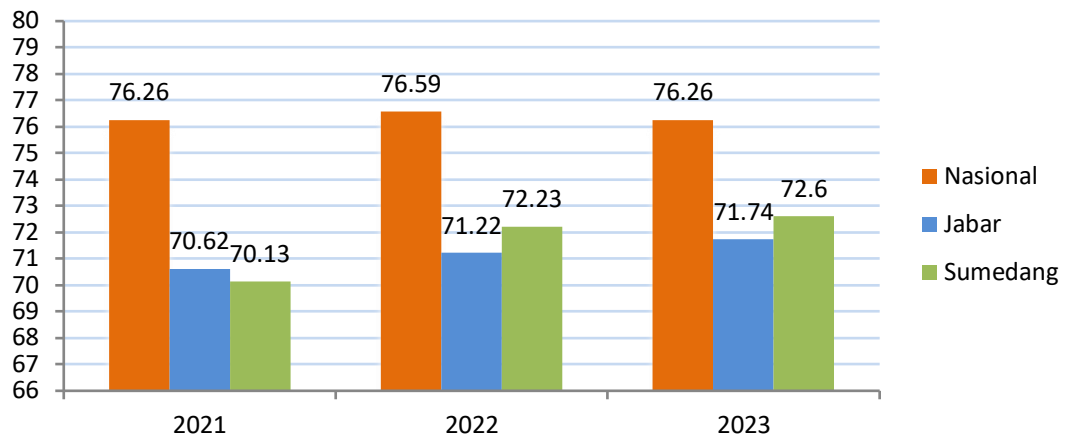
Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja IDG Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023
Indeks Pemberdayaan Gender	71,37 poin	72,60 poin	101,72%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sumedang berada di bawah capaian Nasional dan berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat, akan tetapi IDG Nasional mengalami penurunan -0,33 poin dari tahun sebelumnya sementara Kabupaten Sumedang naik 0,37 poin.

Grafik 3.13
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2023



Sumber : Data BPS (diolah)

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indeks Pemberdayaan Gender dipengaruhi oleh 3 (tiga) elemen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

1. Keterlibatan perempuan dalam parlemen

Pemberdayaan gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal salah satunya dalam berpolitik. Politik menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Dengan terwujudnya kesetaraan di bidang politik, diharapkan tidak akan muncul kebijakan-kebijakan yang bias gender. Namun pada kenyataannya, dunia politik di Indonesia masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini tentu berkaitan erat dengan faktor budaya patriarki yang tumbuh di Indonesia. Di Kabupaten Sumedang, berdasarkan data dari BPS partisipasi perempuan di parlemen hanya 11% untuk tahun 2023 dan jumlah ini masih tetap dari 2022.

2. Perempuan sebagai tenaga profesional

Pada tahun 2023 berdasarkan data dari BPS diketahui bahwa warga perempuan Kabupaten Sumedang sebagai tenaga profesional sebesar 49,16%, terdapat kenaikan sedikit dari tahun 2022 yang semula 49,07%. didasarkn pada teori yang diajukan oleh Evetts (2000) bahwa kesempatan karier seorang perempuan dapat dijelaskan melalui dimensi demografi, sosial, ekonomi, dimana dimensi demografi meliputi Rasio Anak Perempuan dan Harapan Hidup Saat Lahir, sementara untuk dimensi sosioekonomi meliputi Angka Melek Hurup, Lama Sekolah Rata-

rata Perempuan, Sumbangan Pendapatan Perempuan (%) dan Persentase Penduduk Perkotaan.

Semakin tinggi rasio anak perempuan dan harapan hidup saat lahir, semakin rendah kesempatan perempuan menduduki posisi tenaga profesional. Semakin tinggi angka melek huruf, lama sekolah rata-rata perempuan, persentase penduduk perkotaan dan sumbangan pendapatan perempuan, semakin tinggi kesempatan perempuan menduduki posisi tenaga profesional.

3. Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)

Berdasarkan data dari BPS diketahui bahwa sumbangan pendapatan perempuan Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar 35,77% naik 0,77% dari tahun sebelumnya.

Meski menunjukkan capaian yang masih jauh di berbagai indikator ekonomi dan tenaga kerja, namun peran perempuan dalam penciptaan pendapatan terus mengalami peningkatan. Walaupun masih terpaut cukup jauh dari laki-laki, namun peningkatan yang terus terjadi pada indikator ini menjadi sinyal positif perbaikan kondisi kesetaraan gender dalam ekonomi.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja IDG tahun 2023 adalah Rp. 9.331.660.940,00 yang terdiri dari satu program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 9.165.559.880,00 atau 98,22%. Bila dibandingkan dengan Capaian Kinerja Sasaran maka terdapat Efisiensi Anggaran 3,50%.

Tabel 3.25

Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.153.550.000,00	1.122.365.000,00	97,29
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	7.122.590.940,00	7.063.840.940,00	99,17
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.055.520.000,00	979.353.940,00	92,78
Jumlah	9.331.660.940,00	9.165.559.880,00	98,22

Sumber : LRA DPPKBP3A (diolah)

Tabel 3.26
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = \frac{(3) - (4)}{(4)}$	(6)
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	101,72%	98,22%	3,50%	Efisien

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender, yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan sasaran program Meningkatkan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu Persentase OPD Responsip Gender dengan Target 61,29% dan Realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 163,63% capaian kinerja sangat tinggi. Program ini di dukung dengan capaian- capaian sasaran kegiatan diantaranya :
 - a. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah dengan Indikator sasaran yaitu Cakupan Hasil Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten dengan target 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
 - b. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan dengan Indikator sasaran yaitu Cakupan Hasil Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten dengan target 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
 - c. Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dengan Indikator sasaran yaitu Cakupan Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten dengan target 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar

100%

2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan sasaran program Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Dalam Pola Asuh Balita, Remaja dan Lansia serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu :
 - a. Cakupan Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Ketahanan (BKB,BKR dan BKL) dengan Target 20,87% dan realisasi 20,93% atau capaian kinerja 100,29% dapat diartikan capaian Tinggi, itu dikarenakan partisipasi keluarga yang menjadi anggota kelompok ketahanan meningkat.
 - b. Cakupan Keluarga pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS dengan target 4,33% dan realisasinya 4,95% atau capaian kinerja 114,32% dapat di artikan capaian Tinggi.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan sasaran program Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan dengan Target 100% dan Realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Keberhasil program ini dicapai dengan meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak dengan indikator sasaran yaitu Cakupan Hasil Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten dengan target 100% dan realisasinya 100%.

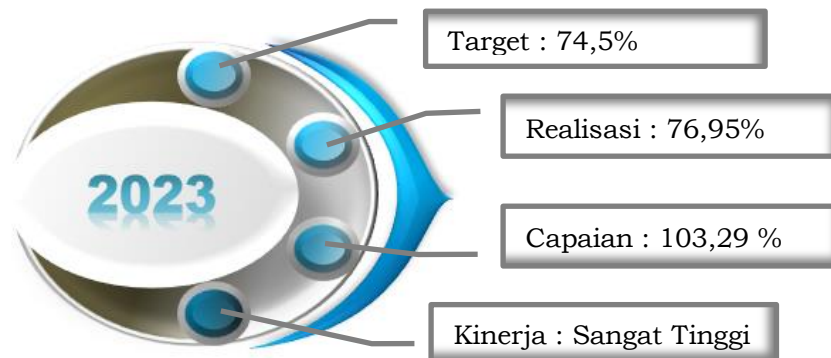
7) INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktifbergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan

keagamaan. faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi ketiga indikator tadi antara lain adalah; pendidikan keluarga, implementasi kearifan lokal, pendapatan, heteronitas agama dan peran kementerian agama.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Gambar 3.7
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023



Sumber : Laporan Hasil Survey IKUB Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2023 target kinerja “Indeks Kerukunan Umat Beragama” sebesar 74,5 poin dan realisasinya adalah 76,95 poin atau capaian kinerja sebesar 103,29% (kinerja sangat tinggi). kinerja melebihi target.

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2022, IKUB tahun 2023 realisasinya 76,95 poin capaian kinerjanya telah melebihi target dari semula 101,78% menjadi 103,29. Dan dapat melebihi capaian pada tahun 2022.

Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kerukunan Umat Tahun 2023
dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	74	75,32	101,78%	74,5	76,95	103,29%	Realisasi meningkat Capaian Kinerja melebihi target

Sumber : Laporan Hasil Survey IKUB Tahun 2022 dan 2023

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023 Perubahan, target jangka menengah IKUB

adalah 74,5 poin dan realisasi pada tahun 2023 adalah 76,95 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah IKUB pada tahun akhir RPJMD sebesar 103,29%.

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja IKUB Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023
Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,5 poin	76,95 Poin	103.29%

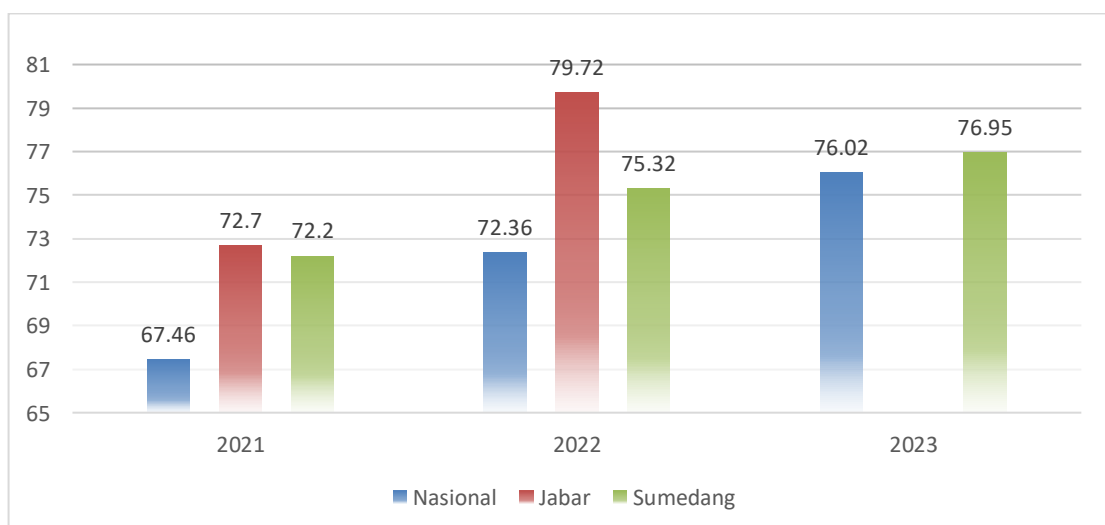
Sumber : Laporan Hasil Survey IKUB dan RPJMD Perubahan (diolah)

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/ Nasional

Pada tahun 2023 IKUB Kabupaten Sumedang sebesar 76,95 poin, sementara indeks kerukunan umat beragama Nasional sebesar 76,02 poin, akan tetapi untuk Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi yang bersumber dari kemenag.go.id. sampai dengan laporan ini di susun belum rilis sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sumedang.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya IKUB Kabupaten Sumedang selalu berada di atas IKUB Nasional.

Grafik 3.14
Perbandingan IKUB Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2023



Sumber : kemenag.go.id

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Survey Kerukunan Umat Beragama tahun 2023 ditujukan untuk memetakan kerukunan umat Bergama di Kabupaten Sumedang. Informasi kerukunan tersebut berdasarkan 3 (tiga) dimensi utama, yaitu dimensi toleransi, dimensi kesetaraan dan dimensi Kerjasama. Adapun rata-rata dari setiap dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.29
Skor tiap Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama
Kabupaten Sumedang

No	Dimensi	Skor
1	Toleransi	96,61
2	Kesetaraan	82,78
3	Kerjasama	33,40

1. Dimensi Toleransi didefinisikan sebagai sikap sebagai sikap kesediaan menerima dan menghargai, pada dimensi tolenransi hasil survey mendapatkan skor 96,61 dengan capaian ini menunjukkan tingkat toleransi sangat tinggi, masyarakat Kabupaten Sumedang bisa saling menghargai dan dapat menerima tetangga yang berbeda agama
2. Dimensi Kesetaraan terkait dengan pandangan dan sikap hidup terhadap pemeluk agama lain dalam urusan hak dan kewajiban. pada dimensi kesetaraan hasil survey mendapatkan skor 82,78, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sumedang beranggapan bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama
3. Dimensi Kerjasama merupakan bentuk nyata dari hubungan sosial antar pemeluk yang menggambarkan keterlibatan aktif individu bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati pada berbagai dimensi kehidupan. pada dimensi kerjasama hasil survey mendapatkan skor 33,40. Terjadi peningkatan yang signifikan pada dimensi kerjasama yang artinya kerjasama dalam paham keagamaan akan membawa pada rasa peduli dan saling tolong menolong, bahkan kerjasama dalam paham keagamaan akan membawa pada peningkatan dalam taraf pendidikan, dimana taraf pendidikan dapat berpengaruh terhadap sebuah kestaraan yang dilakukan secara kompak, searah dan sejalan.

Indeks Kerukunan Umat Beragama sangat dipengaruhi oleh Tingkat

Cipta Kondisi Kondusif Dan Tingkat Bina Demokratisasi dimana kedua indikator ini pada tahun 2023 dapat tercapai. berikut capaian indikator

1. Tingkat Cipta Kondisi Kondusif target tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 100%, Capaian 100%
2. Tingkat Bina Demokratisasi target tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 100%, Capaian 100%.

Beberapa Langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kerukunan umat beragama antara lain :

1. Workshop FKUB dengan para tokoh agama dalam Peningkatan Kewaspadaan, toleransi, kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama di Kabupaten Sumedang;
2. Kegiatan monitoring Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) hari-hari besar keagamaan Idul Fitri, Natal dan tahun baru untuk menjaga kondusifitas daerah dalam menjaga keamanan selama pelaksanaan kegiatan hari hari besar kegamaan dalam toleransi serta kesetaraan antar umat beragama;
3. Pelaksanaan kegiatan rutin penyelenggaraan Rakor Forkopimda, Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Penanganan Konflik Sosial adalah kegiatan yang menunjang kondusifitas di Daerah cegah dini, tangkal dini untuk mengantisipasi/menangani berbagai potensi konflik yang terjadi sehingga tidak terjadi/menimbulkan konflik di Kabupaten Sumedang;
4. Bintek Wawasan kebangsaan, kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental, kegiatan Bela Negara dan Kemah Pembauran kebangsaan adalah kegiatan yang menjaga kondusifitas daerah untuk memperkuat rasa kesatuan bangsa, nasionalisme, dan ideologi wawasan kebangsaan di kalangan pelajar, ras, suku, adat dan etnis di Kabupaten Sumedang;
5. Pendataan jumlah penduduk pemeluk agama dan pendataan tempat ibadah.
6. Mitigasi konflik dengan penguatan kerjasama dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak dan stakeholder.
7. Pemantauan orang asing beserta keluraganya sehingga memaksimalkan daya guna keberadaan Tenaga Kerja Asing dan memudahkan upaya deteksi danantisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan Orang

Asing di Kabupaten Sumedang.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja IKUB tahun 2023 adalah Rp. 33.718.890.566,00 yang terdiri dari 7 (tujuh) program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 31.067.342.143,00 atau 92,14%.

Tabel 3.30
Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja IKUB Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	225.000.000,00	213.449.100,00	94,87
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.996.289.610,00	5.876.649.510,00	99,79
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	330.000.000,00	322.080.000,00	97,60
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	325.000.000,00	322.080.000,00	94,38
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	6.038.297.400,00	3.654.308.830,00	96,62
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.302.898.780,00	3.296.571.980,00	99,81
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17.501.404.776,00	17.382.202.723,00	99,32
Jumlah	33.718.890.566,00	31.067.342.143,00	92,14

Sumber : Laporan Realsiasi Anggaran (LRA) Tahun 2023

Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja IKUB tahun 2023 sebesar Rp.2.651.548.423.00 dari anggaran Rp. 33.718.890.566,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 11,15%

Tabel 3.31
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
-------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------	------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	103,29%	92,14%	11,15%	Efisien

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama, yaitu :

1) Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Sasaran Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah Meningkatnya Pemahaman dan Penguatan Ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan dengan indikator kinerja program yaitu Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan target 40% dan realisasinya 40%, capaian kinerja 100%. Pelaksanaan program ini meliputi berbagai kegiatan yang menjadi pendukung ketercapaian kinerja IKUB, diantaranya :

- a. Penyelenggaraan Kemah Pembauran dengan tujuan meningkatkan kualitas dan solidaritas dalam Forum Pembauran Kebangsaan yang terdiri dari ras, suku, etnis dan agama di Kabupaten Sumedang.
- b. Peringatan hari Sumpah Pemuda dengan tujuan Membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda pemudi Indonesia dan seluruh rakyat, mengukuhkan dan mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu.
- c. Pelaksanaan Jambore Paskibraka dan Duta Pancasila dengan tujuan membangun karakter muda yang lebih memahami nilai-nilai luhur pancasila.
- d. Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang bertujuan membangun karakter Gugus Tugas GNRM di Kabupaten Sumedang sebagai upaya membangun dan mendorong pembangunan sumber daya manusia untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah.
- e. Bimbingan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan membentuk

pelajar dan kaum muda berjiwa NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju tanpa melupakan kebudayaan bangsa sendiri.

- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program ini meliputi berbagai kegiatan yang antara lain :
 - a. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan mitra kerja Pemerintah Daerah (Bakesbangpol) dengan parpol sehingga dengan sasaran dapat meningkatkan peran parpol dalam partisipasi masyarakat yang berdemokrasi dan tingginya rasa tertib administrasi dalam pelaporan.
 - b. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol dengan tujuan :
 - Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan parpol dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.
 - Meningkatnya pemahaman Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol kepada 8 pengurus partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sumedang.
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Pelaksanaan program ini dengan aktivitas utamanya yaitu pelaksanaan validasi ormas dengan tujuan membina dan mengawasi ormas yang berkategori aktif di Kabupaten Sumedang secara langsung/ tatap muka ke Sekretariat ormas di kabupaten Sumedang sehingga terciptanya akurasi data jumlah ormas yang dibina kategori aktif.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pelaksanaan program ini dengan aktivitas utamanya yaitu Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin yang bertujuan upaya Cegah dini, tangkal dini dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang akan mengganggu keamanan di wilayah kabupaten sumedang, serta membuka jaringan informasi dari tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan yang berkomunikasi dan koordinasi dengan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten .

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :
 - a. Pelaksanaan pemantauan orang asing dengan tujuan memantau segala aktivitas dan keberadaan Orang Asing di Kabupaten Sumedang yang bekerja di Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sumedang beserta keluraganya sehingga memaksimalkan daya guna keberadaan Tenaga Kerja Asing dan memudahkan upaya deteksi dan antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan Orang Asing di Kabupaten Sumedang.
 - b. Pelaksanaan Rakor Penanganan Konflik Sosial dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera serta meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. upaya penanganan terhadap berbagai ancaman yang akan mengganggu keamanan di wilayah Kabupaten Sumedang, serta membuka jaringan informasi dari tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan yang berkomunikasi dan koordinasi dengan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten.
 - c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Intelijen dengan tujuan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat memiliki kemajuan intelijensi sehingga bisa mempunyai jaringan yang bisa berbagi informasi secara akurat terhadap permasalahan/konflik yang kemungkinan akan terjadi.
6. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
7. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan indikator kinerja program yaitu persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Yng di tunjang oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan indikator

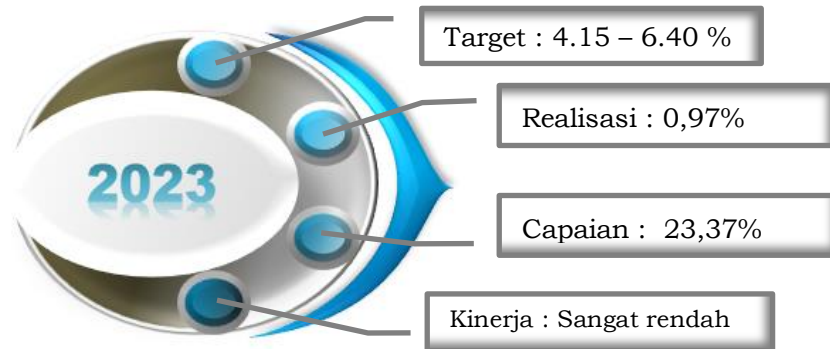
- kinerja persentase penyelesaian laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kewilayahan target 100% dan realisasinya 100%, capaian kinerja 100%;
- b. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Hukum dengan indikator kinerja yaitu persentase pelaksanaan fasilitasi perumusan produk hukum daerah, pelayanan dan penanganan urusan hukum, target 100% dan realisasinya 143,98%, capaian kinerja 143,98% ;
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi kebijakan kesejahteraan rakyat target 100 % dan realisasinya 154,55%, capaian kinerja 154,55% ;
 - d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan indikator kinerja yaitu Persentase penyelesaian hasil fasilitasi kerjasama daerah, target 100 % dan realisasinya 96.34%, capaian kinerja 96.34%.

8) LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Tingkat industri pengolahan dihitung dengan menggunakan indikator laju pertumbuhan sektor industri pengolahan, berikut capaian atas indikator laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dengan rumus perhitungan sebagai berikut $PDRB \text{ Industri } t-1 / PDRB \text{ Industri } t-1 \times 100 \%$.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Gambar 3.8
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Laju
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

Target kinerja Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan tahun 2023 sebesar 4.15 – 6.40 persen dan realisasinya 0,97% atau capaian kinerja sebesar 23,37% (kinerja sangat rendah).

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan seperti yang terdapat pada table berikut :

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	2,20 s.d 4,15	6,85	165%	4,15 s.d 6,40	0,97	23,37%	Realisasi dan Capaian Kinerja Menurun

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023 Perubahan, target jangka menengah Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan adalah 4,15-6,4% dan realisasi pada tahun 2023 adalah 0,97%, sehingga capaian kinerja jangka menengah Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada tahun terakhir RPJMD sebesar 23,37%.

Tabel 3.33

Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023
Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	4,15% - 6,40 %	0,97%	23,37%

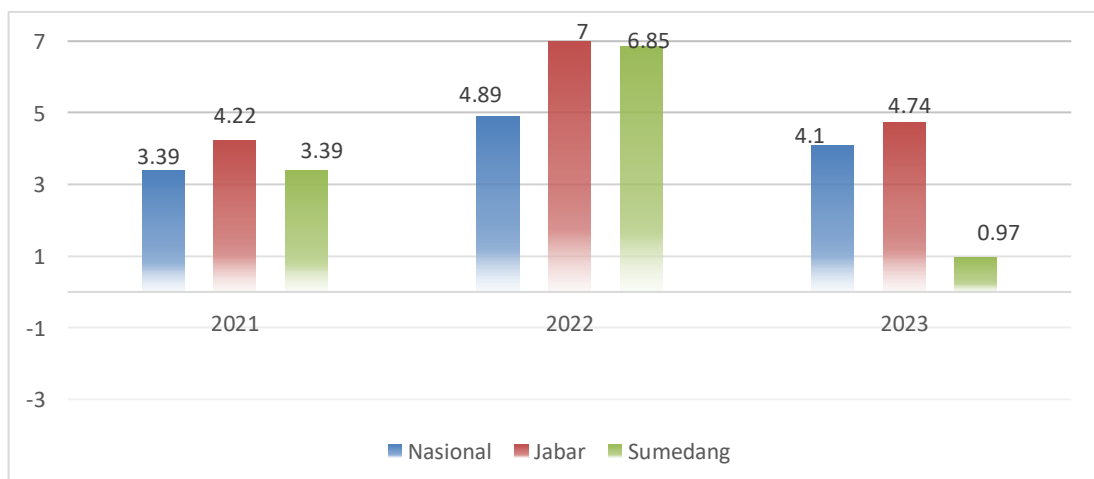
Sumber : RPJMD dan Data BPS Sumedang (diolah)

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi /Nasional

Pada tahun 2023, Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Sumedang lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat akan tetapi bisa diatas nasional,. Walaupun demikian, Pertumbuhan ekonomi Sumedang mampu meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022. Optimisme Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Sumedang akan meningkat lagi ditunjukkan dengan akan terbitnya peraturan daerah tentang RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten). Berikut merupakan perbandingan Laju pertumbuhan sector industry pengolahan Kabupaten Sumedang dengan Provinsi dan Nasional berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023.

Grafik 3.15

Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia



Sumber : BPS Kab. Sumedang (Diolah)

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab ketidakberhasilan target peningkatan Laju Pertumbuhan

Sektor Industri Pengolahan yaitu antara lain:

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah

1. Masih lemahnya daya saing IKM dalam hal pemasaran dan kualitas produk,
2. Dari hasil evaluasi terhadap IKM terdapat kelemahan pengelolaan manajemen keuangan dimana pengelolaan keuangan tidak di pisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan perusahaan. Sementara alternatif dan solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 :

1. Terbitnya kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung iklim usaha yang kondusif berupa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)
2. Peningkatan kompetensi pelaku IKM berupa pelatihan peningkatan pengolahan industry, pelatihan pengemasan dan lain-lain.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan tahun 2023 adalah Rp.920.000.000,00 yang terdiri dari satu program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.905.900.090,00 atau tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,47%.

Tabel 3.34
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	920.000.000,00	905.900.090,00	98,47
JUMLAH	920.000.000,00	905.900.090,00	98,47

Sumber : LRA DKUKMPP (diolah)

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan tahun 2023 tidak dapat dihitung dikarenakan capaian kinerja kurang dari 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan ditunjang oleh program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator kinerja

Persentase Pembangunan Kawasan Industri. Dengan target tahun 2023 sebesar 100% realisasi sebesar 98,47% dengan capaian 98,47. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan Peningkatan Unit Usaha Industri Baru sedangkan realisasi indikator kegiatan 98,47 keberhasilan/ketidak berhasilan kegiatan ini di sebabkan oleh Pelaku Usaha Industri Dimana dalam program tersebut dilaksanakannya Rapat Evaluasi Penyusunan Kajian Akademis Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Wilayah Khusus Tembakau (study Kelayakan).
- b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dengan sasaran Sub kegiatan Pelaku Usaha Industri sedangkan realisasi indikator kegiatan 97,33 keberhasilan/ketidak berhasilan kegiatan ini di sebabkan oleh Pelaku Usaha Industri Dimana dalam program tersebut dilaksanakannya Rapat Pembahasan Rancangan Penetapan Sentra Industri Hasil Tembakau.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan sasaran Sub kegiatan Pelaku Usaha Industri sedangkan realisasi indikator kegiatan 100 keberhasilan/ketidak berhasilan kegiatan ini di sebabkan oleh Pelaku Usaha Industri Dimana dalam program tersebut dilaksanakannya Koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

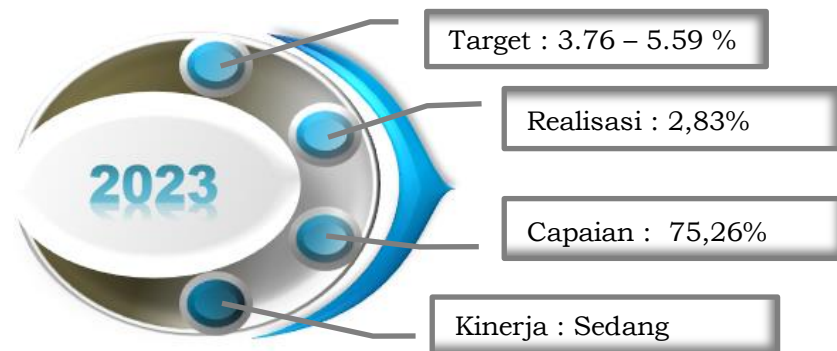
9) LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

Sektor pertanian kehutanan dan perikanan merupakan salah satu penggerak utama dalam pengembangan ekonomi rakyat di daerah. Kontribusi output sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisa dianggap tidak penting dalam perekonomian daerah. Banyak potensi yang dapat disumbangkan oleh sektor pertanian terhadap perekonomian suatu daerah, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan penduduk pedesaan, pemasok pangan nasional, penggerak ekspor non migas, pemasok

bahan baku industri dan sektor-sektor lainnya. Capaian indikator laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2023 sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Gambar 3.9
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

Target kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2023 sebesar 3.76-5.59 persen dan realisasinya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sebesar 2,83% atau capaian kinerja sebesar 75,26.% (kinerja sedang).

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Dibandingkan dengan tahun 2022 untuk laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,35% dari 4,14% pada tahun 2022 seperti yang tertera pada table berikut :

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatkannya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	3.45 s/d 5.28	4,18	100%	3.76 s/d 5.59	2,83	75,26%	Realisasi dan Capaian Kinerja Menurun

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah adalah 3,76 – 5,59 % dan realisasi pada tahun 2023 adalah 2,83 %, sehingga capaian kinerja jangka menengah pada tahun akhir RPJMD sebesar 75,26%.

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.76 - 5.59%	2,83%	75,26%

Sumber : RPJMD dan BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa faktor yang mendukung kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diantaranya adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.35
Faktor Pendukung Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
1	Jumlah produksi komoditas Tanaman Pangan :	Ton	691.957	651.629	94,17%	Sangat Tinggi
	<i>a. Padi</i>	<i>Ton</i>	<i>443.406</i>	<i>463.721</i>	<i>104,58 %</i>	Sangat Tinggi
	<i>b. Jagung</i>	<i>Ton</i>	<i>126.063</i>	<i>78.291</i>	<i>62,10%</i>	Rendah
	<i>c. Tanaman Pangan Lainnya</i>	<i>Ton</i>	<i>122.488</i>	<i>109.617</i>	<i>89,49%</i>	Tinggi
2	Jumlah Produksi komoditas Hortikultura	Ton	265.292	272.451	102,70%	Sangat Tinggi
3	Jumlah Produksi komoditas Perkebunan	Ton	8.075	7.261	89,92%	Tinggi
4	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.519,58	1.526,07 5	100,43	Sangat Tinggi
5	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	8.405,99	8.704,97	103,56	Sangat Tinggi

6	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Persen	5,18	2,60	50,19	Rendah
7	Persentase Wilayah yang Terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	80,80	96,15	119,00	Sangat Tinggi

Sumber : LKIP DPKP dan DPP Tahun 2023

1. Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan

Target kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan” tahun 2023 sebesar 691.957 ton dan realisasinya 651.629 ton atau capaian kinerja sebesar 94,17% terdiri dari Padi dengan target jumlah produksi sebesar 443.406 ton dan realisasinya 463.721 ton atau capaian kinerja sebesar 104,58%; Jagung dengan target jumlah produksi sebesar 126.063 ton dan realisasinya 78.291 ton atau capaian kinerja sebesar 62,10%; dan Tanaman Pangan Lainnya dengan target jumlah produksi sebesar 122.488 ton dan realisasinya 109.617 ton atau capaian kinerja sebesar 89,49%. Realisasi kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan” tahun 2023 untuk komoditas jagung dan tanaman pangan lainnya tidak mencapai target disebabkan oleh penurunan luas tanam jagung dikarenakan bencana elnino yang menyebabkan kekeringan pada lahan tegalan serta ketergantungan petani terhadap bantuan benih jagung dari pemerintah, ketergantungan ini disebabkan oleh harga benih jagung yang tinggi, menurunnya minat petani dalam usaha budidaya ubi kayu dikarenakan harga jual rendah, dan penurunan produktivitas dari komoditas tanaman pangan lainnya karena elnino. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain adalah melakukan penyuluhan, pengamatan dan pengendalian OPT serta bantuan stimulan benih dari pemerintah.

2. Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura

Target kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Hortikultura” tahun 2023 sebesar 265.292 ton dan realisasinya 272.451 ton atau capaian kinerja sebesar 102,70% (sumber data: Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan Desember 2023). Capaian tersebut merupakan hasil dari penanganan pembangunan pertanian yang difokuskan disentra komoditas hortikultura, penanganan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) disentra komoditas hortikultura, intensifikasi secara masif disentra komoditas hortikultura dan Ekstensifikasi disentra komoditas hortikultura serta keberhasilan program integrated farming

berbasis korporasi petani.

3. Jumlah Produksi komoditas Perkebunan

Target kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan” tahun 2023 sebesar 8.075 ton dan realisasinya 7.261 ton atau capaian kinerja sebesar 89,92% (sumber data: Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan Desember 2023). Realisasi kinerja 89,92% disebabkan oleh dampak perubahan iklim (DPI) dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), sehingga untuk komoditas tanaman semusim (tembakau) mengalami penurunan luas tanam dan komoditas tanaman tahunan mengalami penurunan produktivitasnya.

4. Produksi Perikanan Tangkap

Beberapa hal yang mendukung tercapainya realisasi produksi perikanan tangkap yaitu :

- a. Perairan Umum Daratan (PUD) selain Waduk Jatigede yang menjadi sarana utama, kini terdapat Waduk Sadawarna sebagai daerah penangkapan ikan yang baru ;
- b. Peningkatan Penebaran ikan di Waduk Jaigede dan Waduk Sadawarna untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap para penangkap ikan serta bantuan sarana penangkapan ikan.

5. Produksi Perikanan Budidaya

Beberapa hal yang mendukung tercapainya realisasi produksi perikanan Budidaya yaitu :

- a. Adanya dukungan dana / sarana budidaya ikan dari APBD Kabupaten, DBHCHT, dan Banprov serta APBN;
- b. Pelaksanaan pembinaan dari penyuluh perikanan dan UPTD wilayah;
- c. Pada tahun 2023 kondisi alam dengan cuaca yang sangat mendukung untuk pemijahan ikan menjadi salah satu faktor yang sangat menguntungkan bagi pembudidaya, dan penyakit ikan relatif berkurang saat kemarau;
- d. Penerapan inovasi budidaya ikan selain di kolam yaitu melalui budidaya ikan dalam ember, kolam terpal, bioflok.

6. Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan

Terjadinya penurunan produktivitas peternakan pada tahun 2023 di mulai dari menurunnya populasi ternak yang di akibatkan pada tahun 2023 terjadinya penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumphy Skin Disease (LSD) sehingga berdampak pada penurunan

produksi daging akibat menurunnya populasi ternak penghasil daging di wilayah Kab. Sumedang.

Adapun solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Perikanan dan Peternakan dengan melakukan upaya peningkatan populasi dengan peningkatan kelahiran sapi melalui program inseminasi buatan, peningkatan bantuan bibit ternak ke kelompok / masyarakat, pemeliharaan kesehatan hewan, manajemen budidaya ternak, penyediaan pakan ternak dan upaya peningkatan kesadaran kaum milenial untuk beternak, serta upaya untuk pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) untuk peningkatan produksi daging.

7. Persentase Wilayah yang Terkendali dari penyakit hewan menular strategis.

Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Perikanan dan Peternakan secara optimal melakukan intervensi terhadap pengendalian wilayah dari penyakit hewan menular strategis, Keberhasilan kinerja ini berkat kesigapan dan kualitas SDM Kesehatan Hewan (Dokter hewan dan Paramedik Veteriner) yang dimiliki Kabupaten Sumedang, suplai Obat-obatan dan Vaksin yang mencukupi dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi dan Pusat dalam penanganan penyakit hewan terutama untuk kasus / wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumphy Skin Disease (LSD), serta bantuan survailan / pengamatan penyakit hewan dari Balai Veteriner Wilayah Subang.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan sebesar Rp. 43.502.316.774,00 terdiri dari 8 (delapan) program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.42.318.492.248,00 atau capaian realisasi anggaran sebesar 97,28%.

Tabel 3.36
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	23.396.969.854,00	22.560.857.861,00	96,43
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.452.540.220,00	14.375.537.864,00	99,47

Program Perizinan Usaha Pertanian	10.000.000,00	6.165.000,00	61,65
Program Penyuluhan Pertanian	958.410.000,00	896.869.703	93,58
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	80.000.000,00	76.154.600,00	95,19
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.668.181.600,00	2.505.924.990,00	93,92
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	686.215.100,00	670.107.920,00	97,65
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.250.000.000,00	1.226.874.310,00	98,15
JUMLAH	43.502.316.774,00	42.318.492.248,00	97,28

Sumber : LRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan (diolah)

Capaian kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2023 sebesar 75,26%, dan realisasi anggaran program sebesar 98,27%, dengan demikian efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

Tabel 3.37
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) –(4)	(6)
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	75,26%	98,27%	-	Tidak efisien

e. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang capaian kinerja antara lain :

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan dengan indikator program Cakupan Ketersediaan Sarana Pertanian dengan target sebesar 70,07% dan realisasi 70,07 % atau capaian kinerja sebesar 100% dan inikator Cakupan Pengembangan Sarana Pertanian dengan target sebesar 29,93% dan realisasi 29,93% atau

capaian kinerja sebesar 100% di tunjang oleh kegiatan utama antara lain :

- Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja Persentase Penggunaan Sarana Pertanian yang diawasi, target kinerja sebesar 33%, realisasi 33%, capaian kinerja 100%.
- Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman yang dikelola, target kinerja 100% dengan Realisasi kinerja 100%, capaian kinerja 100%.

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

- a. Indikator kinerja program yang di ampu oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu Luas tambahan lahan pertanian yang terairi dengan target sebesar 2.088 Hektar dan realisasinya 2.088 hektar atau capaian kinerja sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan indikator kinerja jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan dengan target sebanyak 5 jenis dan realisasi 5 jenis atau capaian kinerja 100%.
- b. Indikator Kinerja program yang diampu oleh dinas Peternakan dan perikanan yaitu Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian tercapai 85,71% dari target 71,43%.

Keberhasilan indikator ini dikarenakan dari target Jumlah prasarana pertanian yang dibutuhkan (lahan kebun rumput, jalan usaha tani dan sumber2 air, AUTS, RPH / TPH, Pasar Hewan, Klinik Hewan / puskesmas / pos IB, data dan informasi peternakan) dapat terealisasi seluruhnya. Dan target jumlah prasarana pertanian yang tersedia dan dikembangkan (Lahan kebun rumput, AUTS, Pasar Hewan, Klinik Hewan / puskesmas / pos IB, data dan informasi peternakan) juga dapat terealisasi seluruhnya.

3) Program Perizinan Pertanian.

Indikator program Cakupan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.

4) Program Penyuluhan Pertanian

Indikator kinerja program Penyuluhan Pertanian adalah Persentase

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dengan target sebesar 27.73% dan realisasi 27.73%, capaian kinerja 100% . program ini di dukung oleh kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan target kinerja Jumlah penyuluhan pertanian yang dilaksanakan 307 Poktan dengan realisasi 307 Poktan atau 100%.

5) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator kinerja Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian 10% terealisasi 10% capaian kinerja 100%, dan indikator Cakupan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan target 95% terealisasi 95% capaian kinerja 100%. Program ini di dukung oleh kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sebesar 100% dengan realisasi 100%.

6) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan Target sebesar 100%. Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 95,96% atau capaian sebesar 95,96%. Hal ini dikarenakan potensi perairan umum berupa sungai, waduk, dan perairan umum lainnya belum dapat dikelola seluruhnya. Beberapa kendala yang dihadapi adalah terkait dengan penangkapan ikan merupakan hal yang baru terutama di Waduk Jatigede dengan kondisi sarana dan prasarana yang terbatas serta keterampilan para penangkap ikan masih terbatas. Potensi penangkapan ikan yang cukup besar, tetapi terjadi keterbatasan sarana, prasarana dan kemampuan penangkap ikan yang masih terbatas. Dan belum semua potensi perairan umum darat yang dapat dikelola dengan baik. Beberapa solusi atau rekomendasi untuk hal ini adalah mencari sumber pembiayaan lain selain APBD Kabupaten Sumedang untuk pembinaan dan pengawasan serta pemenuhan prasarana perairan umum agar dapat dikelola atau dimanfaatkan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, dan penebaran ikan di perairan umum untuk menjaga stok ikan tangkap di perairan umum.

7) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Indikator Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan target sebesar 100 persen. Capaian program ini adalah sebesar 98,09% (Kierja sangat tinggi). Program ini belum tercapai 100 persen hal ini dikarenakan potensi budidaya perikanan berupa Kolam Air Tenang, Mina Padi dan Kolam Air Deras belum dapat dikelola seluruhnya. Beberapa kendala yang dihadapi adalah diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dimana para pembudidaya merupakan generasi yang sudah tua, keterbatasan sarana dan prasarana pembudidaya, usaha yang dilakukan masih merupakan usaha sambilan sehingga dirasakan masih belum menguntungkan/ekonomis, keterbatasan permodalan. Beberapa alternatif/solusi adalah mendorong upaya kaum milenial untuk dapat tertarik pada usaha budidaya ikan, pemenuhan sarana dan prasarana budidaya, pemberdayaan kelompok pembudidaya ke arah korporasi, selain itu untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dapat dilakukan dengan upaya pengembangan lahan marginal untuk budidaya skala rumah tangga dengan budidaya ikan tidak di kolam konvensional, melainkan dapat dilakukan di kolam terpal, budidaya ikan dalam ember intergrasi dengan budidaya sayuran, pengembangan bioflock, dan pemanfaatan potensi mina padi untuk lahan sawah yang sumber airnya cukup tersedia sepanjang waktu.

8) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

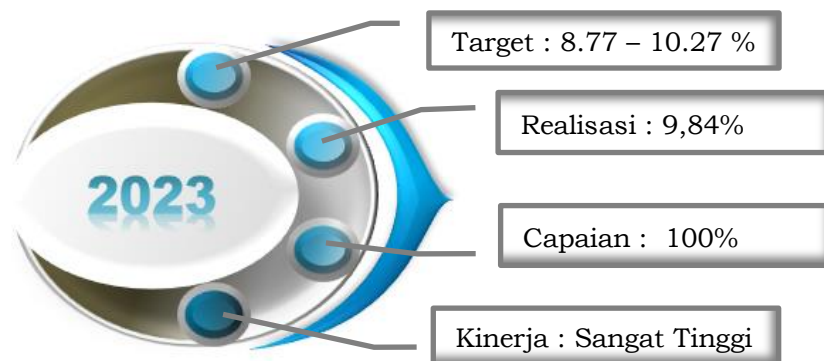
Indikator Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan target sebesar 100 persen. Capaian program ini adalah sebesar 100 persen, dimana dari unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang ada sebanyak 56 unit usaha dapat terbina. Upaya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk hasil budidaya maupun hasil tangkapan serta untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat. Peran Dinas Perikanan dan Peternakan, peran kelompok / unit pengolah dan pemasar, maupun penyuluh perikanan sangat menunjang keberhasilan program ini. Ke depan program ini masih harus ditingkatkan seiring dengan peningkatan produksi budidaya dan tangkap maupun seiring tuntutan peningkatan konsumsi ikan di masyarakat.

10) LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

Sektor akomodasi dan makan minum merupakan salah satu penggerak dalam pengembangan ekonomi baik skala nasional maupun skala daerah. Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisa dianggap tidak penting dalam perekonomian daerah. Banyak potensi yang dapat disumbangkan oleh sektor akomodasi dan makan minum terhadap perekonomian suatu daerah, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan penduduk sekitar tempat objek wisata, peningkatan sektor pajak perhotelan/penginapan. Capaian indikator laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum tahun 2023 di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Gambar 3.10
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023



Sumber : Bapppeda Kab. Sumedang

Target kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum tahun 2023 sebesar 8.77-10.27 persen dan realisasinya sebesar 9,84% atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sangat tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Laju Pertumbuhan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2023 mengalami kenaikan dan capaian kinerjanya mengalami peningkatan. Realisasi kinerja naik 5,28% dari tahun 2022.

Tabel 3.38
Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Tahun 2023 dengan
Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	Persen	4.50 s.d 6.01	4.56	100%	8.77 s.d 10.27	9,84	100%	Realisasi meningkat dan Capaian Kinerja tercapai

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023 Perubahan, target jangka menengah Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum adalah 8.77-10.27 Persen dan realisasi pada tahun 2023 adalah 9,84 Persen, sehingga capaian kinerja jangka menengah Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum pada tahun akhir RPJMD sebesar 100%.

Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2023 Dengan
Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023
Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	8.77-10.27	9,84	100%

Sumber :

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum pada tahun 2023 di tunjang dengan antara lain :

Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023 yang datang ke Kabupaten Sumedang mencapai 1.815.426 orang dari target 875.000 orang. Hal ini berarti jumlah kunjungan meningkat lebih dari 100 persen sama dengan jumlah wisatawan yang datang pada tahun 2022 dengan jumlah kunjungan 1.293.953 orang dari target 700.000 orang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kunjungan wisatawan, diantaranya:

1. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan kunjungan wisatawan sebesar kurang lebih 207% dimana hal tersebut terjadi karena pada tahun 2023 pariwisata nasional sudah mengalami kebangkitan pasca pandemi. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Sumedang ini disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya karena faktor aksesibilitas yang mudah dan cepat, serta faktor sarana prasarana di objek wisata yang terus meningkat. Kabupaten Sumedang telah terlewati oleh akses Jalan Tol Cisumdawu dimana terdapat 6 pintu masuk tol menuju Sumedang. Kehadiran Tol Cisumdawu ini, tentunya akan lebih mempercepat akses perjalanan para pengunjung untuk datang ke Sumedang. Perbaikan aksesibilitas oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang menuju atau sekitar tempat wisata di beberapa titik kawasan mendukung dalam mobilitas wisatawan.
2. Faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan wisatawan yaitu adanya objek wisata yang diresmikan seperti Menara Kujang Sapasang, dibukanya objek wisata Toga Hill dan beroperasi penuhnya Jatinangor *National Park*. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang melalui Bidang Pariwisata juga memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha dan pengelola objek agar meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata dalam rangka meningkatkan kepuasan wisatawan dan citra pariwisata agar informasi positif mengenai destinasi pariwisata disebarluaskan oleh wisatawan yang telah berkunjung.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum tahun 2023 adalah Rp. 2.235.000.000,00 yang terdiri dari 5 (lima) program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.164.341.668,00, penyerapan anggaran 96,83%.

Tabel 3.40
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Laju
Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengembangan Kebudayaan	950.000.000,00	926.891.650,00	97,57
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	225.000.000,00	224.787.000,00	99,91
Program Pengelolaan Permuseuman	50.000.000,00	49.400.000,00	98,40
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	361.313.600,00	317.010.800,00	87,74
Program Pemasaran Pariwisata	648.686.400,00	646.252.218,00	99,62
JUMLAH	2.235.000.000,00	2.164.341.668,00	96,83

Sumber : LRA Disparbudpora (diolah)

Capaian kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum tahun 2023 sebesar 100%, dan realisasi anggaran program sebesar 96,83%, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,17%.

Tabel 3.41
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	100%	96,83%	3,17%	Efisien

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Laju Petumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yaitu :

1) Program Pengembangan Kebudayaan, dengan Indikator Program yaitu Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dikembangkan dengan target sebesar 100 % dan realisasinya 100%. Capaian kinerja sangat baik dikarenakan telah terlaksananya kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota dengan target kinerja yaitu jumlah lembaga adat yang dibina yaitu sebanyak 11 Lembaga serta jumlah seni tradisi yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan sebanyak 25 objek.

Program ini didukung oleh kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan aktifitas antara lain :

- a. Dalam upaya perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya , Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang memiliki target capaian sub kegiatan 5 Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan. Pada tahun 2023 capaian hasil sebanyak 100 % dengan rincian aktivitas sebagai berikut : 1) Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya Daerah Hajat Uar, 2) Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya Daerah Larung (Jatigede), 3) Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya Daerah Mapag Jaroh (Cibugel), 4) Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya Daerah Mapag Sri (Jembarwangi), 5) Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya Daerah Mukharaman (Paniis Darmaraja), 6) Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya Daerah Ngahurip (Tanjungkerta), 7) Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya Daerah Ngarot (Karedok), 8) Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya Daerah Ngarumat Jagat (Situraja), 9) Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya Daerah Nguras Sumur Cikajayaan, Sumur Bandung, Sumur Kepuh (Ujungjaya), 10) Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya Daerah Tutup Buku (Sukamanah), 11) Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya Daerah Upacara Demang Cipaku (Darmaraja), 12) Gelar Tari Umbul Kolosal II (Pergeseran, Tari Umbul Karnaval SCTV , KODAM III Siliwangi, Hari Bhayangkara, Tari Persembahan, Binojakrama Padalangan, Penyambutan Tamu Kenegaraan, Peresmian Kujang

- Sapasang/Silat Siaga Puragabaya), 13) Pagelaran Wayang Golek Dalam Rangka Hari Jadi Sumedang, 14) Festival Seni Budaya Dalam Rangka Upacara Adat Ngalaksa, 15) Haol Cut Nyak Dhien.
- b. Dalam upaya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang memiliki target capaian sub kegiatan sebanyak 1 Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional yaitu dokumen Pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun 2023. Dalam rangka pemajuan kebudayaan dan penyusunan kebijakan strategis bidang kebudayaan di Kabupaten Sumedang maka perlu disusun Pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dimana Penyusunan pokok pikiran kabudayaan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Sumedang.

Dokumen PPKD merupakan dokumen penting kebudayaan yang wajib dimutakhirkan dalam kurun waktu 5 tahun sekali selama kepemimpinan bupati. Dokumen PPKD diharapkan mampu memberikan gambaran keberlangsungan hidup serta kondisi faktual kebudayaan di Kabupaten Sumedang sebagai bahan kajian dan bahan untuk penyusunan program serta kebijakan pemerintah di masa kepemimpinan yang akan datang.

2) Program Pengelolaan Permuseuman.

Indikator kinerja program yaitu jumlah kunjungan wisatawan museum dengan target 4,000 orang dan realisasinya 14,368 orang atau capaian kinerja sebesar 359.20%. Capaian kinerja melebihi target hal ini di dukung oleh telah dibukanya tol Cisumdawu yang mengakibatkan akses masuk ke Kabupaten Sumedang semakin mudah sehingga wisatawan-wisatawan baik dari luar daerah maupun dalam daerah lebih mudah menjangkau dan mengunjungi tempat-tempat.

Program ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota, kegiatan ini Dalam rangka meningkatkan akses

masyarakat Kabupaten Sumedang terhadap data koleksi yang dimiliki oleh Museum Prabu Geusan Ulun, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang mengadakan aktivitas pembuatan situs web yang dinamakan BINOKASIH.COM. Situs ini memuat beberapa koleksi benda-benda bersejarah yang dimiliki oleh Museum Prabu Geusan Ulun. Dengan diadakannya situs ini diharapkan bisa terpublikasikan ke masyarakat luas bukan hanya di Indonesia melainkan bisa sampai mancanegara sehingga dapat menggerakkan rasa keinginan untuk berkunjung ke Kabupaten Sumedang.

3) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata salah satunya melalui penguatan literasi dalam bentuk penyusunan buku dan pembinaan terhadap para kelompok sadar wisata dari 35 desa yang berpotensi sebagai desa wisata dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan implementasi sapta pesona.

Program ini terdiri dari kegiatan, antara lain :

a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan pelaksanaannya meliputi :

1. Penyusunan naskah literasi budaya bertujuan untuk menggambarkan dan menggali aspek-aspek budaya di Kabupaten Sumedang sebagai Puseur Budaya Sunda dalam bentuk narasi. Fungsi dari penyusunan naskah literasi budaya yaitu untuk menyusun kisah cerita yang berkembang dalam masyarakat sunda khususnya di Sumedang yang menjadi kearifan lokal disusun dalam sebuah naskah, agar menjadi sebuah story telling dalam pengembangan pariwisata, meningkatkan sinergisitas kekuatan nilai-nilai budaya dan agama, yang dapat memperkuat keberagaman daya tarik dan atraksi wisata budaya serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumedang. Kegiatan ini melibatkan Tim Penyusun dari Perguruan Tinggi Universitas Padjadjaran dan beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Sumedang. Penyusunan naskah tersebut dilanjutkan melalui swakelolaa antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dengan Yayasan Kyai Demang

Cipaku yang diwujudkan dalam sebuah buku Penguatan Sumedang Puseur Budaya Sunda/Puseur Sunda (sebagai Story Telling Sinergitas Budaya dan Agama/Religi). Buku tersebut sebanyak 120 eksemplar.

2. Penilaian Desa Wisata memiliki beberapa tujuan dalam mendukung pengembangan dan keberlanjutan desa wisata di Kabupaten Sumedang. Salah satunya yaitu Penilaian Desa Wisata memiliki beberapa fungsi yang penting dalam mendukung pengembangan dan keberlanjutan desa wisata. Melalui penilaian, dapat diidentifikasi potensi dan peluang yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, mendukung pembangunan ekonomi masyarakat lokal, dan menciptakan lapangan kerja baru. Penilaian desa wisata ini dilakukan oleh unsur yang terdiri dari Kepala Bidang Pariwisata, Praktisi bidang pariwisata, Dewan Kebudayaan Sumedang, Akademisi UPI Kampus Sumedang dan Tenaga ahli lainnya yang merupakan praktisi pariwisata dan pengelola objek wisata.
3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota adalah monitoring dan evaluasi dalam konteks objek daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Sumedang khususnya pada periode tertentu seperti menghadapi libur nasional dan libur panjang yang memiliki peran penting dalam pengelolaan destinasi wisata. Adapun fungsi utama dari monitoring dan evaluasi objek daya tarik wisata yaitu; 1) Memastikan bahwa kondisi fisik dan lingkungan objek daya tarik wisata tetap dalam keadaan yang baik; 2) Memastikan keselamatan pengunjung dan melindungi objek daya tarik dari potensi risiko; 3) Memastikan terjaganya tingkat kepuasan pengunjung terhadap objek daya tarik wisata dan efisiensi serta efektivitas manajemen operasional objek daya tarik wisata; dan 4) Memastikan bahwa objek daya tarik wisata mematuhi regulasi dan norma yang berlaku. Melalui proses monitoring dan evaluasi, pengelola destinasi wisata dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan pengalaman pengunjung, melindungi

lingkungan, dan mendukung keberlanjutan jangka panjang dari objek daya tarik wisata tersebut.

4. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dengan Universitas Pendidikan Indonesia tentang penyelenggaraan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Industri Pariwisata. Sebagaimana perjanjian kerjasama nomor 800/25/Disparbudpora dan No. 002/UN40/HK/2021 tanggal 21 Januari Tahun 2021. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Industri Pariwisata bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Sumedang, sehingga diperoleh sumber daya manusia bidang pariwisata yang profesional dalam rangka meningkatkan industri pariwisata di Kabupaten Sumedang. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun atau sama dengan 8 (delapan) semester, dimana pada tahun 2023 ini merupakan termasuk di anggaran tahun ke 3. Feedback dari para mahasiswa afirmasi ini adalah terlibat dalam kegiatan-kegiatan Disparbudpora khususnya Bidang Pariwisata seperti pendampingan desa wisata, pendataan usaha pariwisata dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan dan pemasaran Pariwisata Kabupaten Sumedang
- b. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota. dengan pelaksanaannya meliputi :
 1. Monitoring dan Evaluasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata ini secara garis besar merupakan kegiatan verifikasi administrasi Nomor Izin Berusaha melalui aplikasi OSS (*Online Single Submission*) para pelaku usaha pariwisata yang menjadi syarat utama ketertiban administrasi usahanya. Pelaku usaha pariwisata yang meliputi usaha objek daya tarik wisata, akomodasi dan café/restoran dipastikan mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Ini mencakup perizinan, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan sosial. Selain itu kegiatan dalam bentuk monitoring dan evaluasi ini memiliki tujuan khusus yaitu untuk memastikan para pengelola usaha pariwisata memiliki

kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata serta memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada wisatawan memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan. Dalam kegiatan monitoring juga Bidang Pariwisata menyampaikan informasi bagi pelaku Usaha Sektor Pariwisata yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha untuk dapat mendaftarkan usahanya dengan memiliki NIB dengan daftar mandiri ataupun melalui perangkat pemerintahan desa setempat.

2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Desa Wisata

Bidang Pariwisata Disparbudpora melaksanakan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Desa Wisata. Peserta bimtek ini merupakan unsur pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dengan narasumber mulai dari Unsur Pemda, Praktisi Pariwisata hingga Akademisi. Tujuan kegiatan ini diantaranya yaitu: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, meningkatkan peran aktif kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta meningkatkan tata kelola potensi daya tarik dan promosi desa wisata.

4) Program Pemasaran Pariwisata,

Program Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan yaitu Penguatan Promosi melalui media Cetak, Elektronik dan media lainnya baik dalam maupun luar negeri, event Hardfest 5 Jatigede dengan tema “Ubar Tahu Sumedang” dan ada beberapa destinasi yang terlibat dalam peliputan dari peserta *Smiling West Java (SWJ) Ambassador* yang berasal dari Sumedang atas kerjasama / kolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Program ini dilaksanakan melalui

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan aktifitas:
 - a. Pembayaran Artikel Promosi/Pemberitaan terkait dengan Lingkup pariwisata, Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, kepemudaan dan Olahraga Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang melalui Bidang Pariwisata bekerjasama dengan 12 (dua belas) media lokal Kabupaten Sumedang. Kerjasama ini dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023 dalam rangka mempromosikan dan menyebarluaskan informasi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Sumedang.

- b. Pembuatan kalender event pariwisata memiliki beberapa fungsi penting yang dapat memberikan manfaat baik bagi pelaku industri pariwisata, masyarakat lokal, maupun wisatawan. Kalender event pariwisata digunakan sebagai alat promosi dan pemasaran untuk menyoroti acara-acara khusus, festival, atau kegiatan lain yang ada di Kabupaten Sumedang selama satu tahun yang dapat menarik minat wisatawan. Dengan menunjukkan jadwal acara dan kegiatan pariwisata yang menarik, kalender event dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumedang. Acara-acara tersebut dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan yang berkunjung ke Sumedang.

2. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan aktifitas:

- a. **Pameran Pariwisata**

Pada bulan Maret 2023 Bidang Pariwisata melaksanakan Pameran Pariwisata dan Investasi di Provinsi Bali. Kegiatan ini sebagai platform untuk mempromosikan destinasi wisata di Sumedang ke masyarakat luas yang melibatkan pameran potensi pariwisata, atraksi wisata, aktivitas, dan keindahan alam yang dapat menarik perhatian wisatawan. Kegiatan ini juga membuka peluang bagi pelaku industri pariwisata untuk menjalin kemitraan bisnis, termasuk kerjasama dengan agen perjalanan, hotel, dan penyedia layanan lainnya. Selain itu, terdapat rangkaian kegiatan lain yang dilaksanakan seperti kunjungan ke Desa Wisata Panglipuran dan pertemuan dengan Badan Musyawarah Urang Sunda Bali dimana kegiatan tersebut dapat memperkuat hubungan antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan warga masyarakat Sumedang yang sekarang berdomisili di Bali.

b. Event Ulin Bareng Taman Hutan (Ubar Tahu)

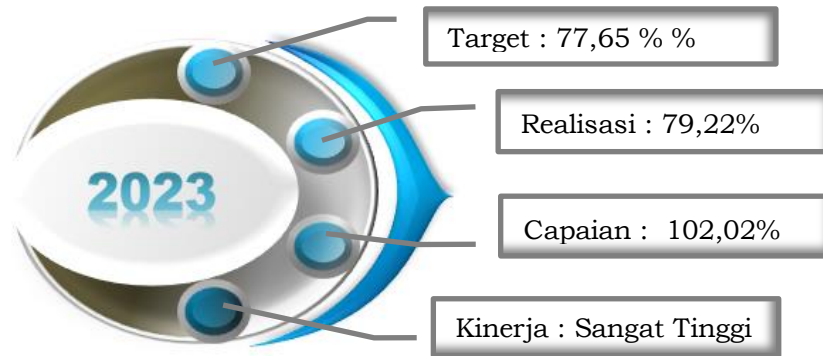
Kegiatan Ulin Bareng Taman Hutan (Ubar Tahu) Sumedang Tahun 2023 bertempat di Taman Seribu Cahaya diikuti oleh kurang lebih 1500 riders dari Jawa Barat. Kegiatan ini dibuka langsung oleh PJ Bupati Sumedang. Berharap di tahun selanjutnya kegiatan serupa dapat dilaksanakan lebih meriah dan bisa menjadi magnet untuk peserta maupun wisatawan untuk lebih meng-eksplora Jatigede dan tempat wisata Sumedang lainnya.

c. Stimulus Operasional Muhibah Budaya Ke Paris Perancis

Tujuan dari pengiriman delegasi kebudayaan Simpay Panaratas, adalah untuk memenuhi undangan kolaborasi musik dari grup kwintet tiup Le Concert Impromptu, Prancis, sehingga hubungan baik antara seniman Indonesia dan Prancis dapat tetap terjaga dengan baik. Secara rinci, manfaat pengiriman delegasi kebudayaan dari Kabupaten Sumedang ini adalah untuk; 1) Meningkatkan citra positif Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang di luar negeri; 2) Meningkatkan citra positif Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang, terutama citra seniman Sumedang dan segala kualitas karyanya di luar negeri; 3) Dapat dijadikan ajang promosi budaya dan pariwisata Kabupaten Sumedang di dunia internasional; 4) *Outcome* dari kegiatan ini adalah keuntungan kerjasama bidang kesenian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan pihak luar negeri di masa depan yang akan berdampak baik bagi kemajuan daerah Kabupaten Sumedang.

11) INDEKS KUALITAS INFRASTRUKTUR**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Gambar 3.11
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Indeks Kualitas Infrastruktur



Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

Target kinerja “Indeks Kualitas Infrastruktur” tahun 2023 sebesar 77,65 dan realisasinya sebesar 79,22 atau capaian kinerja sebesar 102,02% (kinerja Sangat tinggi). Target kinerja melebihi target.

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 20.633,40 Ha tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2022 karena berbeda Indikator.

Tabel 3.42
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Saran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	74,65	77,58	103,93%	77,65	79,22	102,02%	Capaian melebihi target

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Indeks Kualitas Infrastruktur adalah 77,65 poin dan realisasi pada tahun 2023 adalah 79,22 poin, dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Indeks Kualitas Infrastruktur pada tahun akhir RPJMD 2018-2023 adalah 102,02%.

Tabel 3.43
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023
Indeks Kualitas Infrastruktur	77,65	79,22	102,02%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya target Indeks Kualitas Infrastruktur di Kabupaten Sumedang adalah:

1. Peningkatan nilai kegiatan pemeliharaan rutin jalan;
2. Adanya kegiatan Unit Reaksi Cepat Tambal Lubang (URCTL);
3. Metode pengadaan barang jasa dalam pelaksanaan pekerjaan penanganan jalan (rekonstruksi/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan) Bidang Bina Marga menggunakan metode E-Katalog dimana pengadaan barang jasa dengan metode E-Katalog semua nilai anggaran hampir 100 % terserap berbeda dengan metode lelang biasa dimana selalu menyisakan sisa anggaran, serta lebih efektif dan efisien dalam proses percepatan PBJ berbeda dengan Metode Tender / Lelang biasa dimana membutuhkan proses waktu minimal 3 minggu dan selalu terjadi jumping / penawaran harga yang berlebihan atau dibawah kewajaran;
4. Dengan metode E-Katalog dalam pelaksanaan pekerjaan jalan, kewajiban pemeliharaan jalan menjadi 1 tahun berbeda dengan tender biasa dimana masa pemeliharaan pekerjaan hanya 6 Bulan.
5. Pelaksanaan Rehabilitasi dan atau Peningkatan Jaringan Irigasi sesuai skala prioritas, namun begitu tetap perlu adanya penambahan target pada Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan Luas Area yang terairi yaitu 336.19 Ha dan Peningkatan Jaringan irigasi dengan luas penanganan seluas 119.77 Ha sehingga Luas Area Irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2024 dapat tercapai menjadi 21.089,35 Ha ;
6. Pelaksanaan rehabilitasi/perbaiki kondisi bangunan air dan saluran guna mengembalikan fungsi layanan jaringan irigasi;
7. Pemutakhiran database lokasi jaringan irigasi serta daerah irigasi, namun demikian pemutakhiran ini dilakukan secara berkala ;

Kendala yang dihadapi :

1. Pengelolaan aset irigasi pada daerah irigasi yang tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi pelaksanaan pemeliharaan belum mencakup seluruh daerah irigasi, sedangkan
2. Untuk daerah irigasi yang tercantum pada Keputusan Bupati Sumedang No.611/Kep.345-DBMSDA/2015 belum optimal sehingga perlu adanya pengelolaan aset 1.543 daerah irigasi secara komprehensif.

Solusi yang telah dilakukan :

1. Penanganan rekonstruksi jalan Pada Tahun 2023 sepanjang 5,558 Km
2. Penanganan rehabilitasi jalan sepanjang 32,175 Km
3. Pemeliharaan rutin jalan Sepanjang 16,931 Km

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur di Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp. 182.003.439.118,00 yang terdiri dari 3 program, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 177.678.323.190,00 atau 97,62%.

Tabel 3.44
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Indeks Kualitas Infrastruktur Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Jalan	140.566.674.710,00	137.267.283.541,00	97,65
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	25,114,006,128.00	24.628.065.780,00	98.07
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	16.322.758.280,00	15.782.973.869,00	96,69
Jumlah Total	182.003.439.118,00	177.678.323.190,00	97,62

Sementara untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.45
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Indeks Kualitas Infrastruktur Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Indeks Kualitas Infrastruktur	102,02%	97,62%	4,4%	Efisien

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Jalan

Sasaran program Penyelenggaraan Jalan adalah meningkatnya kemampuan dan struktur jalan dan jembatan kabupaten dengan indikator kinerja program yaitu persentase tingkat kondisi jalan kabupaten yang baik dan sedang dengan target sebesar 85,3% dan realisasinya 88,24% atau capaian kinerja sebesar 103,45%. Capaian kinerja sangat baik dengan capaian melebihi target, adapun penyelenggaraan program ini yaitu melalui kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dengan sasaran kegiatan panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik dan sedang dengan target kinerja 660.739 Km sedangkan realisasi indikator kegiatan 685,133km' keberhasilan kegiatan ini di sebabkan oleh :

- a. Ketercapaian atas panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi sepanjang 5.558 Km dari target 1.608 Km;
- b. Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi jalan kabupaten sepanjang 32,175 km' dari yang ditargetkan 9,7 Km;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dengan panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin sepanjang 16.931 Km dari yang ditargetkan 100 Km;
- d. Pelaksanaan pembangunan jembatan sepanjang 84 Meter dari target sepanjang 84 meter;
- e. Pelaksanaan rehabilitasi jembatan sepanjang 94,5 Meter dari target sepanjang 94,5 meter.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Sasaran program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) adalah meningkatnya tingkat kondisi daerah irigasi baik dengan indikator kinerja program yaitu Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan target sebesar 47,50% dan realisasinya 47,68% atau capaian kinerja sebesar 100,38%. Capaian kinerja sangat baik dengan capaian melebihi target, adapun penyelenggaraan program ini yaitu melalui kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan Meningkatkan Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik. Keberhasilan kegiatan ini di sebabkan oleh :

- a. Meningkatnya jaringan irigasi permukaan dengan panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan sepanjang 4.220,97 meter ;
- b. Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan dengan panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi 13.704 meter.

3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Jalan tahun 2023 yaitu Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dengan target sebesar 64,96% dan realisasinya 55,66% atau capaian kinerja sebesar 86,68 %. Target kinerja tidak tercapai. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak tercapainya indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan alokasi penempatan titik lokasi rambu sehingga terjadi perubahan spesifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemasangan rambu sebagai akibat adanya rekayasa lalu lintas di wilayah sumedang kota.
- b. Perubahan spesifikasi jenis lampu yang semula jenis Pijar beralih ke jenis Hemat Energi/LED dan pelaksanaan meterisasi Kwh meter untuk pengadaan dan Pemasangan PJU/PJL dengan Rujukan Teknis Spesifikasi mengacu pada PM no.27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.
- c. Kurangnya pengasawan dan tindak tegas terhadap pelaku kegiatan vandalisme terhadap beberapa fasilitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang pada beberapa ruas jalan sehingga

- sering kali terjadi kehilangan dan kerusakan fasilitas perlengkapan jalan.
- d. Alokasi pendanaan terhadap pemenuhan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan belum sesuai dengan jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai.
 - e. Masih minimnya dukungan kebijakan daerah terkait dokumen penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan diantaranya belum dimilikinya dokumen Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan Jalan, Belum optimalnya Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) yang belum diupdate sesuai dengan kondisi saat ini, Kurangnya sosialisasi dan kesadaran memperbarui kepemilikan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
 - f. Dalam hal teknis dan pengembangan transportasi belum optimalnya digunakan teknologi yang berbasis IT dalam hal teknis perhubungan.
 - g. Belum optimalnya kinerja layanan angkutan dikarenakan regulasi/kebijakan belum mendukung rekayasa jaringan trayek agar diperbarui sesuai kondisi saat ini dikarenakan jaringan trayek yang ada saat ini belum dapat memfasilitasi interkoneksi antar moda dan antar wilayah.
 - h. Belum dimilikinya terminal bongkar muat angkutan barang dan kondisi terminal yang sudah ada yaitu terminal tipe c belum dilakukan reposisi dan rehabilitasi sehingga tidak memadai untuk menjadi tempat pemberhentian angkutan yang menjadi fasilitas umum.
 - i. Dalam hal manajemen kinerja, masih terbatasnya kapasitas SDM berbasis perencanaan transportasi agar dapat mengoptimalkan kinerja tiap bidang dan perencanaan.

12) INDEKS KETAHANAN DAERAH

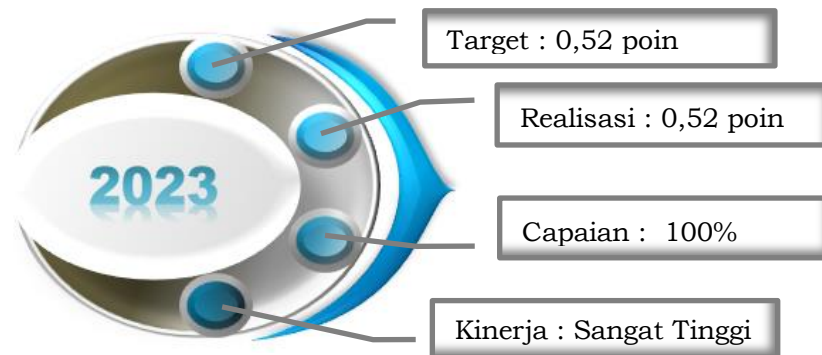
Penilaian indeks ketahanan daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana. Hal ini juga berpengaruh pada nilai

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), karena hasil dari IKD menjadi salah satu perhitungan dalam IRBI. Semakin tinggi nilai IKD, makin tinggi pula kapasitas yang dimiliki sebuah daerah dan otomatis menekan skor IRBI.

Berdasarkan kepentingan tersebut maka Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Gambar 3.12
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2023



Sumber : Tool BPBD Provinsi Jawa Barat

Target kinerja “Indeks Ketahanan Daerah” tahun 2023 sebesar 0,52 poin dan realisasinya berdasarkan data dari Bappppeda Kabupaten Sumedang adalah 0,52 poin atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sangat tinggi) dan target kinerja tercapai.

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 realisasi indeks ketahanan daerah 0,49 poin dan pada tahun 2023 naik menjadi 0,52 poin, terdapatkenaikan sebesar 0,03 poin.

Tabel 3.46
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana	Poin	0,49	0,49	100%	0,52	0,52	100%	Realisasi dan Capaian Kinerja Meningkat

									at
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Sumber : Tool BPBD Provinsi Jawa Barat

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023 Perubahan, target jangka menengah Indeks Ketahanan Daerah adalah 0,52 poin sehingga bila dibandingkan antara realisasi pada tahun 2023 maka capaian kinerja bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 100%.

Tabel 3.47
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023
Indeks Ketahanan Daerah	0,52 poin	0,52 poin	100%

Sumber : RPJMD dan tool BPBD Provinsi Jawa Barat diolah

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Yang menjadi dasar perhitungan Indeks Ketahanan Daerah yaitu capaian atas Persentase Penanganan Pra Bencana, Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana, dan Persentase Penanganan Bencana, yang di laporkan ke BPBD Provinsi Jawa Barat. Dari ketiga capaian tersebut maka akan dijadikan Analisa Indikator Kinerja Daerah.

Tabel 3.48
Hasil Analisa Indikator Kinerja Daerah Kab. Sumedang Tahun 2023

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.61	0.52	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.90		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.47		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.52		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.43		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.51		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.31		

Sumber : Tool BPBD Prov. Jawa Barat

Tabel 3.49
Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah
Kab. Sumedang Tahun 2023

NO.	PRIORITAS	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
1	INDEKS PRIORITAS	0.90	0.47	0.52	0.43	0.43	0.51	0.31
2	INDEKS KAPASITAS DAERAH	0.52						

Sumber : Tool BPBD Prov. Jawa Barat

Berdasarkan tabel 3.5 Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Sumedang Tahun 2023 diatas, bahwa nilai Indeks Kapasitas Daerah sebesar 0.52 poin dengan **TINGKAT KAPASITAS DAERAH SEDANG** yang diukur melalui 7 Indeks Prioritas, sebagai berikut :

- 1) Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan sebesar 0.90 poin;
- 2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu sebesar 0.47 poin;
- 3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik sebesar 0.52 poin;
- 4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana sebesar 0.43 poin;
- 5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana sebesar 0.43 poin;

- 6) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana sebesar 0.51 poin;
- 7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana sebesar 0.31 poin.

Keberhasilan capaian kinerja Indeks Ketahanan Daerah di pengaruhi oleh faktor berikut, antara lain :

- 1) Telah tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen KRB;
- 2) Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana;
- 3) Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen RPB;
- 4) Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi;
- 5) Terlatihnya aparatur yang menangani sub urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana pada Penguatan Kelembagaan, Pembentukan Destana dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan;
- 6) Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 7) Penyediaan peralatan perlindungan terhadap bencana untuk warga;
- 8) Pelaksanaan Quick Respon dapat teralaksana dengan baik dari 140 kejadian seluruhnya dapat terespon dengan cepat;
- 9) Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana;
- 10) Pelaksanaan pemberian layanan pencarian, peretolongan, evakuasi korban bencana dapat di realisasikan seluruhnya (capaian 100%)
- 11) Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Indeks Risiko Bencana tahun 2023 adalah Rp. 9.501.664.290,00 yang terdiri dari 4 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 9.371.797.747,00 atau 98,63%.

Tabel 3.50 Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penanggulangan Bencana	3.812.562.200,00	3.748.535.679,00	98,32
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.677.973.000,00	3.672.591.720,00	99,85
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.250.000.000,00	1.226.874.310,00	98,15
Program Penanganan Bencana	761.129.090,00	723.796.038,00	95,10
Jumlah	9.501.664.290,00	9.371.797.747,00	98,63

Capaian kinerja Indeks Ketahanan Daerah tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi anggaran program sebesar 98,63%, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14,76%.

Tabel 3.51
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Daerah	100%	98,63%	1,37%	Efisien

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Daerah, yaitu:

1) Program Penanggulangan Bencana

Sasaran program Penanggulangan Bencana yang di ampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang adalah

- a. Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan indikator kinerja program yaitu Persentase Penanganan Pra-Bencana dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Peningkatan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana dengan indikator kinerja program yaitu Persentase Penanganan Tanggap

Darurat Bencana dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.

- c. Peningkatan Pelayanan Pasca Bencana Melalui Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan indikator kinerja program yaitu Persentase Penanganan Pasca Bencana dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.

2) Program Penanganan Bencana yaitu :

Sasaran program Penanganan Bencana yang di ampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang adalah Terpenuhinya Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana Alam dengan indikator kinerja program yaitu Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang diberi bantuan Sosial kebutuhan Dasar dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.

Faktor pendukung keberhasilan antara lain :

- a. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Korban yang terdampak bencana:
- b. Terpenuhinya penyediaan tempat penampungan pengungsi
- c. Terpenuhinya Penyediaan Permakanan
- d. Terpenuhinya pelayanan dukungan psikososial

3) Program Pencegahan, Penanganan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Sasaran program Pencegahan, Penanganan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang di ampu oleh SATPOLPP Kabupaten Sumedang adalah Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran kepada Masyarakat dengan indikator kinerja program yaitu Tingkat Waktu Tanggap (response time) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), target kinerja sebesar 95% dan realisasinya 89,83% atau capaian kinerja sebesar 94,65%. Capaian kinerja sangat baik;

4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian memiliki 2 target capaian kinerja yaitu:

- a. Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian dengan target kinerja 10% dan realisasi 10%, capaian kinerja 100% dan
- b. Cakupan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan target 95% dan realisasi kinerja 95%, capaian kinerja 100%.

Adapun penyelenggaraan program ini yaitu melalui kegiatan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dengan target kinerja Presentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sedangkan realisasi indikator kegiatan 100% keberhasilan kegiatan ini di sebabkan oleh :

- Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program pengendalian dan penanggulangan bencana.
- Kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta.
- Penerapan penyuluhan berkelanjutan melalui evaluasi menyeluruh terhadap respons terhadap bencana pertanian, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil, sehingga membantu meningkatkan kapasitas Petani dalam Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

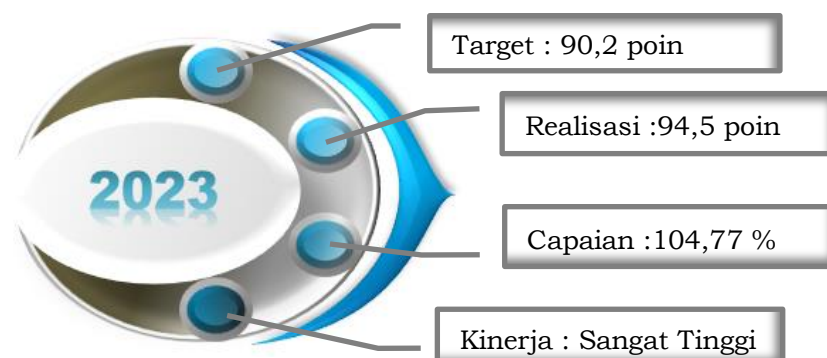
13) SKOR POLA PANGAN HARAPAN

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja Skor Pola Pangan Harapan tahun 2023 sebesar 90,2 poin dan realisasinya berdasarkan data hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Sumedang sebesar 94,5 poin atau capaian kinerja sebesar 104,77% (kinerja sangat tinggi). Capaian melebihi target.

Gambar 3.13
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023



Sumber : Badan Pangan Nasional

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2023 mengalami peningkatan 7,67 poin.

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89,40	87,10	97,43%	90,2	94,5	104,77%	Realisasi dan Capaian Kinerja Menurun

Sumber: Sumber : Badan Pangan Nasional (diolah)

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

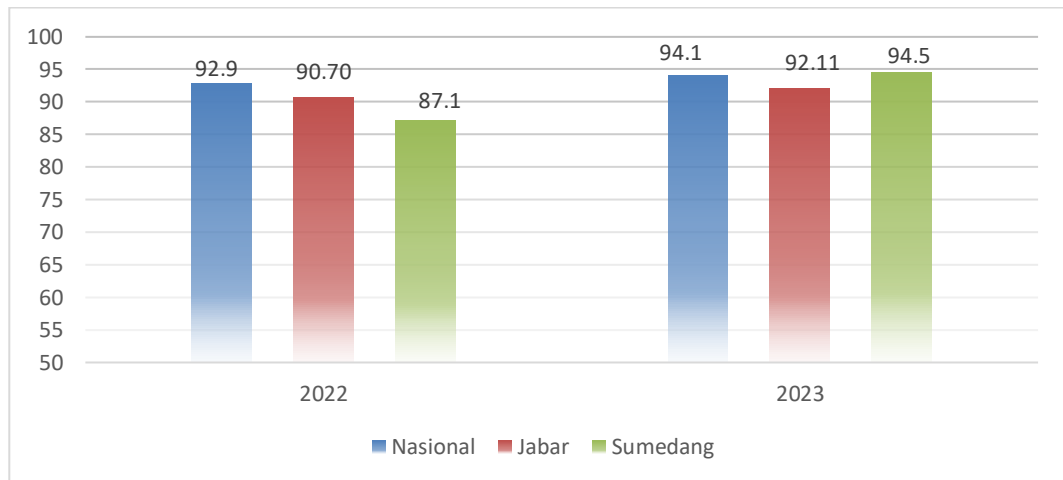
Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah adalah 90,2 poin dan realisasi pada tahun 2023 adalah 94,5 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah Skor Pola Pangan Harapan pada tahun ke empat RPJMD sebesar 104,77%.

Tabel 3.53
Perbandingan Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023
Skor Pola Pangan Harapan	90,2 poin	94,5Poin	104,77%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realiasi Kinerja Provinsi/Nasional

Grafik 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realiasi Kinerja Provinsi/Nasional



Sumber : Badan Pangan Nasional

Dari garfik data di atas diketahui skor pola pangan harapan Kabupaten Sumedang untuk tahun 2022 berada di bawah capaian skor pola pangan harapan Nasional dan Provinsi, akan tetapi pada 2023 capaian skor pola pangan harapan Kabupaten Sumedang bisa melampaui skor pola pangan harapan rata-rata Nasional maupun rata-rata Jawa Barat, dengan perbandingan sebesar 0,4 poin dengan tingkat Nasional, dan 2,39 poin dengan rata-rata Jawa Barat.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa hambatan yang dihadapi adalah adanya keterbatasan dalam penyediaan/pengadaan cadangan pangan pemerintah. Kenaikan konsumsi beras terjadi karena meningkatnya laju produksi padi di Kabupaten Sumedang dan semua pemanfaatan lahan pada prioritas komoditi pajale, sehingga produksi komoditi kelompok pangan lainnya belum begitu optimal, hal ini diprediksi berpengaruh terhadap konsumsi karbohidrat (beras), sehingga tidak tersedianya lahan untuk penanaman tanaman diluar padi, karena lahan yang ada dimanfaatkan untuk program pemerintah Pajale (Padi, Jagung, Kedelai). Sedangkan lahan pekarangan belum dimanfaatkan dengan optimal. Tidak seluruh kecamatan mengajukan desa yang termasuk kategori miskin tinggi (rawan pangan) untuk mendapatkan intervensi/penanganan rawan pangan. Alokasi intervensi/penanganan desa rawan pangan tidak tepat berada di lokasi desa yang termasuk kategori miskin tinggi. Sedangkan ancamannya adalah situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan di dalam negeri termasuk Kabupaten Sumedang, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis

mempengaruhi ketersediaan pangan.

Adapun strategi untuk mendukung pengembangan sektor ketahanan pangan adalah mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat, Meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, Menerapkan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan good agriculture practices (GAP), Peningkatan penggunaan benih unggul dan bermutu, penetapan standar baku budidaya dan pemanfaatan faktor-faktor produksi dengan, Meningkatkan kemandirian pengendalian hama terpadu, Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam, prasarana dan sarana pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan petani, Meningkatkan mutu produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia).

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Skor Pola Pangan Harapan tahun 2023 adalah Rp.2.057.911.000,00 yang terdiri dari program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.1.974.144.857,00 atau 95,93%.

Tabel 3.54

Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	400.000.000,00	375.185.300,00	93,80
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.307.910.750	1.259.728.757,00	96,32
Program Pengawasan Keamanan Pangan	100.000.250,00	99.130.800,00	99,13
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	250.000.000,00	240.100.000,00	96,04
Jumlah	2.057.911.000,00	1.974.144.857,00	95,93

Sumber : LRA DPKP dan DKUKMPP (diolah)

Capaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan tahun 2023 sebesar

104,77% dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,84%.

Tabel 3.55
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	104,77%	95,93%	8,84%	Efisien

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang indikator Skor Pola Pangan Harapan, yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.

Sasaran program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan yang di ampu oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang adalah Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Indikator kinerja program yaitu Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Yang Dikelola dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. adapun penyelenggaraan program ini yaitu melalui kegiatan Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan Tersedianya Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan dengan indikator kinerja jumlah infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang tersedia yang memiliki target sebanyak 24 unit dan realisasinya 24 unit, capaian kinerja sebesar 100%.

- 2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Sasaran program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang di ampu oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang adalah Meningkatkan Ketersediaan

Energi dan Protein per kapita Indikator kinerja program yaitu Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita dengan target sebesar 95% dan realisasinya 95% atau capaian kinerja sebesar 100%. Penyelenggaraan program ini yaitu melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan dengan sasaran kegiatan Tersedianya Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan dengan sasaran kegiatan Terkendalinya Coefficient off Varians (CV) harga pangan pokok di tingkat konsumen dan indikator kinerja Coefficient off Varians (CV) maksimum harga pangan pokok di tingkat konsumen. Faktor-faktor keberhasilan program dan kegiatan tersebut antara lain tersedianya informasi harga pangan dan neraca bahan makanan, terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi dengan sasaran kegiatan Meningkatkan Tingkat Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dan indikator kegiatannya Persentase Tingkat Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, realisasi indikator sasaran kinerja sebesar 95% dari target 95%, target tercapai, Faktor-faktor keberhasilan program dan kegiatan tersebut antara lain :
 - tersedianya informasi harga pangan dan neraca bahan makanan, terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan.
 - Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

3) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Sasaran program Pengawasan Keamanan Pangan yang di ampu oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang adalah Terawasinya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Indikator kinerja program yaitu Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dengan target

sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Penyelenggaraan program ini yaitu melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan, Faktor-faktor keberhasilan program dan kegiatan tersebut antara lain :

- Dilaksanakannya Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar.
- Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

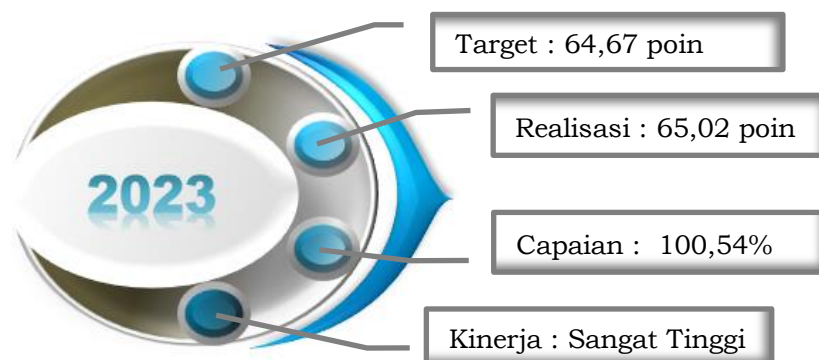
4) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Indikator kinerja Program yaitu Presentase Pengawasan dan Pengendalian Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting dengan capaian kinerja sebesar 100%.

14) INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Gambar 3.14
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023



Sumber : DLHK Kab. Sumedang

Target kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” tahun 2023 sebesar 71,8 poin dan realisasinya berdasarkan data hasil pengujian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang yang bekerja sama

dengan Laboratorium Lingkungan Hidup yang berakreditasi terhadap tingkat pencemaran air sungai dan udara ambient serta data tutupan lahan hasil pencitraan Kenetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didapatkan angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang sebesar 65,02 poin atau capaian kinerja sebesar 90,55%. Kinerja tinggi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang sebesar termasuk kriteria “SEDANG”. Poin tersebut merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air Sungai (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) IKTL. Perhitungan dengan rumus baru sebagaimana Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LH Nomor : S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH untuk tahun 2020-2024, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKLH} = (0,367 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKTL})$$

Dengan kriteria Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.56
Kriteria IKLH

No	Nilai/Skor	Kriteria
1	90-100	Sangat Baik
2	70 – 89,9	Baik
3	50 – 69,9	Sedang
4	25 – 49,9	Buruk
5	0 – 24,9	Sangat Buruk

Pada tahun 2023 perhitungan IKLH dilakukan melalui aplikasi IKLH yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana Kabupaten/Kota dan Provinsi hanya menginput data hasil pengujian kualitas air, udara dan data tutupan lahan melalui link <https://ppkl.menlhk.go.id>.

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja IKLH mengalami kenaikan. Realisasi IKLH naik 1,67 poin.

Tabel 3.57
Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2023
dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	71,10	63,35	89,10%	71,8	65,02	90,55%	Realisasi meningkat dan Capaian Kinerja Menurun

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target di tahun akhir jangka menengah IKLH adalah 71,8 poin dan realisasi pada tahun 2023 adalah 65,02 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah IKLH pada tahun akhir RPJMD sebesar 90,55%.

Tabel 3.58
Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,8 poin	65,02 poin	90,56%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan. dengan hasil sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air

Parameter yang digunakan untuk mengukur IKA adalah TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform. Pengambilan sampel dan pengujian kualitas air dilakukan pada air sungai. Pengambilan sampel kualitas air (sungai) di Kabupaten Sumedang dilakukan di 7 (tujuh) lokasi sungai, yaitu sungai Cikeruh, Citarik, Cikijing, Cimande, Cigarut, Cipeles, dan Cimanuk. IKA diperoleh dari hasil perhitungan Aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan cara input data parameter hasil uji laboratorium lingkungan hidup yang

terakreditasi. Target Indikator Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2023 yaitu 4,89 poin, dengan realisasi 46,92 poin

Fluktuasi dan belum tercapainya kinerja indikator Indeks Kualitas Air terjadi karena :

- a. Kualitas air sangat dipengaruhi oleh aktifitas sosial ekonomi di Daerah Aliran Sungai (DAS).
- b. Belum optimalnya sosialisasi dan pengawasan lingkungan.
- c. Jumlah titik pantau pengujian kualitas air sangat terbatas.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) diperoleh dari hasil pengujian laboratorium terhadap 2 (dua) parameter yaitu NO₂ yang menunjukkan kandungan pencemaran dari bahan bakar bensin dan SO₂ yang menunjukkan kandungan pencemaran dari bahan bakar solar.

Target Indikator Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 yaitu 81,29 poin, dengan realisasi 86,29 poin, atau capaian kinerja 106,15%.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Nilai IKTL diperoleh dari hasil perhitungan Aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan cara input data parameter hasil uji laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi. Target Indikator Nilai IKTL Tahun 2023 yaitu 61.04 poin, dengan realisasi 56,75 poin, atau capaian kinerja sebesar 92,97%. Dibandingkan dengan tahun 2022 yang capaian kinerjanya mengalami penurunan.

Penurunan capaian kinerja indikator IKTL disebabkan oleh keterbatasan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan peningkatan alih fungsi lahan.

- a) Ruang lingkup pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumedang hanya Gn. Kunci dan Gn. Palasari;
- b) Luas tutupan lahan hijau kewenangan Kabupaten Sumedang naik, akan tetapi luas tutupan lahan dalam lingkup kewenangan Provinsi dan kementerian LHK menurun;
- c) Terdapat alih fungsi lahan pada RTH privat dan publik kewenangan Provinsi untuk dijadikan area permukiman.

Solusi yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja IKTL adalah merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan pengelolaan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di lingkup kabupaten, merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan, izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan pengelolaan taman keanekaragaman hayati dan pengelolaan Taman Hutan Raya di wilayah kabupaten, meningkatkan kualitas RTH dan keanekaragaman hayati lainnya.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja IKLH tahun 2023 adalah Rp.11.553.661.950,00 yang terdiri dari 8 program utama. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.11.152.235.541,00 atau tingkat penyerapan anggaran 96,53%.

Tabel 3.59
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja IKLH
Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	230.000.000,00	194.152.000,00	84,41
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	60.000.000,00	58.608.343,00	97,68
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	857.000.000,00	666.232.916,00	77,74
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	30.000.000,00	30.000.000,00	100
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	22.500.000,00	5.690.000,00	25,29
Program Pengelolaan Persampahan	4.671.661.950,00	4.616.908.783,00	98,83
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.622.500.000,00	5.520.826.219,00	98,19

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	60.000.000,00	59.817.280,00	99,70
Jumlah Total	11.553.661.950,00	11.152.235.541,00	96,53

Capaian kinerja IKLH tahun 2023 sebesar 90,56% dan realisasi anggaran program sebesar 96,53%, dengan demikian efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

Tabel 3.60
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	89,10%	98,06%	-	Tidak Efisien

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu:

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Indikator kinerja program yaitu Jumlah Instrumen dan/atau rujukan Perencanaan Lingkungan Hidup dengan target 2 dokumen dan realisasinya 2 dokumen atau capaian kinerja sebesar 100%.

2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan.

Indikator kinerja program yaitu Persentase tindakan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

Indikator kinerja program yaitu indeks tutupan vegetasi (ITV) dengan target sebesar 0,41 poin dan realisasinya sebesar 0,41 poin atau capaian kinerja sebesar 100 %.

4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Indikator kinerja Program yaitu Persentase usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten dengan target sebesar 36% dan realisasinya 36% atau capaian kinerja sebesar 100%.

5) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Indikator kinerja Program yaitu Persentase penyelesaian sengketa PPLH dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. kegiatan tersebut bersifat situasional tergantung kepada pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jika dilihat dari indeks kualitas pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan seperti sudah lebih baik sehingga pengaduan menjadi lebih berkurang.

6) Program Pengelolaan Persampahan.

Indikator kinerja Program Pengelolaan Persampahan tahun 2023 yaitu Persentase Pengelolaan Sampah dengan target sebesar 99% terdiri dari: Persentase Penanganan Sampah sebesar 72% dan Persentase Pengurangan Sampah sebesar 27%. Realisasi Persentase Penanganan Sampah sebesar 30,17%, realisasi Persentase Pengurangan Sampah sebesar 5,24%. Capaian indikator Persentase Pengelolaan Sampah sebesar 35,41%. Capaian Kinerja 35,8%.

7) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Indikator kinerja program yaitu Indeks Tutupan vegetasi (ITV) dengan target 0,42 poin dan realisasinya 0,42 poin, capaian kinerja 100%. Target tercapai. Indikator kinerja ditunjang dengan Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

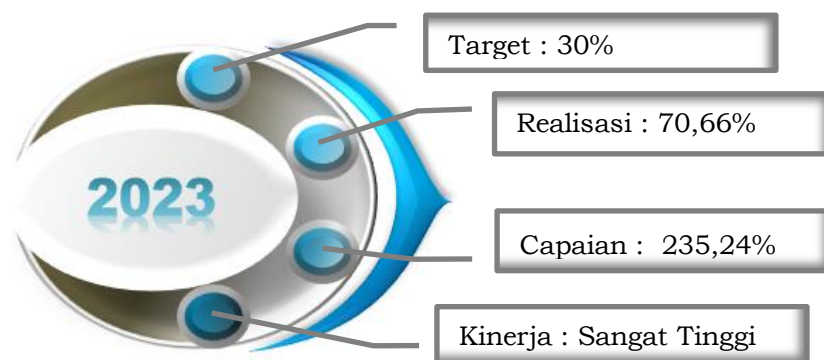
8) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Indikator kinerja Program yaitu Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik diperkotaan dengan target sebesar 19,11% dan realisasinya 19,11% atau capaian kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja ditunjang dengan Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.

Penanaman Modal atau Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Data realisasi investasi diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan investor secara berkala. Laporan Kegiatan Penanaman Modal merupakan jenis laporan keuangan yang wajib dipersiapkan bagi investor yang tengah menjalankan kegiatan usaha.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Gambar 3.15
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2023



Sumber : Data Penanaman Modal DPMPSTSP Kabupaten Sumedang

Target kinerja “Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang” tahun 2023 sebesar 30% dari data awal Rp.1.927.390.608.000,00 atau sebesar Rp.578.217.182.400,00 dengan begitu diharapkan pada tahun 2023 realisasi investasi di Kabupaten Sumedang sebesar Rp.2.505.607.790.400,00.

Berdasarkan data dari LKPM realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.289.268.980.896,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.361.878.372.896,00 (70,66%) atau capaian kinerja sebesar 235,24% (kinerja sangat tinggi), capaian kinerja melebihi target.

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya tidak dapat dihitung karena indikator Persentase peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang dimulai muncul pada RPJMD Perubahan,

Tabel 3.61

**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan
Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2023
Dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persen	20	56,47	156,47 %	30	70,66	235,24%	Realisasi meningkat dan Capaian Kinerja meningkat

Sumber : Data Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Sumedang

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023 Perubahan, target akhir jangka menengah Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang adalah 30%, sehingga capaian kinerja jangka menengah Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang sebesar 70,6%.

Tabel 3.62
**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan
Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2023
Dengan Target Akhir RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2023
Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	30%	70,66%	235,24%

Sumber : Data Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Sumedang

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Capaian kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang di dukung oleh capaian persentase jumlah investor di Kabupaten Sumedang maka untuk mencapai peningkatan jumlah investor telah di buat peta potensi inventasi melalui penyusunan buku profil potensi investasi Kabupaten Sumedang dan buku kajian potensi investasi Kawasan batudua. Selain dari peta potensi inventasi dalam meningkatkan investor di Kabupaten Sumedang, telah di laksanakan juga promosi potensi melalui berbagai media, serta pelaksanaan kegiatan bisnid meeting investasi yaitu kegiatan yang mempertemukan para investor dengan para pelaku usaha di Kabupaten Sumedang.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang tahun 2023 adalah Rp.476.616.350,00 yang terdiri dari 2 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.465.525.661,00 atau 97,67%.

Tabel 3.63
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja
Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	252.500,000,00	248.854.566,00	98,56
Program Promosi Penanaman Modal	224.116.350,00	216.671.095,00	96,68
Jumlah	476.616.350,00	465.525.661,00	97,67

Sumber : LRA DPMPTSP (diolah)

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang tahun 2023 adalah sebesar 137,57%.

Tabel 3.64
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	235,24%	97,67%	137,57%	Efisien

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten, antara lain :

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang di ampu oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang adalah Persentase Peningkatan Jumlah Investor dengan target 90% dan terealisasi sebesar

100,87%, dan capaian kinerja sebesar 100%. Penyelenggaraan program ini yaitu melalui kegiatan :

- a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah investor penerima fasilitas/insentif Dengan target 10 investor Realisasi 28 investor, adapun faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilannya antara lain :
 - Belum siapnya infrastruktur sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan iklim investasi;
 - Pembebasan lahan masih dikuasi oleh orang tertentu/ormas ;
 - Belum adanya persamaan persepsi tentang pemahaman pemberian insentif dan kemudahan investasi (masih melihat ego masing-masing OPD pemberi insentif/kemudahan investasi) ;
 - Pelaksanaan dalam pemberian fasilitas insentif/kemudahan investasi melibatkan OPD teknis ;
 - Ditetapkannya PERDA Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ;
 - Ditetapkannya Perbup Nomor 126 Tahun 2023 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah dokumen peta potensi di Kabupaten Sumedang Dengan target 2 dokumen Realisasi 2 dokumen (Buku Profil Potensi Investasi Kabupaten Sumedang dan Buku Kajian Potensi Investasi di Kawasan Batudua), adapun faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilannya antara lain :
 - Meningkatkan pengembangan iklim penanaman modal
 - Tersedianya data potensi investasi dalam menunjang kegiatan promosi investasi ;
 - Peningkatan kualitas SDM, regulasi, birokrasi pemerintahan, kebijakan fiskal, perbaikan sarana dan prasarana ;
 - Data potensi investasi sesuai RTRW dan RDTR dalam menunjang iklim penanaman modal ;

2) Program Promosi Penanaman Modal

Indikator program Promosi Penanaman Modal yang di ampu oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sumedang adalah Persentase Peningkatan Jumlah Investor dengan target 4.175 investor dan terealisasi sebesar 18.674 investor, capaian kinerja sebesar 447,28%. Penyelenggaraan program ini yaitu melalui kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Pernyataan Minat Investasi (Permohonan NIB, SIICE Dan SIMBG yang sudah terealisasi dalam bentuk terproses dan terbitnya hal tersebut) Dengan target Realisasi 18.674 (447,28%), adapun faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilannya antara lain :

Keberhasilan :

1. Adanya kebijakan tentang kemudahan Investasi (Perda nomor 4 Tahun 2023 serta adanya Peraturan Bupati nomor 126 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan perda no 4 tahun 2023 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi)
2. Adanya kegiatan promosi yang dilaksanakan melalui :
 - a) Media Sosial (IG, You Tube)
 - b) Pameran
 - c) Leaflet/ bookleat
 - d) Temu Bisnis
3. Adanya Klinik investasi yang bertujuan untuk membantu para investor baik dalam membuat perizinan maupun mengetahui potensi investasi yang ada di kabupaten Sumedang.

16) NILAI SAKIP

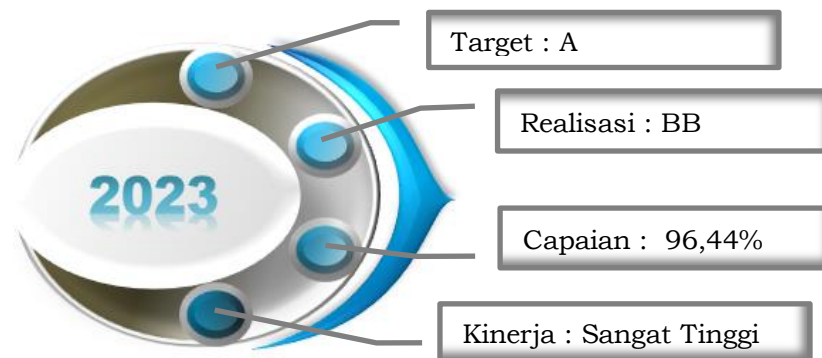
Nilai SAKIP Kabupaten adalah nilai dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan akumulasi nilai dari 4 komponen yaitu : Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; dan Evaluasi Kinerja. Nilai SAKIP berupa interval poin untuk setiap kategori.

Nilai SAKIP berupa interval poin untuk setiap kategori. Target nilai SAKIP Kabupaten Sumedang tahun 2022 adalah kategori A (interval 80,01 poin – 90,00 poin). Cara menghitung capaian kinerja untuk target berupa interval

mengacu pada Permen PANRB No. 88 Tahun 2021, apabila realisasi berada pada interval nilai maka capaiannya 100%. Kemudian apabila realisasi berada di bawah nilai interval terendah (80 poin) maka capaian kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi dengan nilai interval terendah. Begitu pula apabila realisasi melebihi nilai interval tertinggi (90,00 poin) maka capaian kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi dengan nilai interval tertinggi.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Gambar 3.16
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2023



Sumber : LHE KemenPANRB, 2023.

Target kinerja “Nilai SAKIP Kabupaten” tahun 2022 adalah Kategori A (80,01 – 90,00) sedangkan realisasinya berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor B/302/AA.05/2023 tanggal 27 November tahun 2023 adalah BB (77,16) atau capaian kinerja sebesar 96,44% (kategori kinerja tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2022 pada hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 terdapat kenaikan poin sebesar 1.01 poin dari 76,15 ke 77,16. Akan tetapi masih tetap pada kategori BB.

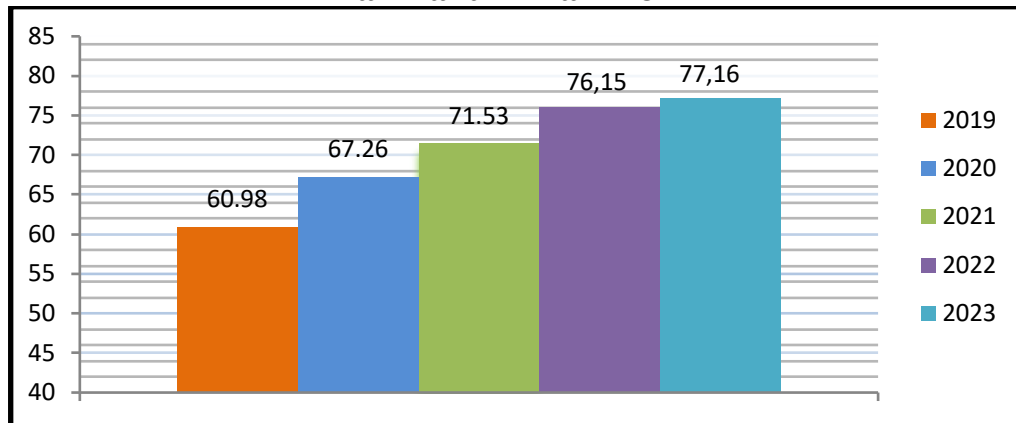
Tabel 3.65
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2023
dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya akuntabiliti	Nilai SAKIP	Kategori	A	BB	95,18	A	BB	96,44	Capaian Kinerja

tas kinerja dan keuangan	Kabupat en								a Menin gkat
-----------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

Sumber : LHE Kementerian PANRB, 2022 dan 2023.

Grafik 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Sumedang
Dari Tahun Awal RPJMD



Nilai SAKIP Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan tren terus meningkat. Peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dari 60,98 poin sampai dengan tahun 2023 menjadi 77,16 poin (Predikat BB) naik 16,18 poin.

c. Perbandingan Kinerja Dengan Target Akhir Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Nilai Sakip Kabupaten adalah kategori A dan realisasi pada tahun 2023 adalah BB, sehingga capaian kinerja jangka menengah Nilai Sakip Kabupaten pada tahun akhir RPJMD sebesar 96,44%.

Tabel 3.66
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan
Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023
Nilai SAKIP Kabupaten	A	BB	96,44%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berikut Rekomendasi yang menjadi kendala/permasalahan ketidak tercapaian target Nilai SAKIP Kabupate Sumedang Tahun 2023 :

No	Kendala/Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
1	Perlu perbaikan penjenjangan/ <i>cascading</i> kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan <i>logical framework</i> dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/ <i>cascading</i> kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan desk pohon kinerja dan <i>cascading</i> pada seluruh Perangkat Daerah 2. Menyusun berita acara hasil desk pohon kinerja dan <i>cascading</i> tahun 2023
2	Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART, terutama pada Perangkat Daerah dan kepala bidang;	Menyusun Keputusan Bupati Tentang Revisi Sasaran Kinerja dan Indikator Sasaran Kinerja
3	Mereviu kembali rencana aksi pada sebagian Perangkat Daerah, dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;	Mereviu Rencana Aksi pada Perangkat Daerah
4	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja dengan melengkapi informasi analisis pencapaian kinerja, kemudian memanfaatkan hasil analisis tersebut untuk perbaikan pelaksanaan program kegiatan pendukung kinerja pada periode berikutnya;	Optimalisasi Aplikasi SICERDAS
5	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi ASN;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dan penyesuaian penyusunan sasaran kinerja pegawai sesuai dengan perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama dan individu 2. Pengembangan aplikasi Mak Siti versi 2.0 dengan menambahkan fitur penilaian bulanan sebagai bahan evaluasi kinerja bulanan pegawai

6	Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja pada pemerintah daerah dan perangkat daerah mengacu pada PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja. Kemudian, Melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Perangkat Daerah untuk memastikan kualitas dan keselarasan data yang disajikan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Asistensi Penyusunan LKIP pada semua perangkat daerah 2. Mereviu Draft Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan LKIP PD
7	Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja baik level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya;	Menyusun Keputusan Bupati Tentang Revisi Sasaran Kinerja dan Indikator Sasaran Kinerja
8	Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemda dan Perangkat Daerah;	Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah
9	Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;	Peningkatan kapasitas Kompetensi APIP
10	Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian <i>reward and punishment</i> kepada Perangkat Daerah, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP.	Pengembangan Aplikasi sakip.sumedangkab.co.id/ MAUTI

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian Nilai SAKIP Kabupaten Sumedang tahun 2023 adalah Rp.1.724.576.633.009,00 yang terdiri dari 10 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.1.595.424.364.491,00 atau 92,51%.

Tabel 3.67

**Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja
Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2023**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.682.036.692.224,00	1.554.428.890.870,00	92,41
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.449.385.700,00	1.435.029.500,00	99,00
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.817.358.640,00	2.742.777.288,00	97,35
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.697.103.030,00	2.597.601.036,00	96,32
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.711.360.000,00	2.069.249.293,00	76,32
Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.070.970.084,00	8.031.007.950,00	99,50
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	20.884.016.421,00	20.503.933.144,00	98,18
Program Perekonomian dan Pembangunan	2.499.746.910,00	2.441.821.935,00	97,68
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	3,010,954,000,00	2,915,205,329,00	96,82
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.410.000.000,00	1.174.053.475,00	83,26
Jumlah Total	1.724.576.633.009,00	1.595.424.364.491,00	92,51

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Nilai Sakip Kabupaten tahun 2023 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini terdiri dari program- program Administrasi Umum yang merupakan program penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah. Program ini di peruntukan untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran, seperti fasilitasi penyusunan perencanaan, pemeliharaan sarana prasarana, pengadaan sarana prasarana, fasilitasi pelaksanaan pengkoordinasian, dll yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran.

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kinerja program sebesar 100%, terealisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% (target tercapai).
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan target kinerja sebesar 100%, terealisasi 100% sehingga capaian kinerja program sebesar 100% (target tercapai).
4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Sasaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator sasaran opini BPK terhadap laporan keuangan, target kinerja program WTP dengan realisasi WTP, capaian kinerja 100%. Program Pengelolaan Keuangan Daerah ini mempunyai 2 (Dua) Kegiatan yaitu:
 - a) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, indikator kinerja Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang Sesuai dengan Aturan Target 95% realisasi 93,80% ;
 - b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, indikator kinerja indikator kinerja Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKOPD dan LKPD Target 95% realisasi 96,29%.
5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Sasaran Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Keakuratan Penatausahaan Aset (Materialitas) dengan target 89% realisasi 94,55, capain kinerja 106,18%.
6. Program Administrasi Pemerintahan Desa
Sasaran Program Admnistrasi Pemerintahan Desa adalah Meningkatnya jumlah desa maju. Adapun kegiatan dari program Admnistrasi Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sasaran dari kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah meningkatnya desa tertb admnistrasi. Tertib administrasi adalah kelengkapan dan kerapihan dokumen admnistrasi, seperti SPJ, sehingga kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa sip untuk diperiksa dan dipertanggungjawabkan

7. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator kinerja Program, yaitu:

- a. Persentase manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang berkategori "baik" dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100%. Realisasi terkait indikator kegiatan yang diukur berdasarkan Persentase Manajemen Pemerintahan kecamatan dan kelurahan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kinerja kecamatan dan kelurahan berkategori "baik", diperoleh berdasarkan rata-rata nilai atas Capaian Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2022, dengan asumsi target capaian sebesar 70% dari total kecamatan berjumlah 26, minimal telah terdapat 18 Kecamatan harus bernilai 62,51-81,25 (Kategori Baik). Begitupun halnya dengan kelurahan, bahwa dari target 70 % kelurahan yang berjumlah 7, minimal terdapat 5 kelurahan bernilai 62,51-81,25 (berkategori baik)
- b. Nilai LPPD dengan target skor sebesar 3,7 dan realisasinya sampai dengan penyusunan laporan ini belum karena menunggu rilis dari Kemendagri.
- c. Persentase tertib administrasi kewilayahan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
- d. Persentase Perangkat Daerah bidang Kesehatan, sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan olahraga yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik" serta fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan. dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.

8. Program Perekonomian dan Pembangunan

Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan ekonomi dengan target 100% dan realisasinya sebesar 93.75% atau capaian kinerjanya sebesar 93.75%

9. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator kinerja program yaitu terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tercapai 100%.

10. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Indikator kinerja program yaitu persentase hasil penelitian dan pengembangan yang di implementasikan dengan target kinerja 100%, terealisasi 81,82%.

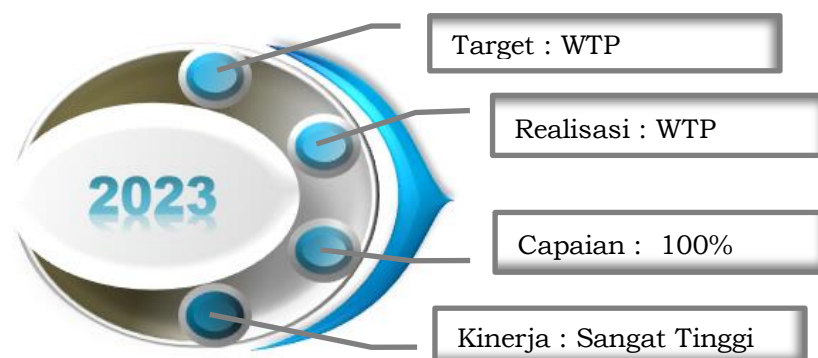
17) OPINI BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/*unqualified opinion*, Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/*qualified opinion*, Tidak Wajar/*adversed opinion*, dan Tidak Menyatakan Pendapat/*disclaimer of opinion*. Opini terbaik adalah WTP.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Opini BPK” tahun 2023 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan realisasinya berdasarkan data dari BPK adalah WTP atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

Gambar 3.17
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Opini BPK
Tahun 2023



Sumber : Hasil Evaluasi BPKRI

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Kabupaten Sumedang untuk Indikator Opini BKP telah mencapai

Predikat WTP yang di raih selama 9 tahun berturut-turut .

Tabel 3.67
Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2023
dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	Realisasi dan Capaian Kinerja Stabil

Sumber : Hasil Evaluasi BPKRI

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Opini BPK adalah WTP dan realisasi pada tahun 2023 adalah WTP, sehingga capaian kinerja jangka menengah Opini BPK pada tahun akhir RPJMD sebesar 100%.

Tabel 3.68
Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023
Opini BPK	WTP	WTP	100%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi

Kabupaten Sumedang telah meraih Opini BPK WTP sebanyak 9 (Delapan) kali secara berturut-turut.

Tabel 3.68
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi dan
Kabupaten/Kota Se- Jawa Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Opini BPK Tahun 2023	Keterangan
1	Prov Jawa Barat	WTP	12 kali WTP (dari Tahun 2011)
2	Kab. Bandung	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
3	Kab. Bandung Barat	WTP	3 kali WTP (dari Tahun

			2011)
4	Kab. Bekasi	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
5	Kab. Bogor	WDP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
6	Kab. Ciamis	WTP	10 kali WTP (dari Tahun 2011)
7	Kab. Cianjur	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
8	Kab. Cirebon	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
9	Kab. Garut	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
10	Kab. Indramayu	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
11	Kab. Karawang	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
12	Kab. Kuningan	WTP	9 kali WTP (dari Tahun 2011)
13	Kab. Majalengka	WTP	10 kali WTP (dari Tahun 2011)
14	Kab. Pangandaran	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
15	Kab. Purwakarta	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
16	Kab. Subang	WTP	5 kali WTP (dari Tahun 2011)
17	Kab. Sukabumi	WTP	9 kali WTP (dari Tahun 2011)
18	Kab. Sumedang	WTP	9 kali WTP (dari Tahun 2011)
19	Kab. Tasikmalaya	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
20	Kota Bandung	WTP	4 kali WTP (dari Tahun 2011)
21	Kota Banjar	WTP	12 kali WTP (dari Tahun 2011)
22	Kota Bekasi	WDP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
23	Kota Bogor	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
24	Kota Cimahi	WTP	10 kali WTP (dari Tahun 2011)
25	Kota Cirebon	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
26	Kota Depok	WTP	12 kali WTP (dari Tahun 2011)

27	Kota Sukabumi	WTP	9 kali WTP (dari Tahun 2011)
28	Kota Tasikmalaya	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam pencapaian WTP tidak terlepas dari keberhasilan pencapaian komponen -komponen yang dijadikan bahan evaluasi OPINI BPK yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pada komponen ke – 4 yaitu efektivitas system pengendalian internal tidak lepas dari indikator kinerja yang secara langsung menjadi faktor utama efektivitas system pengendalian internal antara lain :

1. Indikator Tingkat Maturitas SPIP yang mana tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sumedang berada pada level 3
2. Indikator Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
3. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi
4. Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD

Untuk mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut, tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi yaitu terdapatnya perubahan di dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya kapasitas dan komitmen Sumber Daya Manusia, terdapatnya perubahan sistem informasi pencatatan pengelolaan keuangan, belum optimalnya peran pengawas internal, masih terdapatnya temuan hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindak lanjuti dan kurangnya sinergitas antar stakeholder. Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan tersebut, solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Regulasi

- Melaksanakan penyesuaian atas peraturan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan reuiu SOP
- Membuat Manajemen Risiko

- Memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b. Sumber Daya Manusia
 - Meningkatkan komitmen stakeholder dalam mendukung pelaporan keuangan yang berbasis akrual
 - Penguatan nilai organisasi melalui pakta integritas
 - Melaksanakan sosialisasi/pelatihan/bimtek terkait akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah
 - Melakukan pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan pelaporan keuangan melalui tatap muka dan melalui aplikasi klinik akuntans (klikakun.net)
- c. Teknologi Informasi
 - Mengembangkan sistem informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Melaksanakan Bimtek sistem informasi kepada seluruh OPD
- d. Sistem Pengendalian Internal
 - Optimalisasi peran pengawas internal daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah melalui review Laporan Keuangan
 - Menyempurnakan sistem pengendalian internal dari tahap penganggaran hingga pertanggungjawaban
 - Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan auditor internal dan eksternal
- e. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan
 - Membuat Rencana Aksi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
 - Melakukan monitoring secara berkala terhadap Rencana Aksi
 - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BPK untuk memastikan bahwa tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Opini BPK tahun 2023 adalah Rp.15.038.240.400,00 yang terdiri dari 5 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.14.084.211.215,00 atau 93,66%.

Tabel 3.69
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Opini

BPK Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.216.420.000,00	2.191.892.919,00	98,90
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.711.360.000,00	2.069.249.293,00	76,32
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.730.500.000,00	7.447.945.730,00	96,34
Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.629.610.530,00	3.624.766.772,00	99,87
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	966.769.870,00	942.249.420,00	97,46
JUMLAH	15.038.240.400,00	14.084.211.215,00	93,66

Sumber : LRA BKAD (diolah)

Capaian kinerja Opini BPK tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi anggaran program sebesar 93,66%, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,34%.

Tabel 3.70
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Opini BPK Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	100%	93,66%	6,34%	Efisien

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Opini BPK, yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator sasaran opini BPK terhadap laporan keuangan, target kinerja program WTP dengan realisasi WTP, capaian kinerja 100%. Program Pengelolaan Keuangan Daerah ini mempunyai 2 (Dua) Kegiatan yaitu:

- a) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, indikator kinerja Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang Sesuai dengan Aturan Target 95% realisasi 93,80% ;
 - b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, indikator kinerja indikator kinerja Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKOPD dan LKPD Target 95% realisasi 96,29%.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Sasaran Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Keakuratan Penatausahaan Aset (Materialitas) dengan target 89% realisasi 94,55, capain kinerja 106,18%.
 3. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan yatu Persentase pemenuhan unsur SPIP dari target 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.
 4. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Indikator Kinerja program :
 1. Presentase pemenuhan elemen IACM dari target yang ditetapkan pada indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP / Internal Audit Capability Model (IACM) adalah Level 3 Penuh. Hasil Quality Assurance (QA) Kapabilitas APIP / Internal Audit Capability Model (IACM) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Level 3 Penuh sesuai dari yang ditargetkan. Dengan demikian capaian target indikator kinerja tersebut diatas sebesar 100% dengan kategori Baik. dengan capaian Kinerja 100%
 2. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM adalah 100%. Hasil evaluasi perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan zona integritas adalah 100% atau 55 OPD sesuai dari yang ditargetkan. Dengan demikian capaian target indikator kinerja tersebut diatas sebesar 100% dengan kategori Baik.
 5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator kinerja Program yaitu Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 18.99% dan realisasinya 17.38% atau capaian kinerja sebesar 91.52%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu Kegiatan

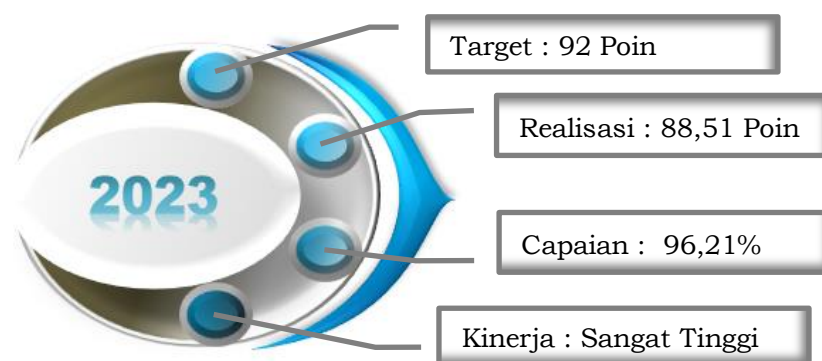
Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 87.07% yang ditunjang Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah mencapai 98.90%, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah 98.63%, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah mencapai 98.41%, Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah mencapai 98.85%, Penilaian PBB P2 dan BPHTB mencapai 93.63%, Penetapan Wajib Pajak mencapai 96%, Penagihan Pajak Daerah mencapai 87.17 serta Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah mencapai 97.61%.

18) INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan angka yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Nilai ini didapatkan dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Unsur yang disurvei meliputi 9 unsur yaitu : Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; serta Sarana dan Prasarana.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Gambar 3.18
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks
Kepuasan Masyarakat Tahun 2023



Sumber : Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sumedang

Tahun 2023

Target kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” tahun 2023 sebesar 92 poin dan realisasinya berdasarkan data hasil survey unit layanan publik yang berada di semua Perangkat Daerah se- Kabupaten Sumedang triwulan IV Tahun 2023 di dapat realisasi adalah 88,51 poin atau capaian kinerja sebesar 96,21% (kinerja sangat tinggi). Berdasarkan perhitungan hasil survei, diperoleh data sebagai berikut :

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 88,19 poin sementara pada tahun 2023 tingkat kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang meningkat menjadi 88,51 poin naik sebesar 0,32 poin. Berbanding lurus dengan capaian atas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dari Kemenpan RB tahun 2023 dengan predikat **Pelayanan Prima** serta untuk Evaluasi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI dengan kenaikan yang sangat signifikan meningkat dan mendapat predikat kepatuhan “**Tertinggi**” (Zona Hijau).

Tabel 3.71
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	89	88,19	99,09%	92	88,51	96,21%	Realisasi meningkat

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Kab. Sumedang Tahun 2023

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 92 poin sehingga capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 96,21%.

Tabel 3.72
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat	92 poin	88,51 poin	96,21%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 3.73
Nilai Rata- Rata Per Unsur Layanan Tahun 2023

NO	UNSUR SKM	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,50	0,385
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,48	0,383
U3	Waktu Penyelesaian	3,44	0,378
U4	Biaya/Tarif	3,90	0,429
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,47	0,382
U6	Kompetensi Pelaksana	3,51	0,386
U7	Perilaku Pelaksana	3,57	0,393
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,48	0,383
U9	Sarana dan Prasarana	3,84	0,423
Jumlah			3,541
Indeks Kepuasan Masyarakat			88,51
Mutu Pelayanan			A
Kinerja Unit Pelayanan			SANGAT BAIK

A. Analisis Bivariat

Analisis ini dilakukan berdasarkan angka-angka yang diperoleh dari hasil pelaksanaan survei antara lain :

1. Unsur layanan hasil survey kepuasan masyarakat yang mendapatkan nilai tertinggi adalah unsur **Biaya/Tarif** dengan NRR **3,90** poin atau 97,38% pengguna layanan merasa puas dengan standar pelayanan pada unsur biaya/tarif layanan yang diberikan oleh seluruh unit layanan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang, unsur ini memang menjadi unsur tertinggi setiap tahunnya ;
2. Unsur layanan hasil survey kepuasan masyarakat yang mendapatkan NRR terendah adalah **Waktu Penyelesaian** dengan NRR **3,44 poin** atau 85,93% pengguna layanan merasa puas dengan standar pelayanan pada Jangka Wwaktu Penyelesaian layanan yang

diberikan oleh seluruh unit layanan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang;

3. **Unsur Persyaratan** mendapatkan NRR **3,50** atau 87,73% pengguna layanan merasa puas dengan standar pelayanan pada unsur Persyaratan layanan yang diberikan oleh seluruh unit layanan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang;
4. **Unsur Sistem Mekanisme Prosedur** mendapatkan NRR **3,48** atau 87,01% pengguna layanan merasa puas dengan standar pelayanan pada Sistem Mekanisme Prosedur layanan yang diberikan oleh seluruh unit layanan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang;
5. **Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** mendapatkan NRR **3,47** atau 86,86% pengguna layanan merasa puas dengan standar pelayanan pada Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yang diberikan oleh seluruh unit layanan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang;
6. **Unsur Kompetensi Pelaksana** mendapatkan NRR **3,51** atau 87,64% pengguna layanan merasa puas dengan standar pelayanan pada unsur Kompetensi Pelaksana yang diberikan oleh seluruh unit layanan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang;
7. **Perilaku Pelaksana** mendapatkan NRR **3,57** atau 89,26% pengguna layanan merasa puas dengan standar pelayanan pada unsur Perilaku Pelaksana yang diberikan oleh seluruh unit layanan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang;
8. **Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** mendapatkan NRR **3,48** atau 87,08% pengguna layanan merasa puas dengan standar pelayanan pada unsur Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang diberikan oleh seluruh unit layanan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang;
9. **Sarana dan Prasarana** mendapatkan NRR **3,84** atau 96,03% pengguna layanan merasa puas dengan standar pelayanan pada unsur Unsur Sarana dan Prasaran layanan yang diberikan oleh seluruh unit layanan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang;

Berdasarkan hasil analisis dari capaian tahun 2023 8 (delapan) unsur mengalami kenaikan dari capaian Tahun 2022 sementara 1 (satu) unsur layanan tidak terdapat kenaikan/penurunan yaitu Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.

B. Analisis Univariat

Analisis Univariat yang akan kami uraikan merupakan analisis hubungan antara unsur – unsur penilaian survey yang kami laksanakan sebagai berikut :

1. Unsur Persyaratan dengan Unsur Sistem, Mekanisme Prosedur mengalami peningkatan dan akan saling berhubungan dan saling menunjang dikarenakan didalam unsur sistem, mekanisme Prosedur akan terdapat unsur persyaratan dimana capaian kenaikan unsur persyaratan akan naik seiring dengan sistem, mekanisme prosedur yang simple, mudah dan sesuai;
2. Unsur Persyaratan dengan unsur waktu penyelesaian mengalami peningkatan, berdasarkan analisis kami unsur ini sangat berhubungan dan ketergantungan dimana persyaratan lebih mudah, maka waktu penyelesaian akan relatif cepat;
3. Unsur persyaratan dengan unsur biaya/tarif dan unsur produk spesifikasi jenis layanan mengalami peningkatan, berdasarkan dari analisis terdapat hubungan yaitu unsur persyaratan yang di buat tergantung dari ada tidak adanya biaya pelayanan dan persyaratan yang di tetapkan juga tergantung dari jenis produk layanan karena setiap jenis produk layanan akan berbeda persyaratannya, dimana unsur persyaratan harus jelas sesuai dengan unsur jenis layanan/produk layanan.

Unsur biaya/tarif yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diterapkan akan menjadi faktor pendukung kepuasan masyarakat, di Kabupaten Sumedang sendiri untuk unsur layanan biaya/tarif telah di upayakan semurah mungkin bahkan sebagian besar di gratiskan.

4. Unsur sistem, mekanisme prosedur dengan unsur waktu penyelesaian dan unsur produk jenis layanan mengalami peningkatan, dan dari hasil analisis kami, sitem mekanisme prosedur yang diterapkan oleh seluruh unit layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah sesuai sehingga bisa mempercepat waktu pemberian layanan;
5. Keterkaitan unsur Kompetensi Pelaksana dengan 8 unsur layanan lainnya akan saling mempengaruhi, dimana kompetensi pelaksana merupakan paktor utama yang mempengaruhi unsur layanan lainnya, Pemerintah Kabupaten Sumedang terus berupaya meningkatkan mutu layanan yang salah satunya adalah

pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaksana/petugas layanan melalui berbagai macam cara diantaranya pemberian diklat, pelaksanaan bimbingan teknis/ pelatihan kepada pelaksana/petugas layanan baik petugas back office maupun front office. Serta pelaksanaan pemberian reward bagi petugas yang berprestasi dari hal terkecil berupa pemberian piagam penghargaan sampai dengan pemberian promosi jabatan dengan harapan para Petugas layanan lebih bersemangat dan berupaya memberikan layanan sebaik mungkin kepada masyarakat;

6. Unsur Perilaku Pelaksana mengalami peningkatan dan sangat berhubungan secara langsung dengan semua unsur layanan sehingga perilaku pelaksana merupakan bagian penting pada proses pelayanan. Perilaku pelayanan dengan penerapan budaya layanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), budaya perilaku berpakaian yang rapih dan lengkap;
7. Penanganan Pengaduan yang telah dilakukan terdapat dua cara yaitu secara elektronik (website dan aplikasi SP4N LAPOR) dan penanganan pengaduan secara langsung tatap muka. Penanganan pengaduan tersebut akan sangat bermanfaat terhadap peningkatan unsur-unsur IKM dimana dengan adanya pengaduan dari masyarakat, penyelenggara pelayanan publik dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang harus secepatnya dibenahi. Hasil survey menunjukkan bahwa unsur penanganan pengaduan/saran dan masukan mengalami kenaikan berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan terdapat kendala dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan dari segi waktu penyelesaian, dimana masyarakat tidak mau tahu pengaduan yang mereka sampaikan dapat di realisasikan secepatnya, padahal terkait pengaduanbeberapa layanan yang sifatnya memerlukan koordinasi dengan stakeholder eksternal atauun layanan yang memerlukan pembiayaan tinggi akan memerlukan waktu yang relative tidak singkat.

Tabel 3.74

**Kendala, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut
Hasil Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat**

No	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
----	---------	--------	-----------------------

1	Waktu penyelesaian masih dirasa kurang optimal	1. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 2. Peningkatan kompetensi pelaksana/petugas layanan	1. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada unit layanan; 2. Review SOP unit layanan; 3. Review Standar Pelayanan unit layanan; 4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas pelaksana/petugas layanan
2	Sistem Informasi Pelayanan Publik belum terntegrasi	Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Pembuatan portal layanan/penyempurnaan SIPP yang sudah tersedia

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 adalah Rp. 1.699.778.810.674,00 yang terdiri dari program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.571.519.112.143,00, tingkat penyerapan anggaran 92,45 %.

Tabel 3.75
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Kepegawaian Daerah	15.079.869.877,00	13.977.458.066,00	92,69
Program Pendaftaran Penduduk	4.517.690.400,00	4.330.265.830,00	95,85
Program Pencatatan Sipil	582.191.450,00	555.068.669,00	95,34
Program Pelayanan Penanaman Modal	431.786.600,00	426.390.371,00	98,75
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	422.700.000,00	380.558.805,00	90,03
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.730.500.000,00	7.447.945.730,00	96,34
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	4.031.250.000,00	3.923.991.868,00	97,34
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.682.036.692.224,00	1.554.428.890.870,00	92,41
Jumlah	1.699.778.810.674,00	1.571.519.112.143,00	92,45

Tingkat efisiensi anggaran tidak dapat dihitung karena realisasi kurang

dari 100%.

f. Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, yaitu :

1) Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah yang di laksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mendukung secara langsung IKU Kepala Daerah, yaitu :

a. Indeks Profesionalitas ASN dengan target kinerja 79 poin realisasi 83,26 poin capaian kinerja 105,39%, indeks profesionalitas ASN ini meliputi 4 (empat) dimensi antara lain :

1) Dimensi Kualifikasi (bobot 25%) - mengukur kualifikasi pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah dengan hasil pengukuran sebesar 21,28 poin.

2) Dimensi Kompetensi (bobot 40%) - mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan dengan hasil pengukuran sebesar 32,38 poin.

3) Dimensi Kinerja (bobot 30%), - mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dengan hasil pengukuran sebesar 24,60 poin.

4) Dimensi disiplin bobot (5%) dengan kriteria sebagai berikut: nilai 5 bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; nilai 3 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; Nilai 2 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan nilai 1 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Dengan hasil pengukuran sebesar 5 poin.

Melalui hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas dapat diperoleh gambaran mengenai pengembangan profesionalisme ASN. Pegawai ASN dapat melakukan pengembangan diri sebagai upaya meningkatkan derajat profesionalitas, dan instansi dapat merumuskan pengembangan pegawai ASN secara organisasional. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik juga dapat

melakukan kontrol sosial, sehingga pegawai ASN selalu bertindak profesional.

- b. Indeks Sistem Merit dengan target 345 poin dan realiasi 348 poin capaian kinerja 100,87%. Indikator ini meliputi 8 aspek pengukuran antara lain :
- 1) Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN;
 - 2) Aspek Pengadaan ASN;
 - 3) Aspek Pengembangan Karir;
 - 4) Aspek Mutasi dan Promosi;
 - 5) Aspek Manajemen Kinerja;
 - 6) Aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin;
 - 7) Aspek Perlindungan dan Pelayanan;
 - 8) Aspek Sistem Informasi.

Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Program Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manuasia (BKPSDM) sudah memenuhi ke 8 (delapan) aspek tersebut walaupun memang masih banyak yang harus di benahi.

- 2) Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator kinerja Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan target 97% dan realisasi 116,71% dengan capaian kinerja 120,31%, capaian melebihi target.
- 3) Program Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil target 93% dan realisasi 109,57% dengan capaian kinerja 117,82%, capaian melebihi target.
- 4) Program Pelayanan Penanaman Modal
Outcome Program ini yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat Izin Non Usaha dengan nilai IKM 82,74 Poin kategori BAIK.
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat Pendampingan dengan nilai IKM 97,30 Poin, kategori SANGAT BAIK.Dari ke-2 (dua) hasil IKM tersebut di rata-ratakan sehingga IKM bidang Perizinan tahun 2023 adalah 90,02 Poin (Sangat Baik)
- 5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Tujuan dari program ini yaitu meningkatnya investor yang

melaporkan LKPM. Pada tahun 2023 periode Januari-Desember yang terealisasi di Kabupaten Sumedang mencapai Rp.3.289.268.980.896,00.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu :

- a. Belum tersedianya database jumlah investor yang wajib LKPM
- b. Belum seluruh investor mengetahui kebijakan mengenai kewajiban penyampaian LKPM

Alternative yang telah dilakukan :

- a. Menyusun database investor Kabupaten Sumedang yang wajib LKPM.
 - b. Pelaksanaan Sosialisasi/publikasi kebijakan LKPM.
 - c. Melaksanakan pelatihan input data LKPM kepada para investor.
- 6) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase data PM dan perizinan yang valid, target 100% dan realisasi kinerja 100% capaian kinerja 100%. Pelaksanaan teknis program ini yaitu meliputi pengelolaan, penyajian dan pemantauan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi dengan melakukan penyusunan analisis data capaian penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang yang dapat menggambarkan capaian kinerja, indentifikasi masalah dan ekomendasi yang diperlukan.
- 7) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 18.99% dan realisasinya 18.23% atau capaian kinerja sebesar 96,36%. Target kinerja tidak tercapai. Kegiatan yang penunjang pencapaian kinerja yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 96.34% yang ditunjang Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah mencapai 93.71%, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah 98.63%, Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 99.77%, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 94.73%, Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 98.44%, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 00% Penetapan Wajib Pajak

Daerah 99,99% dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 97,33%, Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 99,89%, Penagihan Pajak Daerah 95,09%, Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 87,64%, dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 92,29%.

8) Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan indikator kinerja Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah, target 50% dan realisasi 74,29% capaian kinerja 148,58%.

9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja.

Program ini merupakan program pendukung pelaksanaan seluruh layanan yang berada pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, program ini mencakup dukungan proses manajemen, tatalaksana, dan operasionalisasi layanan.

19) INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik mencakup beberapa domain aspek penilaian dengan pembobotan sebagai berikut :

Tabel 3.76
Domain dan Aspek Penilaian SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE		
		NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	1	4,2 – 5,0	Memuaskan
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	3	2,6 – < 3,5	Baik *)
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%	4	1,8 – < 2,6	Cukup
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%	5	< 1,8	Kurang
Aspek 8 - Layanan Publik	18%			

*) Target penilaian:
Predikat Baik
(indeks minimal 2,6)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis ELEktronik” tahun 2023 sebesar 4,2 poin dan realisasinya berdasarkan data hasil evaluasi untuk Indeks SPBE Kabupaten Sumedang adalah 4,14 poin atau capaian kinerja sebesar 98,57% (kinerja sangat tinggi).

Tabel 3.77
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis ELEktronik Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	Indeks SPBE	Poin	4,2	4,14	98,57%	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil evaluasi Indeks SPBE Kemenpanrb

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan tahun 2022, realisasi Indeks SPBE tahun 2023 naik 0,30 poin capaian kinerjanya meningkat sebesar 4,91%.

Tabel 3.78
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	Indeks SPBE	Poin	4,1	3,84	93,66%	4,2	4,14	98,57%	Realisasi Meningkat

Sumber : Hasil evaluasi Indeks SPBE Kemenpanrb Tahun 2023

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023 Perubahan, target akhir jangka menengah Indeks SPBE adalah 4,2 dan realisasi pada tahun 2023 adalah 4,14 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis ELEktronik pada tahun akhir RPJMD sebesar 98,57%.

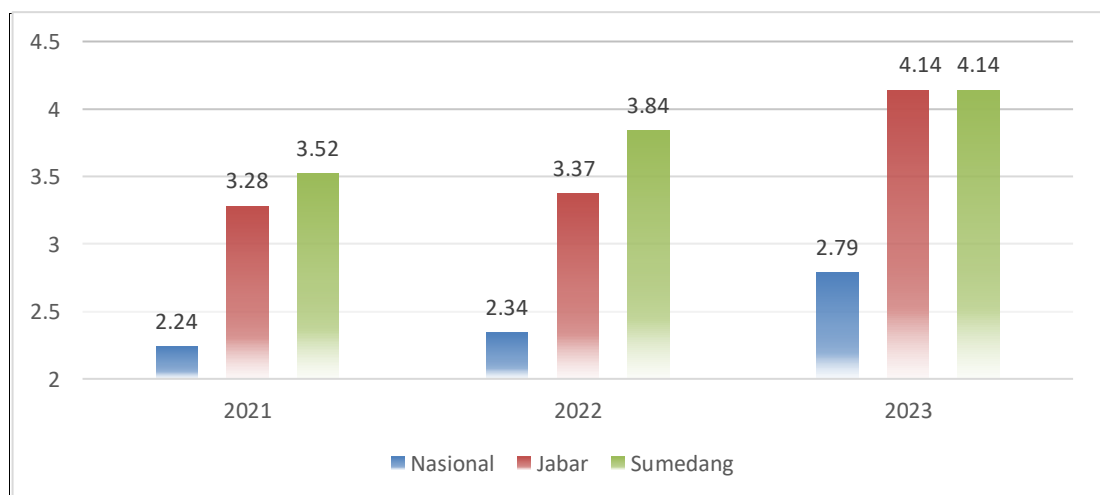
Tabel 3.79
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE Tahun 2023 Dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2023
Indeks SPBE	4,2 poin	4,14 poin	98,57%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/ Nasional

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan, hal ini merupakan kerja keras Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mendukung pemerintah pusat dalam meningkatkan Indeks SPBE Nasional. Berikut kami sajikan grafik perbandingan Indeks SPBE Pemda Kabupaten Sumedang tingkat Provinsi dan Nasional:

Grafik 3.19
Perbandingan Sistem SPBE Kabupaten Sumedang
Dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional



Sumber : Hasil Evaluasi Indeks SPBE Kemenpanrb

Berdasarkan dari data capaian Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional mengalami peningkatan yang cukup memuaskan, capaian Indeks SPBE Kabupaten Sumedang sama dengan Indeks SPBE Provinsi Jawa Barat yaitu pada 4,14 Poin, atas capaian ini diharapkan dapat terus meningkat pada tahun 2024.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja “Nilai SPBE” pada tahun 2023 mengacu pada permasalahan yang terjadi pada penilaian Nilai SPBE tahun 2023. Dimana penilaian tahun 2023 mendapat point 4,14, namun ditingkat Nasional nilai ini tidak termasuk dalam tingkat sepuluh besar. Hal ini jauh berbanding dengan nilai di tahun 2022 yang mendapat nilai 3,84, tetapi nilai ini masuk ke tingkat sepuluh besar Nasional.

Kendala :

- Penerapan Manajemen SPBE Pemkab Sumedang belum optimal, karena sebagian besar belum dilaksanakan sesuai standar nasional atau belum mencakup semua aktivitas lengkap manajemen.
- Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE masih belum dilaksanakan semua OPD dan isian Manajemen Risiko SPBE masih terkesan yang penting terisi (terdapat beberapa isian yang belum lengkap) Manajemen Aset TIK. Manajemen Perubahan, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Data belum dilaksanakan secara menyeluruh mencakup semua aktivitas.

Solusi :

- Proses evaluasi harus melibatkan OPD-OPD terkait aspek SPBE, Dokumen Arsitektur SPBE perlu diperbaharui sesuai dengan format terbaru dan konten Arsitektur SPBE Nasional dan Peta Rencana benar-benar diselaraskan dengan Renja-DPA OPD/OPD Penanggung-jawab Pemkab Sumedang, yakni perlunya standar proses pengembangan aplikasi mengikuti kebutuhan agile development namun tetap memenuhi dokumentasi SDLC. Tim Koordinasi SPBE perlu pemberdayaan OPD-OPD dalam mengambil peran masing-masing indikator SPBE sesuai tupoksi OPD, serta perlunya program kerja Tim Koordinasi SPBE dan implementasinya secara baik. Udit TIK perlu melibatkan Inspektorat sebagai PIC utama (bukan hanya dilaksanakan oleh Dinkominfo), Manajemen SPBE perlu dilaksanakan mencakup semua aktivitas dan oleh semua OPD.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Indeks SPBE tahun 2023 adalah Rp. 11.341.503.950,00 yang terdiri dari 4 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 10.663.143.167,00 atau 94,02%.

Tabel 3.80
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja
Indeks SPBE Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Aplikasi Informatika	7.447.781.850,00	6.895.576.275,00	92,59
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	742.598.000,00	714.081.262,00	96,16
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	295.940.000,00	278.320.380,00	94,05
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.855.184.100,00	2.775.165.250,00	97,20
Jumlah	11.341.503.950,00	10.663.143.167,00	94,02

Sumber : LRA Diskominfosanditik

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Indeks SPBE tahun 2023 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks SPBE, antara lain :

1) Program Aplikasi Informatika

Indikator Program Aplikasi Informatika antara lain :

- a. Persentase Desa menggunakan layanan publik berbasis Elektronik. Dengan target 100% dan realisasi sampai akhir tahun 2023 sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja ini yaitu

- Masih kurangnya menara BTS yang mejangkau wilayah yang berada di daerah-daerah terpencil.
- Masih banyaknya masyarakat yang tidak mau menggunakan Aplikasi yang ada.

- b. Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perangkat Daerah Dengan target 100% dan realisasi sampai

dengan akhir tahun 2023 sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja ini yaitu

- Penerapan Manajemen SPBE di tiap-tiap OPD belum optimal, karena sebagian besar belum mencakup semua aktivitas lengkap manajemen.
- Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Aset TIK, Manajemen Perubahan, Manajemen Pengetahuan, masih belum dilaksanakan semua OPD. Kemudian Manajemen Data belum dilaksanakan secara menyeluruh yang mencakup semua aktivitas.

Program ini memiliki output kegiatan antara lain:

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah dengan melakukan pemeliharaan secara teratur dan pembaruan perangkat lunak secara berkala di lingkup pemerintah Kabupaten Sumedang berjalan dengan baik.
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah dengan memastikan sistem memiliki prosedur pemulihan yang teratur dan terbaru, sehingga sistem yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumedang berjalan dengan baik.
- Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah dengan penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas.
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.

2) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Indikator kinerja program yaitu tingkat keamanan informasi dengan target 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja 100%.

3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator program “Persentase Ketersediaan Data Sesuai dengan Standar” dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 100% dan raelisasi sampai akhir tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Untuk dataset itu sendiri sampai akhir tahun 2023 sudah terkumpul sebanyak 7.683 dataset. Terkumpulnya dataset sampai akhir tahun 2023 sudah melebihi tahun 2022, dimana pada akhir tahun 2022 hanya terkumpul sebanyak 4.325 dataset.

Program ini terdiri diselenggarakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan Indikator : Jumlah Pemenuhan Data Pembangunan Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota , dengan target 2 Dokumen terealisasi 2 Dokumen atau capaian kinerja telah 100%. Dengan output :

- a. Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan Indikator Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun dengan target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen atau capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dengan Indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS, dengan target 54 Orang terealisasi 54 Orang atau capaian kinerja sebesar 100%.
- c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dengan Indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS, dengan target 54 Orang terealisasi 54 Orang atau capaian kinerja sebesar 100%.
- d. Pengembangan Insfranstruktur dengan Indikator Jumlah Infrastruktur Statistik, dengan target 1 Unit terealisasi 1 Unit atau capaian kinerja sebesar 100%.

4) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

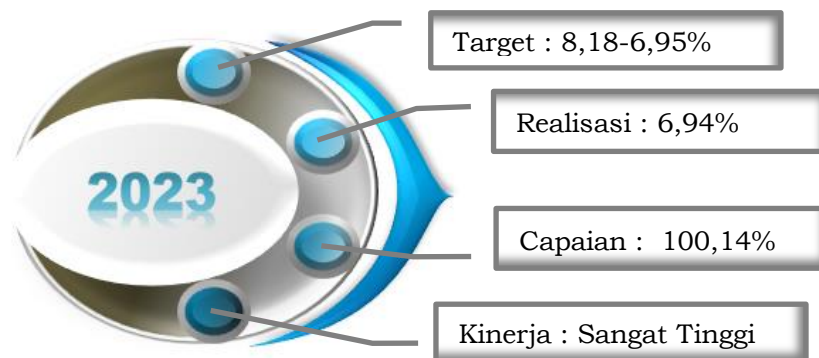
Indikator kinerja program yaitu Persentase Layanan kepada Masyarakat dengan target 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja 100%.

20) TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran Terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Gambar 3.20
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

Target kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun 2023 sebesar 8,18 – 6,95 dan realisasinya berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumedang adalah 6,94 persen atau capaian kinerja sebesar 100,14% (kinerja sangat tinggi). Capaian melebihi target.

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 realisasinya meningkat 1,46%.

Tabel 3.81
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran
Terbuka Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	

Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,78 s.d 7,99	7,72	96,62%	8,18 s.d 6,95	6,94	100,14%	Realisasi dan capaian kinerja Meningkat
--	------------------------------	--------	---------------	------	--------	---------------	------	---------	---

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 8,18 - 6,95 persen dan realisasi pada tahun 2023 adalah 6,94%, sehingga capaian kinerja jangka menengah Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun terakhir RPJMD sebesar 100,14%.

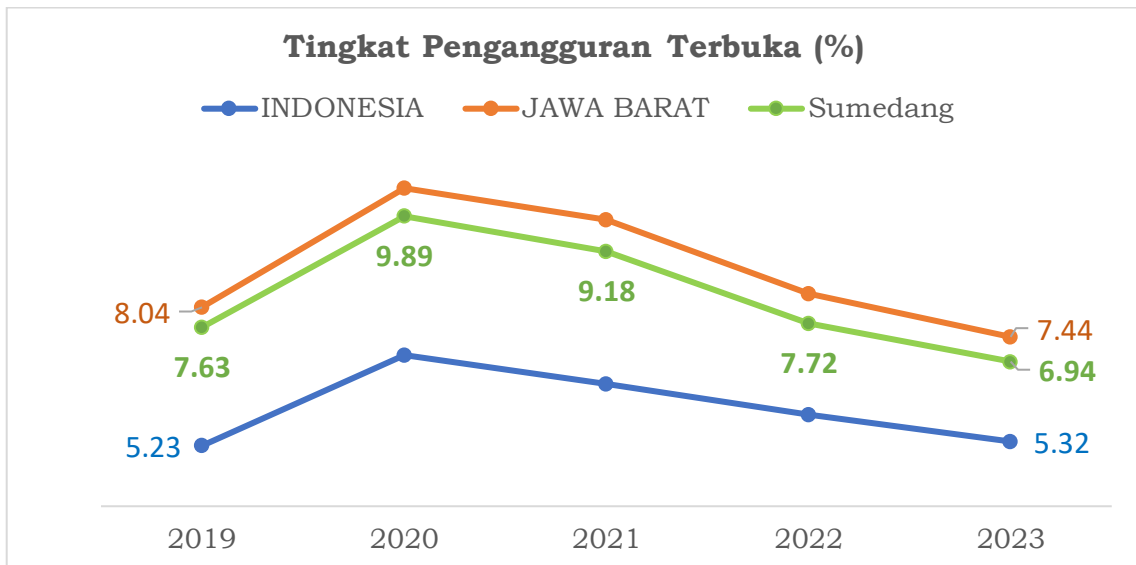
Tabel 3.82
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2023
Tingkat Pengangguran Terbuka	8,18-6,95 persen	6,94%	100,14%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sumedang dari tahun 2018-2023 selalu di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Namun, berada di atas rata-rata nasional.

Grafik 3.20
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia



Sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2023 (diolah)

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang dapat dijelaskan melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT digunakan untuk mengetahui besarnya persentase Angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Diharapkan dengan mengetahui angka TPT dapat menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap *supply* tenaga kerja yang ada. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Sumedang Tahun 2023 yakni 6,94% dari target 8,18 – 6,95%. Capaian ini mampu melampaui target dengan persentase penurunan TPT mencapai 10,10% atau menurun 0,78 persen dibandingkan tahun 2022. Meskipun capaian ini belum sebaik Jawa Barat yang mampu menurunkan 0,87 persen.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Penguatan Calon Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan (pelatihan kewirausahaan), uji kompetensi calon pencari kerja, dan pelaksanaan magang, peningkatan pendidikan keterampilan/vokasi, peningkatan investasi, membuka lapangan pekerjaan padat karya, menumbuhkan wirausahawan baru, serta pembangunan destinasi wisata yang dapat membuka peluang usaha bagi warga masyarakat sekitar.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 adalah Rp.5.974.860.000,00 yang terdiri dari 9 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.5.914.215.150,00, realisasi anggaran 98,98%.

Tabel 3.83
Realisasi Anggaran Program Penunjang Capaian Kinerja
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,945,000,000,00	2,910,289,709,00	98.82
Program Penempatan Tenaga Kerja	897,000,300,00	873,540,625,00	97.38
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	50.000.000,00	47.150.000,00	94,30
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	105.970.000,00	103.520.000,00	97,69
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	275.000.000,00	271.820.000,00	98,84
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	404.200.000,00	394.186.750,00	97,52
Program Pengembangan UMKM	3.639.690.000,00	3.628.305.250,00	99,69
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	605.000.000,00	597.772.900,00	98,81
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	895.000.000,00	871.460.250,00	97,37
Jumlah	9.211.860.300,00	9.698.045.484,00	98,98

Capaian kinerja Tingkat Pengangguran terbuka tahun 2023 sebesar 100,14% dan realisasi anggaran program sebesar 98,98%, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,16%.

Tabel 3.84
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
-------------------	---------------------------	------------------------	------------------------------------	-----------	------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	100,14%	98,98%	1,16%	Efisien

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka, yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Indikator kinerja Program tahun 2023 yaitu :

- Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat dengan target 100% realisasi 100 % capaian kinerja program 100 %. meningkatnya jumlah tenaga kerja yang di tempatkan yang bersertifikat dengan aktivitas kegiatan
 - a) Pelatihan dan Pendidikan Untuk Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Di Kabupaten Sumedang.
 - b) Pembinaan LPKS
 - c) IMTA, Uji Kompetensi tenaga Kerja
 - d) Pelatihan Pengembangan Desa Produktif
- Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat dengan target 100% realisasi 100 % capaian kinerja program 100 %, meningkatnya jumlah tenaga kerja yang di tempatkan yang bersertifikat dengan aktivitas kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Untuk Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Di Kabupaten Sumedang (DBHCHT)

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Program Penempatan Tenaga Kerja tahun 2023 yaitu Persentase Penempatan tenaga Kerja dengan target 100 % realisasi 100 % capaian kinerja program 100 %. meningkatnya jumlah tenaga kerja yang di tempatkan yang bersertifikat dengan aktivitas kegiatan:

1. Pelayanan Pembuatan AK1 (Kartu Kuning).
2. Pembuatan Izin BKK (Bursa Kerja Khusus .
3. Penanganan PM, Pembuatan Rekom CPMI.

4. Pembinaan Arah Minat bakat siswa sekolah Menengah Kejuarauan agar terarah.
5. Pelatihan Kewirasusahaan bagi penyandang Disabilitas dan Layanan Penempatan tenaga Kerja Penyandang disabilitas, Vokasi Berbasis Penempatan.
6. Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja mandiri.
7. Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja.
8. Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Indikator kinerja Program dari program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, untuk tahun 2023 yaitu Persentase KSP/USP Yang Sehat, dengan target program 100%, realisasi kinerja program sebesar 94,30%.

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

indikator kinerja yaitu Persentase koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan perkoperasian, dengan target program 100%, realisasi kinerja program sebesar 97,69%. pelaksanaan program tersebut meliputi Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, Bimbingan Teknis Digitalisasi Perkoperasian.

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Indikator kinerja Program yaitu Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan dengan target program 100%, realisasi kinerja program sebesar 98,84%.

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Indikator kinerja Program yaitu Persentase UMKM yang diberdayakan, dengan target program 100%, realisasi kinerja program sebesar 97,52 %.

7. Program Pengembangan UMKM

Indikator kinerja Program yaitu persentase UMKM yang di kembangkan dengan target program 100%, realisasi kinerja program sebesar 99,69%.

8. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Indikator kinerja Program yaitu Cakupan karya ekonomi kreatif yang memiliki HAKI, dengan target sebanyak 17 sub sektor dengan realisasinya 17 subsektor atau capaian kinerja sebesar 100 %. Capaian kinerja tercapai dengan di dukung oleh :

a. Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif. Sumedang sudah memiliki gedung kreatif center, diharapkan menjadi tempat berekspresi, berkreatifitas, berkarya, berinovasi dan sebagai tempat inkubasi bagi pengembangan ekonomi kreatif di Sumedang. Hal ini bisa terlaksana bila ada sarana dan prasarana pendukung bagi pelaku ekonomi ekonomi kreatif untuk mengembangkan potensi sesuai sub sektornya, untuk tahun anggaran 2023, pengadaan perlengkapan sarana prasarana untuk sub sektor music yaitu perlengkapan studio musik untuk rekaman. Sarana prasarana untuk seni pertunjukan, ruang kelas/rapat, coffe shop, pengadaan partisi gambar untuk sub sektor senirupa/foto, dan etalase kriya, serta sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi kreatif Sumedang dari 17 sub sektor.

b. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Sub kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif. Memfasilitasi kegiatan kegiatan FGD, sosialisasi, study komparasi, dan seminar untuk penyusunan rencana aksi pengembangan ke 17 sub sektor ekonomi kreatif Sumedang.

9. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, para pelaku ekonomi kreatif yang terdapat di 5 Desa 2 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang mendapatkan fasilitasi berupa Bimbingan teknis dan workshop yang terbagi dalam tiga kelas pelatihan dan Wokshop :

- c. Pelatihan Pengolahan Mutu Product/Pengemasan/Packaging,
- d. Pelatihan Design Produk, dan
- e. Pelatihan Digital Marketing dengan menghasilkan produk turunan olahan pangan dari Hasil pertanian Sayuran di Desa Sindulang seperti : Saus Tomat, Sambel Cabe, Cabe Kering, Kerupuk Tomat, Sistik Tomat, Dodol Tomat dan dari Desa Kadu, Lebaksiuh, Cintajaya, Cipicung berupa produk olahan turunan dari mangga gedong gincu seperti, Juss, Keripik, Wajit, Dodol, Sirup, Jely, Puding, dan Bolu serta ekstrak Mangga Gedong Gincu dan hasil produk Turunan tersebut ditampilkan dan di launching pada Event Promosi dan Apresiasi Karya Kreatif Sumedang/Sumedang Agrokraf Expo 2023.

Dengan terlaksananya Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telah memfasilitasi event untuk para pelaku ekonomi kreatif berupa :

- a. Event kreatif Mojang Jajaka dimana untuk tingkat Kabupaten Sumedang diselenggarakan secara Virtual dan pelaksanaan di tingkat Jawa Barat diadakan secara langsung di Kabupaten Karawang,.
- b. Event Sumedang Creative Festival di selenggarakan secara langsung di Alun-alun Kabupaten Sumedang melibatkan pelaku sub sektor Fashion, Musik, Kriya, Kuliner, Seni Rupa dan Seni Pertunjukan.
- c. Event Creatif School Festival/Creatif School Project yang penyelenggaraannya di Gedung Sumedang Creative Center melibatkan para pelaku Sub Sektor Musik, Seni Pertunjukan, Kriya, Aplikasi dan Seni Rupa,
- d. Event Pendukung SCTV Karnaval dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sumedang yang ke 445,
- e. Pelaksanaan Promosi Ekonomi Kreatif dengan mengikuti event Bali IPTEX 2023 Pameran Peluang Investasi, Produk Unggulan Daerah dan PAriwisata di Level 21 Maal BALi yang melibatkan pelaku sub Sektor Seni Pertunjukan, Musik, Kriya dan Kuliner,
- f. dilaksanakan di Gedung Sumedang Creative Center yang di ikuti oleh sineas muda Sumedang sebanyak 29 Peserta.

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.85
Realisasi APBD Tahun 2023

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja
1	Pendapatan Daerah	2.972.527.879.606,00	2.845.322.438.547,44	95,72
	Pendapatan Asli Daerah	616.560.714.151,00	518.684.991.990,44	84,13
	Pendapatan Tarnsfer	2.353.892.683.455,00	2.326.100.313.524,00	98,82
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	300.091.667.811,00	274.928.046.490,44	91,61
2	Belanja Daerah	3.103.072.704.385,00	2.919.935.326.859,00	94,10
	Belanja Operasi	2.190.593.305.674,00	2.067.545.086.538,00	94,38
	Belanja Modal	436.401.695.037,00	405.717.844.656,00	92,97
	Belanja Tidak Terduga	36.191.841.774,00	6.967.211.399,00	19,25
	Belanja Transfer	439.885.861.900,00	439.705.184.266,00	99,96
3	Surplus/(Defisit)	(130.544.824.779,00)	(74.612.888.311,56)	57,15
4	Pembiayaan Daerah	130.544.824.779,00	130.615.426.739,74	100,05
	Sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya	162.044.824.779,00	161.530.195.031,74	99,68
5	Pengeluaran Pembiayaan	31.500.000.000,00	31.000.000.000,00	98,41
	Pembiayaan Netto	130.544.824.779,00	130.615.426.739,74	100,05
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Anggaran (SILPA)	-	56.002.538.428,18	-

Pada tahun 2023 realisasi pendapatan daerah sebesar 95,72%, dari sisi belanja daerah pada tahun 2023 realisasi belanja sebesar 94,10%

Realisasi anggaran program dalam menunjang capaian indikator kinerja tahun tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.86
Realisasi Anggaran Program
Penunjang Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	101.289.537.758,00	98,635,563,945.00	97,38
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)	284.482.342.821,00	279.076.498.030,00	98,10
	Angka Harapan lama sekolah (HLS)	284.482.342.821,00	279.076.498.030,00	98,10
Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penduduk Miskin	22.781.622.760,00	19.771.392.058,00	86,79
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	9.347.734.340,00	9.181.183.280,00	98,29
	Indeks Pemberdayaan Gender	9.331.660.940,00	9.165.559.880,00	98,22
Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	33.718.890.566,00	31.067.342.143,00	92,14
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	920.000.000,00	905.900.090,00	98,47
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43.502.316.774,00	42.318.492.248,00	97,28
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.235.000.000,00	2.164.341.668,00	96,83
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian	Indeks Kualitas Infrastruktur	182.003.439.118,00	177.678.323.190,00	97,62
Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	9.501.664.290,00	9.371.797.747,00	98,63

Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	2.057.911.000,00	1.974.144.857,00	95,93
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	11.553.661.950,00	11.152.235.541,00	96,53
Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	476.616.350,00	465.525.661,00	97,67
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Kabupaten Opini BPK	1.724.576.633.009,00 15.038.240.400,00	1.595.424.364.491,00 14.084.211.215,00	92,51 93,66
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	1.699.778.810.674,00	1.571.519.112.143,00	92,45
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	11.341.503.950,00	10.663.143.167,00	94,02
Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.974.860.000,00	5.914.215.150,00	98,98

BAB IV PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 19 dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 karena terdapat 1 (satu) IKU yang datanya belum rilis dari BPS sampai dengan di susunnya LKIP ini. Bahwa rata-rata capaian realisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar 101,78% (Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI). Adapun rincian capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Ke-1 : Angka Harapan Hidup

Target kinerja “Angka Harapan Hidup” tahun 2023 sebesar 72.70 – 73.20 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 73,19 tahun atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

2. Indikator Kinerja Ke-2 : Rata-Rata Lama Sekolah

Target kinerja “Rata-Rata Lama Sekolah” tahun 2023 sebesar 8.81 – 9.00 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 8,73 tahun atau capaian kinerja sebesar 99,01% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

3. Indikator Kinerja Ke-3 : Angka Harapan Lama Sekolah

Target kinerja “Angka Harapan Lama Sekolah” tahun 2023 sebesar 13.05 - 13.12 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 13,01 tahun atau capaian kinerja sebesar 99,69% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

4. Indikator Kinerja Ke-4 : Persentase Penduduk Miskin

Target kinerja “Persentase Penduduk Miskin” tahun 2023 sebesar 9.70 – 7.56 % dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 9,36% atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sedang). Target kinerja tercapai.

5. Indikator Kinerja Ke-5 : Indeks Pembangunan Gender

Target kinerja “Indeks Pembangunan Gender” tahun 2023 sebesar 96,75 poin dan realisasinya 99,13 poin atau capaian kinerja sebesar 99,36% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

6. Indikator Kinerja Ke-6 : Indeks Pemberdayaan Gender

Target kinerja “Indeks Pemberdayaan Gender” tahun 2023 sebesar 71,37 poin dan realisasinya 72,60 poin atau capaian kinerja sebesar 101,73% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja melebihi target.

7. Indikator Kinerja Ke-7 : Indeks Kerukunan Umat Beragama

Target kinerja “Indeks Kerukunan Umat Beragama” tahun 2023 sebesar 74.5 poin dan realisasinya 76.95 poin atau capaian kinerja sebesar 103.29% (kinerja sangat tinggi). Capaian kinerja telah melebihi target.

8. Indikator Kinerja Ke-8 : Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Target kinerja “Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan” tahun 2023 sebesar 4.15 – 6.40% dan realisasinya 0,97% atau capaian kinerja sebesar 23,37% (kinerja rendah). Target kinerja tidak tercapai.

9. Indikator Kinerja Ke-9 : Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Target kinerja “Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan” tahun 2023 sebesar 3.76 – 5.59 % dan realisasinya 2,83% atau capaian kinerja sebesar 75,26% (kinerja sedang). Target kinerja tidak tercapai.

10. Indikator Kinerja Ke-10 : Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman

Target kinerja “Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman” tahun 2023 sebesar 8.77 – 10.27% dan realisasinya 9,84% atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sangat tinggi). Target Kinerja tercapai.

11. Indikator Kinerja Ke-11 : Indeks Kualitas Infrastruktur

Target kinerja “Indeks Kualitas Infrastruktur” tahun 2023 sebesar 77,65% dan realisasinya berdasarkan data hasil perhitungan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Sumedang didapatkan angka Indeks Kualitas Infrastruktur di Kabupaten Sumedang sebesar 79,22 poin atau capaian kinerja sebesar 102,02% (kinerja sangat tinggi). Pencapaian kinerja telah melebihi target.

12. Indikator Kinerja Ke-12 : Indeks Ketahanan Daerah

Target kinerja “Indeks Ketahanan Daerah” tahun 2023 sebesar 0.52 poin dan realisasinya adalah 0,52 poin atau capaian kinerja sebesar

100% (kinerja sangat tinggi). Pencapaian kinerja tercapai.

13. Indikator Kinerja Ke-13 : Skor Pola Pangan Harapan

Target kinerja “Skor Pola Pangan Harapan” tahun 2023 sebesar 90,2% dan realisasinya adalah 94,5 % atau capaian kinerja sebesar 104,77% (kinerja sangat tinggi). Pencapaian kinerja melebihi target.

14. Indikator Kinerja Ke-14 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” tahun 2023 sebesar 64,67% dan realisasinya berdasarkan data hasil perhitungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang didapatkan angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang sebesar 65,02 poin atau capaian kinerja sebesar 100,54% (kinerja sangat tinggi). Pencapaian kinerja telah melebihi target.

15. Indikator Kinerja Ke-15 : Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang

Target kinerja “Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang” tahun 2023 sebesar 30% dan realisasinya berdasarkan data penanaman modal dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang adalah 70,66 % atau capaian kinerja sebesar 235,24 % (kinerja sangat tinggi). Capaian melebihi target.

16. Indikator Kinerja Ke-16 : Nilai SAKIP Kabupaten

Target kinerja “Nilai SAKIP Kabupaten” tahun 2023 adalah “A” dan realisasinya adalah “BB” atau capaian kinerja sebesar 96,43% (kinerja tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

17. Indikator Kinerja Ke-17 : Opini BPK

Target kinerja “Opini BPK” tahun 2023 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan realisasinya berdasarkan data dari BPK adalah WTP atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

18. Indikator Kinerja Ke-18 : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” tahun 2023 sebesar 92 poin dan realisasinya berdasarkan data dari Bagian Organisasi adalah 88,51 poin atau capaian kinerja sebesar 96,20% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

19. Indikator Kinerja Ke-19 : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Target kinerja “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” tahun 2023 sebesar 4.2 Poin dan realisasinya berdasarkan Hasil Evaluasi Tim SPBE Nasional adalah 4.14 poin atau capaian kinerja sebesar 98,57% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

20. Indikator Kinerja Ke-20 : Tingkat Pengangguran Terbuka

Target kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun 2023 sebesar 8,18-6,95 persen dan realisasinya berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik adalah 6,94 persen atau capaian kinerja sebesar 100,14% (kinerja sangat tinggi). Capaian kinerja melebihi target.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

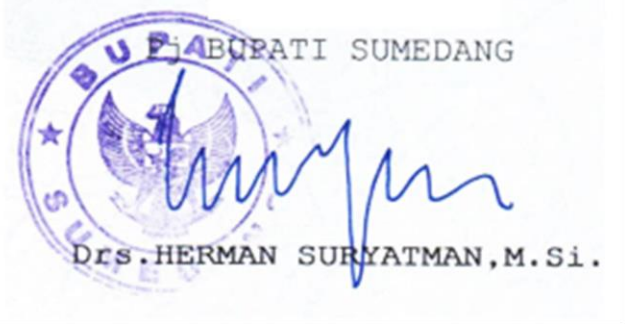
- 1) Mengoptimalkan fungsi Gugus Tugas SAKIP, optimalisasi implementasi SAKIP dengan ditunjang oleh aplikasi SICERDAS, MAKSITI dan MAUTI (e-SAKIP), serta optimalisasi implementasi SAKIP Desa untuk menunjang efektifitas implementasi SAKIP Kabupaten Sumedang.
- 2) Penguatan komitmen seluruh stakeholders untuk meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi dengan diakselerasi oleh pembangunan Zona Integritas di setiap perangkat daerah serta optimalisasi fungsi Tim Reformasi Birokrasi baik di tingkat kabupaten maupun perangkat daerah.
- 3) Optimalisasi program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk penurunan kemiskinan.
- 4) Untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah harus mengoptimalkan peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, serta meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.
- 5) Peningkatan kualitas pembangunan manusia dengan memperhatikan keseimbangan gender sehingga bisa meminimalisir kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan

perempuan.

- 6) Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga di harapkan akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akan berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat, peningkatan kemudahan penanaman modal bagi para investor.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Sumedang Tahun 2023 kami sampaikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat kepada instansi pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat.

Sumedang, Maret 2023



The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Sumedang government. The stamp contains the text 'KABUPATEN SUMEDANG' at the top and 'Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.' at the bottom. In the center of the stamp is a blue ink signature. The stamp also features a star and a Garuda emblem.



**“INSUN MEDAL
INSUN MADANGAN
SAYA LAHIR
UNTUK MEMBERI
PENERANGAN”**

- Prabu Tajimalela -

bukit Kampung Toga